POLA KEMITRAAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DI KOTA MALANG

(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ROBBIYAH MEINITA NASTITI

115030500111029

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH

-TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid-

"Berusahalah sekuat tenaga
karena tidak akan pernah ada hasil
yang akan mengkhianati usaha"

"Orang yang sukses adalah orang yang bisa menghargai waktu,
akan lebih baik menunggu daripada ditunggu"
-Almarhum Mohammad Toyib, Ayahku-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Pola Kemitraan Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)
Disusun oleh	: Robbiyah Meinita Nastiti
NIM	: 115030500111029
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Minat	: Administrasi Pemerintahan

Malang, 12 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si	**Moh. Said, S.Sos, M.AP**
NIP. 19690524 200212 2 002	**NIP. 19780630 200812 1 003**

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Januari 2017
Jam	: 08.00 WIB
Skripsi atas nama	: Robbiyah Meinita Nastiti
Judul	: Pola Kemitraan Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si	**Moh. Said, S.Sos, M.AP**
NIP. 19690524 200212 2 002	**NIP. 19780630 200812 1 003**
Anggota	Anggota
Drs. Heru Ribawanto, MS	**Dr. Siswidiyanto, MS**
NIP. 19520911 197903 1 002	**NIP. 19600717 198601 1 002**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akaedmik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 30 Desember 2016

METERAI TEMPEL 6000

Robbiyah Meinita Nastiti

NIM. 115030500111029

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Allah yang Maha Mengetahui

Terima kasih Allah, atas kuasa dan karunia Mu yang selalu senantiasa membantu setiap kesulitan yang aku hadapi hingga aku dapat menyelesaikan kuliah dan juga skripsi sehingga aku mendapatkan gelar Sarjana seperti yang aku impikan. Di kesempatan yang berbahagia ini, akan aku persembahkan karya ini kepada:

1. *Mama dan Almarhum Bapak tercinta, Dra. Ita Christiana dan Drs. Mohammad Toyib, MM. Untuk Mama terima kasih atas kasih sayang yang sangat melimpah dan selalu menjadi ibu sekaligus sahabat paling sabar menuntunku dan memberikan yang terbaik. Untuk Bapak yang semoga sudah tenang di tempat Allah yang paling terbaik, terimakasih sudah menjadi bapak paling terbaik telah mendidik dan melakukan semua pengorbanan selama 23 tahun ini. Laki-laki paling bisa dalam segala hal yang telah memberikan didikan ilmu duniawi dan akherat bagaimana menjadi orang yang pintar, rajin, dan sukses di akademik, pekerjaan, dan kehidupan. Telah menjadi sosok panutanku untuk kehidupan seperti apa kedepannya nantinya aku cita-citakan. Terimakasih selalu mengingatkan untuk bersyukur dan selalu melaksanakan ibadah menghadap memohon kepada Allah tepat waktu. Terimakasih atas keringat yang sudah dikucurkan sehingga aku bisa mewujudkan impianku, terimakasih juga telah menjadi satu-satunya orang yang menjadi motivasi ku dalam menyelesaikan kuliah dan menjalani kehidupan. Maaf, masih belum sempat membuat bangga sampai di akhir umur Bapak. Skripsi ini saya dedikasikan buat bapak, Nita sayang bapak...*

2. Kakak peremuan dan Adik laki-laki ku, Sertu Robbiyah Novita Tiffani dan Riza Destra Maulana. Aku berterimakasih kepada Allah telah memberikan orang-orang seperti kalian di hidupku. Terimakasih kalian selalu ada untuk terus menyanyangiku dan tidak pernah bosan selalu tanya kapan aku lulus yang menjadi motivasi dan aku ingin buktikan kepada kalian.

3. Aviv Iqbal Maulidan, teman terbaik, sahabat terbaik, dan pacar terbaik. Terimakasih sudah menjadi laki-laki yang selalu ada dan ga henti-hentinya sayang sama aku selama 3 tahun ini. Sudah mau melewati banyak fase kehidupan baik suka maupun duka. Terimakasih buat semua doa, support, dan kasih sayang yang sudah diberikan untukku…

4. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung dan menemaniku sejak di bangku SMA, Siska, Yenita, Tito, dan Amirus. Terimakasih kalian sudah menjadi sahabat terbaikku yang memberikan tawa dan memberikan dukungan hingga saat ini. Untuk sahabatku Sandy yang selalu menjadi dokter perlaptopan dan perflashdisk-an, jasamu akan selalu kukenang. Untuk sahabat di perkuliahan, Okky, Titis, Bocil, Lila, Fenny, dan Nia terimakasih sudah menemani dan mengisi canda tawa selama masa perkuliahan. Semua sahabatku jangan sampai memutuskan silaturahmi yaaa…

5. **Teman-teman PKKSP dan juga Pak Romy yang mengajarkanku bagaimana berorganisasi dan juga terjun ke lapangan menemui banyak orang. Terimakasih atas persaudaraan yang terjalin dan pengalaman-pengalaman yang diberikan dalam organisasi.**

6. Teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama proses perkuliahan dan atas kekompakan kalian.

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Robbiyah Meinita Nastiti, 2016, **Pola Kemitraan Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang),** Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si, Moh. Said, S. Sos, M. AP, 247 hal+xvii.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu jenis pajak yang berperan cukup besar dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Malang menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab mengelola pemungutan pajak penerangan jalan. Agar proses pemungutan pajak dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan jumlah subjek pajak atau pelanggan yang terus bertambah setiap tahun, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mengajak PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk bekerjasama sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik di Indonesia.

Kemitraan ini tertuang di Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang dibuat pada tanggal 6 Juni 2014. Kemitraan yang menekankan *good governance* dimana hubungan kemitraan antara Dinas Pendapatan Daerah dan PLN ini harus melibatkan partisipasi masyarakat. Kemitraan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang termasuk dalam konsep *Public Private Partnership (PPP)*, yaitu sistem *Service Contract* dengan pelayanan yang akan diberikan oleh pihak mitra ditentukan oleh kebijakan yang berasal dari pemerintah. Untuk memperdalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sesuatu yang sedang terjadi dan berlangsung pada penelitian yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan kemitraan ini didalamnya terdapat lima tahap alur atau prosedur pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) dengan peranan yang dimiliki ketiga pihak, yaitu masyarakat membayar tagihan, PLN menyerahkan laporan hasil rekapitulasi pemungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data yang diperoleh, Pemerintah Kota Malang membayar beban tagihan kepada PLN, dan Pemerintah Kota Malang menyediakan fasilitas kepada masayarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala yang menghambat proses pemungutan pajak penerangan jalan seperti Dinas Pendapatan Daerah yang masih kurang tegas dalam melakukan pengawasan untuk menanggapi permasalahan yang muncul dan PLN yang belum dapat melakukan pelaporan secara rinci dan terbuka, serta kurangnya kesadaran masyarakat membayar tepat waktu dan pemasangan penerangan jalan umum yang tidak resmi atau liar. Hal ini terlihat bahwa masing-masing pihak kurang konsisten dalam melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai Perjanjian Kerjasama. Saran dari penelitian ini ialah dua pihak dapat saling meningkatkan koordinasi dan kualitas kinerja dalam memenuhi kewajiban masing-masing yang harus didukung pula oleh partisipasi masyarakat yang maksimal. Peningkatan dan penyempurnaan *Memorandum of Understanding* agar pelaksanaan kewajiban masing-masing dan komunikasi yang terjadi dapat berjalan lancar serta dapat mengefektifkan dan mempercepat alur atau prosedur pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ).

Kata Kunci: ***Kemitraan, pajak, governance.***

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Robbiyah Meinita Nastiti, 2016, **Patterns Of Partnership Concerning Tax Of Street Lighting Levy (SLL) in Malang (Study in Malang City Revenue Office and PT. PLN (Persero) East Java Distribution Malang Area),** Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si, Moh. Said, S. Sos, M. AP, 247 pages+xvii.

Street Lighting Levy (SLL) is one of the type of taxes that give a significant contribution for Own Source Revenue (OSR) in Malang. Local government of Malang designate Dinas Pendapatan Daerah as a lawful institution which in their hands the full responsibility for manage income from SLL taxes. In order to maximize the number while the growth of taxpayer has increased in every years, so then Dinas Pendapatan Asli Daerah of Malang collaborate with PT PLN (Persero) East Java Distribution, Malang Region.

Agreement of partnerships between Local Government of Malang and PT. PLN (Persero) East Java Distribution, Malang Region officialy signed at 6th of June, 2014. They actually concern about "Good Governance" which is the society should be participate too, protected by "Public Private Partnership" concept. This concept is obtained by "Service Contract" system, which it means variousity of services provide by partners (PT. PLN) conducted from local governemnt policy. Descriptive research with a qualitatif approach will be a suitable type of research to extend the understanding and explain more about the partnerships between PT. PLN and Local Government of Malang.

This type of partnerships consist of 5 steps or procedure for collecting Street Lighting Levy (SLL), begin with paytaxer (local society) pay taxes, PLN collecting the data for Dinas Pendapatan Daerah, continue with Dinas Pendapatan Daerah match the data and reconciliate it, after that Local Government pay the load bill to PLN and it finish when Local Government facilitate the taxpayer. However, this steps still face some problems like inconsistency from Dinas Pendapatan Daerah to oversee and solve the obstacles, then the details of reports from PLN can't be said as satisfied, the people who still needs to develop their responsibility as a good taxpayer, plus the existence of illegal street lighting. The agreement of partnerships was made to be the guidance so that they could done their responsibility and to avoid the inconsistency. The main idea of this research, suggest the both part of the partnerships to develop the services quality in order to fulfill each responsibility nevertheless it can't be done well without the good habbit of taxpayer itself. Development and enhancement of "Memorandum of Understanding" must be the main purpose, which is it will facilitate the both part of partnerships to run the procedure and the system of "Street Lighting Levy (SLL)".

Keyword : Partnerships, Tax, Governance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pola Kemitraan Dalam Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimaksih kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing Skripsi dan Bapak Moh. Said, S. Sos, M.AP selaku Anggota Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kritik dan saran dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama saya belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Para staf dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang telah memberikan informasi dan mendapatkan data-data untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ni Kadek Yuli selaku Kasubag Umum, Bapak Tri Oky Rudianto selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, Bapak Bambang Nurmawan selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Bapak Eko

Prabudi selaku Bendahara Penerimaan, Bapak Wicaksono selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Malang, Ibu Dewi dan Ibu Arifin selaku perwakilan masyarakat Jalan Danau Ranau 1 yang telah membantu, memberikan informasi, mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Serta bersedia untuk diwawancara oleh penulis selama penelitian.

7. Kedua Orang Tua saya Almarhum Drs. Mohammad Toyib, MM dan Dra. Ita Christiana, serta Kakak dan Adik yang telah membantu baik secara moril maupun materiil serta doa yang tak pernah putus-putusnya.
8. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Minat Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya angkatan 2011.
9. Semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan magang ini.

Akhir kata harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan Skripsi ini, serta tidak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dihati pembaca.

Malang, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
RINGKASAN ..... **viii**
SUMMARY ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Administrasi Publik 15
1. Definisi Administrasi Publik 15
2. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik 16
B. Konsep *Governance* 22
C. Hubungan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat 30
1. Definisi Kemitraan 30
2. Prinsip dan Model Kemitraan 34
3. Ciri-ciri dan Syarat Terjadinya Kemitraan 39

4. Pengertian *Public-Private Partnership* 41
5. Macam-macam *Public-Private Partnership* 43
D. Pajak Daerah 56
1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 64
2. Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 64

BAB III METODE PENELITIAN 66

A. Jenis Penelitian 66
B. Fokus Penelitian 68
C. Lokasi dan Situs Penelitian 70
D. Sumber dan Jenis Data 72
E. Teknik Pengumpulan Data 73
F. Instrumen Penelitian 75
G. Metode Analisis Data 78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 86

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 86
1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 86
a. Kedudukan 86
b. Struktur Organisasi 91
c. Tugas, Pokok, dan Fungsi 94
d. Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan 96
2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang 99
a. Kedudukan 99
b. Makna Logo 101
c. Struktur Organisasi 103
d. Tugas, Pokok, dan Fungsi 106
e. Visi dan Misi 109

B. Penyajian Data 110
1. Kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang 110
a. Proses Kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota
b. Malang 110
c. Peranan aktor kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang 117
1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 117
2. Peranan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang 120
3. Peranan Mayarakat 123
d. Pengembangan PPP dalam sistem pemungutan PPJ di Kota Malang 126
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kemitraan dalam proses pemungutan PPJ di Kota Malang 132
a. Faktor penghambat 132
b. Faktor pendukung 142

C. ANALISIS DATA 146
1. Kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang 146
a. Proses Kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota
b. Malang 147
c. Peranan aktor kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang 158
1. Peranan aktor kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang 158
2. Peran PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang 165
3. Peran Mayarakat 169
d. Pengembangan PPP dalam sistem pemungutan PPJ di Kota Malang 175
b. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kemitraan dalam proses pemungutan PPJ di Kota Malang 185
a. Faktor penghambat 186
b. Faktor pendukung 193

BAB V PENUTUP 197

A. Kesimpulan 197

B. Saran 200

DAFTAR PUSTAKA 203

LAMPIRAN 206

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	5
4.1	Data pegawai pada Dispenda Kota Malang	90
4.2	Kontribusi penerimaan PPJ terhadap pendapatan daerah Kota Malang	128
4.3	Laporan realisasi penerimaan PPJ bulan Januari-Desember 2015	129
4.4	Rekonsiliasi Data PPJ dengan PLN Area Malang	135
4.1	Data pegawai pada Dispenda Kota Malang	139

DAFTAR GAMBAR

No. Judul **Halaman**

2.1 Hubungan Antar Sektor 28
2.2 Tipe-tipe *Public Private Partnership* 44
2.3 Siklus Kegiatan Kemitraan 47
3.4 Komponen Analisis Data 81
4.1 Struktur organisasi Dispenda Kota Malang 93
4.2 Logo PLN 101
4.3 Struktur PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang 105
4.4 Prosedur pemungutan PPJ di Kota Malang 154

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul **Halaman**

1. Surat Pengantar kepada Walikota Malang yang juga tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang bulan Januari 2016 206
2. Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bulan Januari 2016 207
3. Berita acara rekonsiliasi bulan April 2015 208
4. Nota Kredit atau laporan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum bulan Januari 2016 209
5. Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015 209
6. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Malang Dengan PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Di Kota Malang 212
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan 223
8. Struk atau bukti pembayaran listrik Pra-bayar 243
9. Struk atau bukti pembayaran listrik Pasca-bayar 243
10. Surat Rekomendasi Riset dari BANGKESBANGPOL Kota Malang 244
11. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 245
12. Foto Dokumentasi Penelitian 246

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan kehidupan setiap warga negara atau masyarakatnya. Melihat perkembangan jaman yang disertai pula dengan perkembangan kebutuhan masyarakat ini dibutuhkan suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Maka, melalui sistem pemerintahan yang mendukung agar terciptanya suatu pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mencapai sebuah kesejahteraan tersebut.

Dalam upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka kebijakan otonomi daerah mengenai peran pemerintah didaerah haruslah bergeser ke arah yang lebih demokratis. Sejalan dengan definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan menjadi Undang-undang 23 Tahun 2014 dan mengalami perubahan hingga sekarang yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah didalamnya mengatur mengenai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka setiap daerah dituntut untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri demi memenuhi kebutuhan serta mewujudkan kesejahteraan

masyarakatnya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Penyerahan pengelolaan pemerintah daerah dari pemerintah pusat inilah mencakup segala di daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Termasuk didalamnya hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya. Hal ini dapat dimengerti bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri menjadi faktor keberhasilan terselenggaranya otonomi daerah, sebab kemandirian suatu daerah dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Daerah mempunyai hak mengatur dan mengelola potensi dan sumber-sumber keuangan didaerahnya untuk memperoleh pendapatan. Dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah berupaya mewujudkan kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai bagi masyarakatnya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, harus adanya dukungan dari sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun penerimaan lainnya yang sah.

Salah satu sumber keuangan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima oleh daerah berupa uang maupun barang yang diperoleh dengan menggali kekayaan daerahnya sendiri dan diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan tujuan melaksakan pembangunan di daerah serta untuk memperkecil ketergantungan dana terhadap Pemerintah Pusat. (Widjaya, 1992: 42).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemberian kewenangan dalam sektor penerimaan daerah telah mengakibatkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intesifikasi dan ekstenfikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber yang baru. Dalam sektor pajak yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah adalah pajak daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang tidak harus ada timbal balik jasa secara langsung yang seimbang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dimaksudkan dengan pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional.

Kemudian salah satu jenis pajak daerah asli yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Malang yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Seperti pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut Pajak Penerangan Jalan merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga keberadaan Pajak Penerangan Jalan memang digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas dasar manfaat penerangan jalan yang diterima oleh masyarakat. Dasar pengenaan tarif Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan penggunaan energi listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun non-PLN. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang inilah yang merupakan institusi pemerintahan atau organisasi sektor publik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pokok kebijakan pemerintah daerah di bidang pemungutan pajak daerah, yaitu salah satunya Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

TAHUN	TARGET (dalam rupiah)	REALISASI PENERIMAAN
2011	24.581.144.223,00	26.805.737.376,00
2012	26.744.632.033,00	29.056.618.238,00
2013	31.497.453.032,44	33.870.696.565,00
2014	37.496.943.638,94	39.768.777.893,00
2015	40.496.943.638,94	45.603.347.367,00
2016 s/d September	42.996.948.500,00	35.154.852.244,00

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malag Tahun 2011-2016 (Dokumen Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu mampu melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dari jangka waktu lima tahun tersebut pemasukan Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh pemerintah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya baik target maupun realisasi penerimaan yang dapat diperoleh. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah terbesar kedua diantara pajak-pajak daerah lainnya dalam memberikan kontribusi penerimaan cukup besar bagi pemerintah Kota Malang. Hal ini tentunya menjadi salah satu pemasukan keuangan bagi pemerintah Kota Malang. Ini artinya pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selalu mengalami peningkatan dan mampu mencapai lebih dari target ini harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Pajak dibidang penerangan jalan ini mampu menjadi sumber keuangan yang potensial bagi Pemerintah Kota Malang.

Pajak Penerangan Jalan ini ternyata merupakan pajak yang memberikan pengaruh cukup besar nilai pemasukannya diantara pajak-pajak daerah lainnya terhadap pendapatan asli daerah khususnya di Kota Malang. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu Kepala Bidang Pembukuann dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang yang menyatakan bahwa:

> "Dari pemasukan yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pajak yang paling besar nilainya yang mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah Kota Malang yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)." *(bersumber dari wawancara dengan Bapak Oky pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 10.05 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Dari pernyataan tersebutlah dapat dibuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang penting untuk dikelola secara efektif dan efisien. Dasar pengenaan tarif Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun oleh non-PLN. Tarif Pajak Penerangan Jalan umumnya dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh PLN maupun yang dihasilkan oleh swasta. Untuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada pengguna listrik dilakukan PLN melalui pembayaran tagihan yang sekaligus termasuk Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada pengguna listrik non-PLN, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang terpasang atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah dan juga dikenakan Pajak Penerangan Jalan. Pada kesimpulannya, Pajak Penerangan Jalan

ini akan disetorkan kepada pemerintah daerah yang telah menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengelola dan membiayai penerangan jalan umum.

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan pemerintah pada proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Pemerintah Kota memutuskan bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara sebagai perusahaan milik negara yang menjual jasa pemakaian tenaga listrik di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemerintah Kota Malang yang kewenangannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan. Prosedur pengelolaan dalam sistem Pajak Penerangan Jalan ini cukup rumit mengingat disini terdapat dua institusi yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yaikni Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Bentuk kerjasama atau kemitraan ini mungkin sering menimbulkan permasalahan, seperti sulitnya menciptakan pertanggungjawaban kerjasama diantara keduanya dan kurangnya transparansi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang menyatakan bahwa:

> "Disini Dispenda tidak bisa melakukan kontrol langsung atau melakukan pengecekan kepada PLN dalam urusan Pajak Penerangan Jalan ini. Sebab, PLN juga mempunyai kewenangannya sendiri, begitu pula Dispenda dengan kewenangannya sendiri. Kewenangan masing-masing ini juga dikarenakan Dispenda dengan PLN merupakan instansi yang berbeda. Namun, dalam hal ini tetaplah ada koordinasi yang dilakukan antara Dispenda dengan PLN yakni contohnya dalam urusan negosiasi penetapan target Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya. Hal tersebutlatlah yang mungkin menimbulkan sedikit permasalahan dalam hal kerjasama diantara kami, adanya sedikit ketidakterbukaan." *(bersumber dari wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 10.10 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Salah satu upaya untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas adalah menetapkan dan memungut pajak daerah termasuk Pajak Penerangan Jalan. Perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk memungut Pajak Penerangan Jalan yakni Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pelaksanaanya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hal ini menuntut untuk dipertanyakan kembali bentuk kerjasama atau kemitraan yang telah disepakati Pemerintah Kota Malang. Seperti fenomena permasalahan yang terjadi lima tahun belakangan, yang disinyalir terjadi ketidakterbukaan pelaporan data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diperoleh Pemerintah Kota Malang sehingga Pemerintah Kota Malang sempat mendapatkan teguran.

Permasalahan mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) inilah yang menyebabkan proses pemungutan pajak ini menjadi belum optimal seperti yang sudah direncanakan. Dari kemungkinan yang terjadi hal tersebut mungkin dikarenakan adanya ketidakterbukaan dalam proses kerjasama, selain itu juga terdapat *one prestasi*. Atas dasar tuntutan tersebut, maka organisasi pemerintahan seharusnya mengubah peranan yang dilakukan selama ini, karena masyarakat menginginkan sebuah birokrasi yang mandiri dan profesional yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih melalui penerapan. Maka dari itu pula, sebaiknya dilakukan suatu upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut. Bahkan upaya yang dilakukan

seharusnya dapat lebih mengoptimalkan kembali pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini.

Hal ini menyebabkan harus dilakukan sebuah upaya atau yang variatif dan inovatif oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan pembaruan dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini. Dengan demikian, dapat dilakukan sebuah proses kerjasama atau kemitraan yang jelas dapat melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *governance* yaitu pemerintah *(state)*, masyarakat sipil *(civil society)*, dan pasar atau swasta atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab baru dapat tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan *(trust)*, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti (Effendi dalam Sukardi, 2009:37).

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tentunya juga tidak dapat menghilangkan peran dari masyarakat. Adanya suatu partisipasi dari masyarakat diharapkan dapat mendukung sebuah proses kerjasama atau kemitraan dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat juga harus turut ikut peran serta dalam melaksanakan proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Demi mewujudkan masyarakat yang demokratis, maka dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat tidak seharusnya lepas tangan dan tidak peduli pada prosesnya sehingga hal ini dapat menyempurnakan kerjasama atau kemitraan yang baik sesuai yang direncanakan.

Sebab, kerjasama *(partnership)* atau kemitraan sangatlah penting untuk dilakukan dalam rangka mengoptimalkan Pajak Perangan Jalan (PPJ). Sebuah kerjasama atau kemitraan yang lebih terbuka, sebab keterbukaan merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Dari kondisi yang tejadi inilah untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dilakukan sebuah upaya yang variatif oleh pemerintah yaitu kerjasama *(partnership)* atau kemitraan yang seharusnya melibatkan tiga domain (pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat). Kerjasama atau kemitraan yang sudah dilakukan harus juga lebih dioptimalkan, melakukan kerjasama atau kemitraan yang lebih bertanggungjawab, profesional, akuntabel, dan transparan. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai upaya mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui kerjasama atau kemitraan, dengan mengambil judul **"Pola Kemitraan Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)".**

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan proses Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maka dilakukan sebuah kemitraan atau kerjasama yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang variatif antara sektor pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dalam rangka otonomi

daerah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kemitraan *(partnership)* dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan kemitraan *(partnership)* dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kemitraan *(partnership)* dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan kemitraan *(partnershi)* dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan secara teoritis maupun secara praktis terhadap kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Teoritis
    a. Memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan mengulas permasalahan atau topik yang sama, yaitu tentang pola kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan.
    b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi penulis dalam bidang pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta menerapkan teori-teori pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan terhadap kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
2. Praktis
    a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota setempat guna mengetahui pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang tertarik dan ingin mendalami penelitian yang akan datang mengenai pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini dan untuk mempermudah dalam memahami pembahasan sehingga lebih terarah secara

sistematis maka secara garis besar kerangka dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan pandangan-pandangan yang bersifat umum mengenai fenomena yang terjadi di lapangan yang terangkum sebagai latar belakang dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian supaya lebih jelas dan terarah, dan manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara akademis maupun praktis, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap judul yang diambil. Bab ini berisi definisi-definisi dan teori-teori yang digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknik metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data dan menggambarkan masalah yang terjadi dalam tahap analisis untuk kemudian diinterpretasikan dengan teori yang terkait, sehingga tujuan penelitian tercapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Secara umum, administrasi publik dimaksudkan sebagai suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan arah terhadap usaha sejumlah orang. Namun, juga terdapat banyak definisi tentang administrasi publik yang telah diungkapkan oleh para ahli, beberapa ahli yang memberikan batasan-batasan pengertian tentang administrasi publik. Seperti yang dikutip oleh Syafiie (2006:23-25) menjelaskan administrasi publik sebagai berikut:

> "Administasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah (John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus). Adminitrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan (Prajudi Atmosudirdjo). Administrasi Publik adalah studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (Edward H. Litchfield). Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Dwight Waldo)."

Sedangkan menurut Felix A. Nigro dan Lioyd G. Nigro (dalam Sjamsuddin, 2006: 115) berpendapat bahwa administrasi publik suatu bentuk kerjasama dalam pemerintahan yang melbiatkan aktor-aktor pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan, serta melibatkan berbagai macam kelompok

swasta dan masyarakat dalam proses politik semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi mengenai administrasi publik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dengan melibatkan beberapa peran yaitu peran pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan tugas pemerintahan agar tujuan negara dalam memenuhi kebutuhan publik dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan paradigma mengenai administrasi publik yang sejalan dengan perubahan dari jaman ke jaman dengan meningkatnya teknologi, globalisasi baik disektor ekonomi, politik, dan budaya, serta kebutuhan masyarakat semakin beragam pula. Munculnya perubahan ini menunjukkan suatu ketidakpuasan terhadap bentuk praktek pelayanan publik yang terdahulu di masa lampau yang lebih mengutamakan efisiensi dan peran pemimpin yang besar. Praktek administrasi publik yang lama mungkin justru tidak memfokuskan diri pada masyarakat dimana kebutuhan masyarakatnya tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Tekanan atas ketidakpuasan yang terjadi tersebut pada akhirnya memicu dilakukannya sebuah reformasi pada sektor pelayanan publik. Sebagai respon dari adanya lingkungan baru yang berubah sekaligus untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sehingga memang perlu dilakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Kondisi ini seperti yang dijelaskan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt mengenai perkembangan pendekatan

administrasi publik yang meliputi *Old Public Administration (OPA), New Public Service (NPS), dan New Public Management (NPM)* (dalam Mindarti, 2007: 116-171).

1. *Old Public Administration (OPA)*

Pendekatan administrasi publik tradisional *(Old Public Administration)* menurut Denhardt dan Denhardt memiliki ciri dominan sebagai berikut:

a. Administrasi publik cenderung punya peran yang terbatas dalam proses perumusan kebijakan publik, sedangkan peran utama lebih pada upaya mengimplementasikan kebijakan publik.
b. Pemberian pelayanan dilaksanakan oleh para administrator yang harus bertanggungjawab kepada pejabat politik dan diberi diskresi (keleluasaan) yang sangat terbatas.
c. Program-program publik dikelola oleh organisasi yang disusun secara hierarkis dimana para pemimpin mengontrol dari atas ke bawah.
d. Tujuan utama yang hendak dicapai pemerintah adalah efisiensi dan rasionalitas.
e. Apabila ingin efisien, organisasi publik harus dikelola dengan sistem tertutup dimana keterlibatan warga masyarakat sangat terbatas atau dibatasi.
f. Tugas utama administrasi publik adalah melaksanakan fungski teknis administrasi seperti POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, and Budgeting).*

2. *New Public Management (NPM)*

Sementara manajemen publik baru (*New Public Management)* menurut Denhardt dan Denhardt memiliki ciri dominan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada para manajer profesional.
b. Kinerja diukur dengan standar dan ukuran kinerja yang jelas.
c. Lebih ditekankan pada pengawasan dan penilaian hasil.
d. Pembagian tugas ke dalam unit kerja yang ada di level lebih (desentralisasi).
e. Dikembangkan semangat persaingan dalam tubuh pemerintahan.
f. Lebih menekankan penerapan gaya manajemen sektor swasta.

g. Lebih menekankan disiplin tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber daya publik.

3. New Public Service (NPS)

Dalam hal ini, Denhardt dan Denhardt menilai bahwa pendekatan *New Public Management (NPM)* cenderung lebih mengaitkan negara *(state)* dengan pasar *(market)* semata. Padahal pemerintahan yang modern sesungguhnya bukan sekedar mencapai efisiensi, tetapi juga hubungan akuntabilitas antara negara dan pemerintah dengan warganya. Seharusnya, warga *(citizen)* tidak sekedar diperlakukan sebagai pelanggan dan konsumen *(costumer and consumer)* tetapi lebih sebagai warga negara *(as citizen)* yang memiliki hak untuk menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya, atau atas kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai. Dengan demikian, secara keseluruhan warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak, dan menuntut siapapun yang betanggung jawab atas penyedia pelayanan publik. Dengan membuang sisi buruk OPA dan NPM, Denhardt dan Denhardt mengembangkan paradigma baru yang disebut *New Public Service (NPS).* Paradigma NPS ini dibangun berdasarkan:

a. Theories of Democratic Citizenship

Inti dari teori ini adalah warga negara tidak hanya memiliki hak dan kewajibanny saja, namun juga memiliki tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan politik. Kewarganegaraan lebih berkitan dengan kemampuan warga negara untuk mampu mempengaruhi proses pemerintahan. Pemerintah dibentuk untuk

menjamin dan melindungi bahwa warga negara membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingannya. Semua itu akan mendorong individu untuk mau terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya saja melainkan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, warga negara seharusnya melibatkan diri secara aktif, intensif, dan mampu menjalankan pemerintahan yang efektif.

b. *Models of Community an Civil Society*

Dikembangkannya visi "kebaikan bersama" yang bisa menjadikan sebuah sistem sosial menjadi lebih hidup dan berperan lebih baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka menginginkan tumbuhnya sebuah komunitas yang berlandaskan kepedulian, rasa percaya, kerjasama yang terikat kuat oleh sebuah sistem yang efektif menjamin berlangsungnya komunikasi sekaligus solusi atas berbagai konflik, serta menghendaki pemerintah berperan penting dalam membangun komunitas dan masyarakat yang kuat dimana mereka didorong untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan.

c. *Organizational Humanism and the New Public Administration*

Model organisasi rasional yang hanya mengupayakan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, padahal perilaku manusia tidak sepenuhnya bersifat rasional melainkan bertindak atas dasar perasaan dan emosi. Untuk itu, organisasi model humanistis perlu dibangun disektor sebagai alternatif bagi organisasi model rasional atau birokratis. Model administrasi negara

baru menghimbau perlunya administrasi publik yang memperhitungkan peranan nilai seperti keadilan, persamaan, kejujuran, kepekaan, tanggung jawab yang teraktualisai dan kehidupan organisasi publik.

d. Post-Modern Public Administration

Dikembangkannya pendektan alternatif yang lebih peka terhadap sistem nilai, pemanfaatan emosi dan perasaan dalam hubungan-hubungan antar manusia agar mampu mengembangkan sikap empati dan akhirnya mampu mengambil tindakan atau respons yang efektif. Hal itu semakin penting karena pelaksanaan *governance* akan menuntut leboh didasarkan pada keterbukaan pada semua pihak.

4. *Kepemerintahan (Governance)*

Menguatnya isu-isu yang berkembang untuk dilakukannya peningkatan perwujudan demokrasi dalam penerapan praktek mekanisme pasar dalam manajemen sektor publik akhirnya mendorong dilakukannya sebuah reformasi atau pembaruan di sektor publik. Giddens (dalam Mindarti, 2007:175) menegaskan bahwa proses reformasi pada tata pelayanan sektor publik ini hendaknya diarahkan pada upaya membangun *governance* daripada sekedar *government.*Perbedaan mendasar antara *govenment* dengan *govenance* terletak pada prosesnya bukan pada hasil yang diperoleh.

Seperti yang diungkapkan Sammy Finer (dalam Mindarti, 2007:177) *governance* sebagai:

1) Aktivitas atau proses memerintah
2) Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan
3) Orang-orang yang diberi tugas memerintah atau pemerintah
4) Cara, metode, atau sistem dimana masyarakat tertentu diperintah.

Dengan demikian, fokus konsep *governance* lebih menekankan pada mekanisme atau proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi konsep *governance* bukan dimaksudkan untuk menggantikan kosep *new public management,* namun hanya lebih menekankan kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang baik. Maksudnya ialah pemerintahan yang baik, yaitu yang memiliki legitimasi kuat, akuntabel, kompeten, dan tanggap terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan konsep *governance* terdapat tiga domain *(three domains)* utama pelaksananya, yakni negara *(state),* swasta *(private sector),* dan masyarakat sipil *(civil society)* yang mempunya tugas penting dalam pembangunan tata penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Pada saat ini, fungsi yang telah dijalankan pemerintahan lebih kepada fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat leboh berpartisipasi atau mengambil peran dalan hampir semua aspek kehidupan yang menyangkut masyarakat sendiri. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, pada sekarang ini lebih banyak membutuhkan partisipasi atau campur tangan yang besar dari masyarakat. Berbeda dengan sebelumnya dimana pemerintah kurang atau bahkan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas kepentingan masyarakat. Yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan masyarakat semakin tinggi dan turunnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat.

Turut sertanya peran masyarakat ini semata-mata ialah untuk memenuhi kepentingannya, sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dan berperan serta dengan memberikan aspiranya dalam proses pemerintahan. Disinilah

terjadi suatu proses yang disebut dengan demokrasi. Proses ini dapat dijalankan dengan melibatkan peran dari *stakeholder*, yaitu pemerintah sendiri sebagai pelaksana, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga *stakeholder* tersebut dapat bekerja sama dengan membentuk suatu jaringan kerja atau kemitraan dalam melaksanakan tujuan negara. Adanya kebebasan masyarakat untuk berperan serta tersebut, dan peran dijalankannya pemerintahan oleh *stakeholder*, serta dibentuknya suatu jaringan kerja atau kemitraan inilah suatu upaya pelaksanaan konsep *governance*

B. Konsep *Governance*

Seiring dengan berjalannya waktu, penyelenggaraan kehidupan bernegara juga mengalami perubahan. Pola tata pemerintahan yang lama kini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebur dapat terlihat dari pola penyelenggaraan pemerintah yang dahulu *state centered,* dimana pemerintah memberikan peluang kepada warganya untuk turut andil dalam berbagai kegiatan bernegara (Luthfi, 2013:12).

Pada saat ini, orientasi penyelenggaraan pemerintah telah berubah menuju kepada pelayanan publik. Artinya, pemerintah memiliki tugas yang sangat berat untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuka diri serta melibatkan aktor eksternal guna menjalankan program pelayanan yang diembannya. Pada umumnya pihak eksternal tersebut adalah masyarakat madani *(civil society)* dan swasta *(private)* seperti yang ada pada konsep *Governance*. Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebutlah konsep *Government* (pemerintahan) dengan *Governance* (tata pemerintahan) dapat dengan mudah untuk dibedakan (Luthfi, 2013:12).

Konsep "*governance"* tidak hanya sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141). *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Ganie-Rochman, 2000:142). Pinto dalam Nisjar (1997:119) mengatakan bahwa *"governance"* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalm pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara (2000:1) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services.* Lebih lanjut LAN (2000:5) menegaskan dilihat dari segi *functional aspect, governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

United Nations Development Programme (UNDP) (1997:9) mengemukakan kepemerintahan atau *governance* diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengatur urusan-urusan pemerintah. Lebih lanjut UNDP menegaskan kepemerintahan ialah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks melaui warga negara *(citizen)* dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, serta memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Sedangkan Sjamsuddin (2006:6) mengartikan bahwa *Governance* adalah

> "Pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara tapi juga semua *stakeholder* yang ada, baik itu dunia usaha dengan kelompok pengusahanya yang kuat, sampai pada kelompok termiskin dalam masyarakat".

Sjamsuddin juga mempertegas bahwa *Governance* adalah proses lembaga pemerintahan, bisnis (sektor swasta), dan kelompok warga dalam mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan.

Dengan demikian dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang dominan karena masih ada aktor-aktor lain yang ikut terlibat. Hal tersebut diperlukan guna menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Sehingga, hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling mengontrol *(check and balances).* Berdasarkan uraian diatas maka *Governance* dapat dimaknai sebagai interaksi atau sinergi antara berbagai aktor dalam suatu kepemeintahan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah adalah aktor yang mempunyai kapasitas memadai untuk menggerakkan masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesejahteraan berbangsa dan bernegara khususnya dalam pelayanan publik.

Pengertian *governance* yang dikemukakan UNDP ini, menurut LAN (2000:5) mempunyai tiga kaki *(three legs),* yaitu *economic, politic,* dan *administrative. Economic governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. *Political governance* menunjuk pada proses

pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang bersifat *legitimate* dan *authoritative*. Maka dari itu negara seharusnya terdiri dari tiga cabang pemerintahan, yakni legilatif, eksekutif, dan yudikatif. *Administratif governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka.

Unsur utama (domains) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan *(governance)* menurut UNDP dalam Widodo (2001:20) terdiri dari tiga macam yaitu *the state, the private sector,* dan *civil society organizations.*

a. The State

Diantara tugas terpenting negara *(states)* pada masa ke depan yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan mendefinisikan peran pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, dan melindungi lingkungan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial, dan politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kualitas administratif pemerintah.

Intitusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, mememlihara keseimbangan sosial, ketertiban dan keamanan, meningkatkan penerimaan keuangan dan menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur, memelihara standar keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau,

mengatur aktivitas ekonomi, atau yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat *(empowering the people).* Mereka diharapkan memberikan layanan yaitu menyediakan kesempatan yang sama dan menjamin sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan pemerintahan yang kondusif.

b. *The Private Sector*

Pasar dan sektor swasta jelas telah memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa *(goods and services)* berjalan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dan dalam suatu konsep kerja *"incentives and rewards"* secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

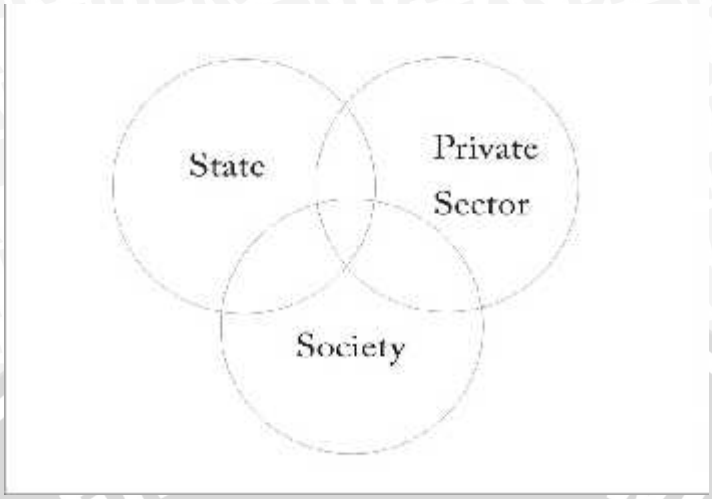
c. *Civil Society Organizations*

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil *(civil society organizations)* yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik serta yang mengerahkan berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat

dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *"check and balances"* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah *(government power)* dan sektor swasta, tetapi mereka dapat juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama yang lain. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu memonitor lingkungan, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi serta mengorganisir mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik. Mereka memiliki peranan penting dalam mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial, dan memberikan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah. Mereka dapat juga membantu sebagai sarana untuk melindungi dan memperkuat kultur, keyakinan agama, dan nilai-nilai.masih banyak lagi yang dapat diperankan oleh organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik.

Hubungan diantara ketiga unsur utama *(domains)* dalam penyelenggaraan *"governance"* dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Hubungan Antar Sektor

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, Akuntabiltas dan Good Governance, 2000, hal. 6.

Sektor negara *(state)* sebagai salah satu unsur *governance*, didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor swasta dibedakan dengan masyarakat, karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Masyarakat *(society)* terdiri dari individual maupun kelompok (baik terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadata masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain (LAN, 2000:6).

Sebagaimana ditegaskan oleh Lembagan Administrasi Negara (2000:1) dalam Widodo (2001:23) bahwa "*Governance* adalah proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik)".

Selain itu, dalam Sedarmayanti (2009:280&307) juga mengungkapkan pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan *(Governance Stakeholder)* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori beserta perannya, yaitu:

a. Negara *(state)* merupakan konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Negara berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif, dimana negara berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pnyelenggaraan kekuaaan pemerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasioanal serta global.
b. Sektor swasta merupakan pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan,perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Sektor swasta berperan untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan kegiatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik,pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

c. Masyarakat madani merupakan kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup bak perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosisal politik dan ekonomi. Masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

C. Hubungan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

1. Definisi Kemitraan

Menurut Sulistyani (dalam Marsiatanti, 2011:51) kemitraan ditinjau dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner* yang memiliki terjemahan pasangan, jodoh, sekutu atau komponen, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meingkatkan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Selanjutnya, Hafsah (2000) dalam Maulidiah menyatakan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak

pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalm arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi. Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan memperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri.

Dalam kemitraan harus adanya faktor kerjasama yang amat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar kolaborasi ketiga pihak terlibat terjalin komunikasi. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada diatas kepentingan yang lain, semuanya harus berjalan sejajar sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan. Dalam pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif, dan partisipatif sehingga *good governance* dapat terwujud dalam kemitraan yang dijalankan. Agar *good governance* dapat diwujudkan, maka dalam hal ini sesuai dengan konsep *governance* yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan dengan baik. Dari jenis hubungan kerjasama atau

kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan swasta inilah muncul suatu hubungan yang disebut dengan *Public Private Partnership (PPP).*

Fleksibilitas kemitraan menyebabkan ideal bagi kerjasama awal. Pertama, kemitraan tidak mengubah independensi organisasi yang menyeponsori. Kedua, kemitraan melibatkan resiko yang relatif rendah, karena kemitraan bisa terus berlangsung jika hanya selama partner mau. Ketiga, ketika organisasi bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka seharusnya memahami satu sama lain lebih baik, bisa memprediksi tindakan satu sama lain, dan memperkuat kepercayaan satu sama lain. Pola kemitraan yang berjalan di sektor pemerintah dan swasta sebagai pemegang kendali selama ini ada beberapa macam bentuk, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi daerah sekitarnya.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dengan prinsip saling memberikan manfaat, saling memperkuat, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan antara pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh semua pihak, baik perseorangan, badan hukum, organisasi, ataupun kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra memiliki status setara, memiliki visi misi yang berbeda namun saling melengkapi secara fungsional. Hal tersebut tentu saja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam sinergi kemitraan di bidang pajak penerangan jalan ini.

Berdasarkan jangka waktunya dapat dibedakan, yakni:

a. Kemitraan Isidental

   Kemitraan isidental adalah bentuk kemitraan yang didasari oleh kepentingan ekonomi bersama dalam jangka pendek dan dihentikan jika kegiatan yang bersangkutan telah selesai. Kemitraan ini terjalin dengan atau tanpa kesepakatan kontrak kerja. Hubungan yang terjalin biasanya dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usaha tani.

b. Kemitraan Jangka Menengah

   Kemitraan jangka menengah adalah bentuk kemitraan berdasarkan motif ekonomi dalam jangka waktu menengah atau musiman produksi tertentu. Kemitraan seperti ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

c. Kemitraan Jangka Panjang dan Terus-menerus

   Kemitraan ini dilakukan dalam bentuk jangka panjang dan terus-menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini didasari saling ketergantungan dalam hal pengadaan bahan baku, permodalan, manajemen, dan lain-lain (Irawan, 2004:17).

Penjelasan diatas merupakan kemitraan yang terjadi pada ekonomi mikro. Proses yang sering terjadi di koperasi, individu ke individu atau badan usaha yang memiliki ruang lingkup terbatas. Pembagian kemitraan berdasarkan waktu ini menjelaskan secara pokok dasar pembentukan kemitraan dan masa berlaku kemitraan, dan juga menjelaskan latar belakang terjadinya kerjasama yang pada umumnya terjadi. Berdasarkan pembagian ini dilakukan riset yang lebih mendalam

dan spesialisasi baik di sektor publik dan sektor swasta. Hal ini mendorong timbulnya pembagian-pembagian kemitraan lainnya.

2. Prinsip dan Model Kemitraan

Menurut Adi Chandra (dalam Marsiatanti, 2011:53) hubungan kemitraan antara beberapa pihak akan terjalin erat dan saling menguntungkan jika pihak-pihak tersebut memegang teguh prinsip-prinsip kemitraan yang mendukungnya, seperti dibawah ini:

a. Saling percaya dan menghormati

   Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat posisi dan perannya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi diantara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitraan akan dengan mudah melakukan kerjasama melalui prtaksis berbagai peran, tugas, kewenangan, dan juga melibatkan pertukaran sumber daya.

b. Otonomi dan kedaulatan

   Salah satu komponen penting yang menjadi penyusunan bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan kemitraan

selayaknya dibangun dan dijalankan melalui kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip kedua ini secara logis merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya prinsip saling percaya dan menghormati, pihak-pihak yang membangun kemitraan akan dengan sendirinya memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanoa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.

c. Saling mengisi

Kemitraan dalam pnegertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus meilihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian, kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang diperlukan untuk itu, sehingga diperoleh pencapaian yang lebih besar dan bermakna pada pengertiannya yang lebih luas.

d. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Mesikupun kemiktraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya, bukan berarti pihak-pihak yang terlibat didalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Untuk maksud menjamin berjalannya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan adanya prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terlibat

dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud fan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggungjawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praktis. Berjalannya kedua prinsip tersebut di atas akan menjadikan kemitraan menjadi pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif.

Selanjutnya, Sulistiyani (2004: 130) menjelaskan model dari kemitraan yang dikembangkan berdasarkan dunia organisme, yaitu:

a. *Pseudo Partnership* (Kemitraan Semu)

   Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara berimbang satu dengan lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b. *Mutualism Partnership* (Kemitraan Mutualistik)

   Kemitraan mutualistik adalah persekutuan antar dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman

akan pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

c. *Conjungation Partnership* (Kemitraan melalui Peleburan atau Pengembangan)

Kemitraan konjungasi adalah kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium. Dua paramecium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing, namun dalam kerjasama model ini antara pihak yang bermitra akan memisah atau tidak lagi bermitra setelah mendapatkan kemampuan yang ditujukan.

Selain model yang dijelaskan diatas, Sulistiyani (2004:131-132) juga menjelaskan tentang model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan kehidupan organisasi pada umunya, diantaranya adalah:

a. *Subordinate Union of Partnership*

Subordinate Union of Partnership atau kemitraan antara dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara *subordinate.* Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.

Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada hubungan atas, bawah, kuat, lemah. Oleh karena itu, kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

b. *Linier Union of Partnership*

Linier Union of Partnership atau kemitraan dengan penggabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran atau volume usaha atau organisasi status atau legalitas. Kemitraan dengan melalui kerjasama Linier selanjutnya disebut dengan membedakan atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya.

Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linier, yaitu berbeda dalam satu garis lurus dan tidak saling subordinasi.

c. *Linier Collaborative*

Linier Collaborative atau kemitraan melalui kerjasama linier dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu sama lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linier, yaitu berada pada garis lurus tidak saling tersubordinasi.

3. Ciri-ciri dan Syarat Terjadinya Kemitraan

Jika dilihat dari makna kata kemitraan maka dapat diasumsikan bahwa kemitraan dapat terjadi jika ada beberapa aktor didalamnya yang memiliki tujuan yang sama. Seperti telah dijelaskan diatas mengenai beberapa ciri dari terjadinya kemitraan. Hal ini diperjelas dengan pendapat Sulistiyani (2004:129) bahwa diperlukan beberapa ciri dan syarat dalam sebuah kemitraan, sebagai berikut penjelasannya:

a. Ada dua pihak atau lebih

   Dalam sebuah kemitraan diperlukan dua pihak atau lebih agar kmitraan dapat terjadi. Hal ini dikarenakan kemitraan memunculkan kesepakatan, kesepahaman, dan keselarasan satu tujuan antara pihak-pihak yang terkait.

b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan

   Seperti yang telah dijabarkan pada *point* diatas maka ketika terdapat dua pihak atau lebih tentunya akan menghasilkan kesamaan visi dalam mencapai tujuan dalam program kemitraan. Kesamaan visi dalam mencapai tujuan kemitraan sangatlah penting posisinya karena jika tidak ada kesamaan visi maka kemitraan tidak akan terjadi.

c. Adanya kesepakatan

   Kesepakatan tentunya sebagai syarat dalam sebuah kemitraan, karena kesepakatan menandakan adanya perjanjian, hak, dan kewajiban serta batasan-batasan antara pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan sehingaa

menghasilkan sinergitas untuk mencapai tujuan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

d. Saling membutuhkan

Saling membutuhkan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuh kemitraan, karena saling membutuhkan akan memberikan dampak saling keterkaitan.

Dari adanya syarat dan ciri-ciri dalam terjadinya kemitraan, diharapkan dapat memberikan manfaat bersama, saling menguntungkan antara pihak yang bermitra. Hal utama dalam kemitraan adalah kerjasama, namun kerjasama saja tidak cukup mendukung kemitraan jika dalam salah satu pihak tidak saling percaya, karena saling percaya akan memberikan dampak berupa hasil tujuan yang ingin dicapai bersama dalam bermitra. Untuk itulah diperlukan sebuah peran dan hubungan masing-masing pihak yang bermitra. Hal ini disebabkan karena kemitraan merupakan bentuk kegiatan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu hubungan mitra yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dengan asas saling percaya, keterbukaan dan saling membantu serta tidak ada intervensi dari satu pihak. Program kemitraan merupakan sebuah wadah bagi pihak-pihak yang bermitra untuk melaksanakan kemitraan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari kegiatan kemitraan inilah muncul sebuah konsep bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas, dan infrastruktur. Bentuk konsep kemitraan ini disebut dengan *Public Private Partnership (PPP).*

4. Pengertian *Public-Private Partnership*

Dalam *public-private partnership*, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian dari kata *public* dan *private* itu sendiri. Ada beberapa pengertian tentang publik yang diketahui secara luas, diantaranya menurut Islamy (1994: 10) definisi *public* adalah:

> "Pengertian *public* secara tradisional tidak lagi diartikan semata-mata bersifat kelembagaan (contohnya negara), akan tetapi lebih jauh dari itu dalam hubungan dengan seberapa besar pengaruh atau kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan *public* (pelayanan pada masyarakat)".

Hal ini berarti bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, pemerintah, instansi-instansi pemerintah ataupun organisasi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya melalui pemberian kemudahan-kemudahan pada masyarakat tanpa membedakan satu sama lain.

Makna dari *partnership* (kerjasama) ialah:

> Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua buah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya dan dari tindakan tersebut akan diperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai suatu nilai lebih yang diperoleh oleh masing-masing pihak jika dibandingkan dengan melakukan tindakan tersebut secara individu (Irawan, 2004:20).

Disamping tentang pengertian dari *public* dan *partnership* yang telah dijabarkan diatas, berikut adalah pengertian dari *private* (swasta).

> Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan dalam proses kegiatannya dilakukan melalui mekanisme tertentu yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga dapat diminimalisir biaya produksi yang dikeluarkan (Irawan, 2004: 20).

Dari uraian diatas maka secara umum konsep *public-private partnership* ini dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik

(federal, lembaga negara) dengan pihak kedua (perusahaan swasta) yang bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh kemampuan dan aset dari masing-masing pihak (publik da swasta) dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum.

Konsep *Public-Private Partnership (PPP)* merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas, dan infrastruktur. Karakteristik dari PPP adalah kemitraan yang didalamnya terdapat *sharing* antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab, dan *reward.* Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya berariasi antara proyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi *public* dan *private sector* saja. Menurut UNDP pelaku PPP dapat dikembangkan menjadi tiga unsur yaitu (Rahutami, 2001: 3):

1. Negara, berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.
2. Swasta, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
3. Masyarakat, mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik.

Konsep ini juga dikenal sebagai *triangle synergi* antara *government, business,* dan *communities.* Penggunaan PPP dalam pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semudah konsepnya. Hal yang harus diingat adalah bahwa PPP sebenarnya bukan merupakan solusi *instant* dalam men-*deliver* seluruh jasa. Secara historis sinergi antara publik dan private sektor bukan hal yang mudah, karena adanya perbedaan "nilai" diantara keduanya. Konsep "*empowerment* dan *customer focus"*

di swasta sulit diserap oleh sektor publik dan sebaliknya kepentingan swasta terhadap profit tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Penerapan PPP harus memperhitungkan *cost-benefit* yang muncul.

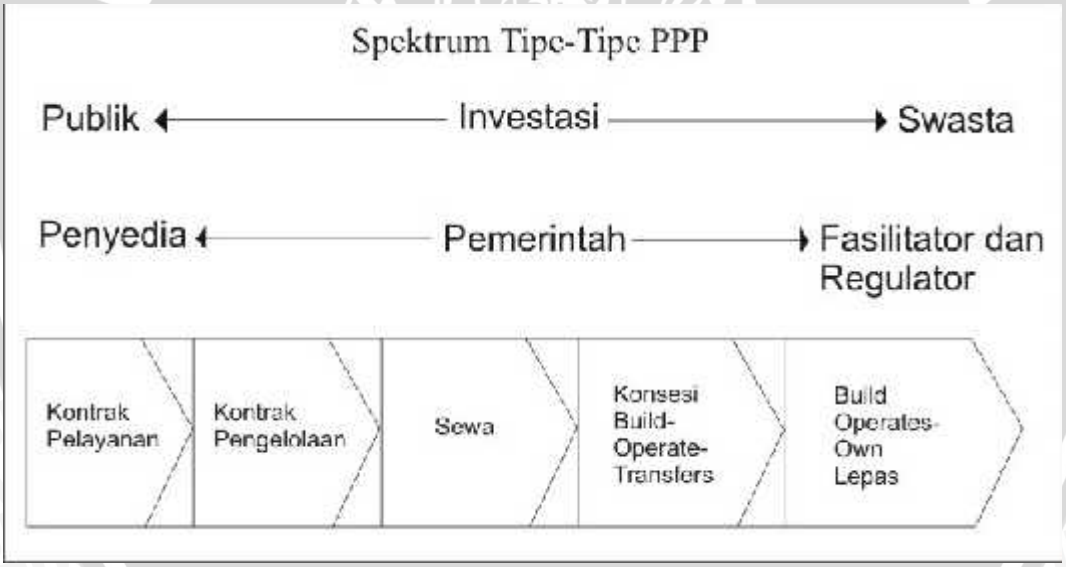
Penggunaan PPP akan memberikan keuntungan berupa penghematan biaya, pembagian resiko, peningkatan pendapatan, implementasi yang lebih efisien dan adanya keuntungan ekonomis. Sedangkan resiko yang muncul adalah hilangnya kontrol dari pemerintah daerah, naiknya biaya, resiko politis, akuntabilitas yang buruk, pengurangan kualitas atau efisiensi layanan, bias dalam proses seleksi dan masalah tenaga kerja. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan konsep PPP tidaklah mudah, bagaimanapun juga otonomi daerah dan globalisasi haruslah dihadapi. Untuk itu penerapan PPP yang dibarengi dengan konsep *core-complete* diharapkan dapat mereduksi resiko yang ada dan adanya perbedaan nilai yang muncul antara pihak pemerintah dan swasta.

5. Macam-macam *Public-Private Partnership*

PPP merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PPP bercirikan adanya pembagian investasi, resiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya. Alasan yang melatarbelakangi lahirnya kemitraan tersebut umumnya berkaitan dengan pembiayaan, perancangan, kontruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur. Dengan adanya kemitraan, maka kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah maupun sektor swasta dapat dipadukan. Peran dan

pertanggungjawaban dari kemitraan bisa beragam, bisa jadi peran pemerintah lebih banyak atau sebaliknya, peran swastalah yang lebih banyak dalam suatu bentuk kemitraan. Namun, peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Terdapat sejumlah tipe PPP yang didasarkan pada derajat resiko yang ditanggung kedua belah pihak yaitu jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian, serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP.



Gambar 2.2 Tipe-tipe *Public Private Partnership*

Sumber : Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004.

Gambar menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model PPP yang diklasifikasikan berdasarkan spektrum investasi dan peran pemerintah. Bentuk kontrak pelayanan (*service contract)* merupakan bentuk PPP yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan

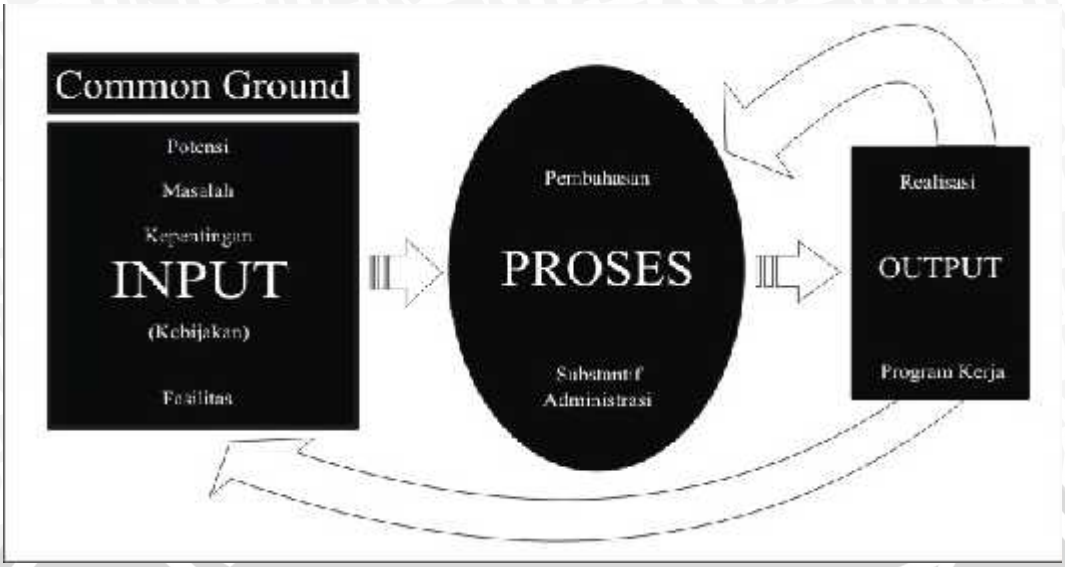
jasa layanan. Sebaliknya, model *Build Operates-Own* secara lepas merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Langkah awal penerapan PPP adalah pembenahan pada tiga komponen pembangunan yaitu *government, business*, dan *communities.* Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembentukan budaya dan perilaku aparat pemerintahan, swasta, dan masyarakat menjadi dasar dari proses berikutnya. Untuk itu perlu dilakukan klarifikasi fungsi dan peran masing-masing komponen pembangunan sesuai dengan kemampuan dan dinamika yang dimilikinya (Ramadansyah, 2001:Rahutami, 2001: 8-9). Fungsi dan peran yang dibentuk adalah:

1. Pemerintah sebagian pemampu *(enabler)* diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh kedua komponen lainnya. Pemerintah bertindak sebagai pengatur *(steering)* arah pembangunan, menetapkan kebijakan, menentukan sistem birokrasi, prosedur dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh kedua komponen. Perubahan peran organisasional ini membutuhkan perbaikan manajerial disektor publik yang berorientasi pada pengembangan budaya organisasi yang tidak terlalu birokratis. Budaya yang harus dikembangkan berangkat dari nilai-nilai birokrasi tradisional ke kemampuan mengadopsi perubahan, fleksibilitas, kewirausahaan, orientasi terhadap hasil, efisiensi dan produktivitas (Parker dan Bardley, 2000).

2. Sektor swasta akan berperan sebagai roda ekonomi. Peran ini akan berjalan dengan baik bila lingkungan dan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah bersifat kondusif sehingga memberi keleluasaan sektor swasta untuk bergerak secara ekonomis. Kondisi ini akan menciptakan sautu mekanisme pasar yang bersih sehingga akan memacu pertumbuhan sektor lain.
3. Sedangkan peran masyarakat yang selama ini bergerak sebagai objek pembangunan harus diubah menjadi subjek pembangunan melalui pemberdayaan *(empowernment)* masyarakat mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memilik jiwa kewirausahaan.

Hal ini mempertegas diperlukan perencanaan yang matang oleh pemerintah sebagai landasan dalam memulai PPP. Kemitraan tersebut tidak otomatis memberikan hasil yang diharapkan, sehingga perlu ada strategi yang jelas untuk mengantisipasi kendala dan resiko yang mungkin muncul. Sebagai suatu proses, PPP merupakan siklus yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan *(input)* hingga ke tahap implementasi dan monev *(output)* yang menghasilkan masukan balik untuk memperbaiki *input.*



Gambar 2.3 Siklus Kegiatan Kemitraan

Sumber: Purwoko, 2006.

Pada tahap *input,* PPP diawali oleh kegiatan identifikasi kebutuhan yang mencakup pemetaan potensi, masalah, kepentingan, dan fasilitas pelayanan publik yang akan dikelola melalui PPP. Hasilnya yang berupa kebijakan akan melandasi proses realisasi PPP secara substantif maupun administratif. Dimensi substantif antara lain mencakup kriteria dan metode untuk memilih mitra swasta, jenis pelayanan yang akan dikelola, penentuan kriteria evaluasi, dan metode pelibatan publik untuk menjamin akuntabilitas proses. Sementara dimensi administratif mencakup prosedur dan mekanisme yang ditempuh dalam merealisasikan perjanjian kemitraan tersebut. Kinerja kemitraan ini akan terlihat pada tahapan *output* yang secara konkret tampak dari realisasi program kerja dan hasil monev sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja pelayanan dimasa mendatang.

Bila PPP ini diterapkan, setidaknya terdapat tujuh kemungkinan pola interaksi kemitraan, *pertama,* seratus persen pengaturan, kontrol dan evaluasi

dilakukan pemerintah secara otonom dan mandiri. *Kedua*, ada interaksi antara sektor publik dan sektor swasta. Interaksi ini terjadi pada derajat yang berbeda, bisa 99% publik dan 1% swasta atau sebaliknya 1% publik dan 99% swasta. Ada elemen-elemen yang *contracting out* atau pembagian tugas. *Ketiga*, dimungkinkan 100% peran sektor swasta, dengan tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah, artinya penyediaan pelayanan sepenuhnya dikelola swasta, dengan tidak ada ketelibatan pemerintah baik pada regulasi maupun penyediaan fasilitas. *Keempat*, ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pegawai fasilitas pelayanan, misalnya merupakan kombinasi antara tenaga profesional pemerintah dan sukarelawan masyarakat. Kelima, urusan pelayanan publik 100% menjadi urusan masyarakat. Tidak ada organisasi pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, dan penanganan masalah tersebut. *Keenam*, kombinasi antara organisasi swasta yang berorientasi pada profit dengan LSM yang non profit. Lembaga penyedia pelayanan mungkin ditangani swasta, tetapi dikombinasikan dengan tenaga profesional dan warga masyarakat. Yang terakhir merupakan kombinasi dari tiga pilar *governance*, yakni pemerintah (publik), swasta, dan masyarakat. Kombinasi tersebut sama dengan interaksi antara *public-private* tetapi dengan tambahan tenaga sukarelawan dari masyarakat.

Langkah kedua adalah pengembangan daerah yang berdasarkan pada potensi masing-masing daerah dengan memperhatikan heterogenitas SDA, kualitas SDM, dan struktur industri. Pada langkah kedua ini sinergi antara tiga komponen pembangunan diarahkan untuk melakukan pembangunan yang berbasis kompetensi. Pada tahap ini pemerintah-swasta harus dapat melihat atau

mengidentifikasi potensi daerahnya. Pemerintah akan memberikan arah pembangunan yang jelas, menyediakan infrastruktur yang memadai. Sedangkan swasta-masyarakat akan bertindak sebagai penggerak perekonomian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah:

1. Dilakukannya perbaikan kualitas SDM, melalui penyediaan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan berkompetensi, maka pemerintah perlu melakukan peran sebagai penyedia layanan publik khususny fasilitas pendidikan. Upaya penyediaan pendidikan ini dapat pula dilakukan kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah juga perlu dilakukan kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan misalnya melalui program wajib belajar yang diperluas.
2. Untuk daerah yang kaya akan SDA, hal yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan potensi SDA haruslah mampu menciptakan *value added.* Adanya industri yang memanfaatkan potensi SDA daerah itu sendiri akan menciptakan *multiplier effect* bagi kesejahteraan dan bagi penggalian PAD.
3. Untuk daerah yang tidak memiliki potensi SDA maka pengembangan ekonomi dapat diarahkan ke sektor perdagangan, jasa dan industri. Basis kompetensi masih digunakan dalam proses ini, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan, jenis industri yang dikembangkan tetaplah terdeferensiasi dari daerah lain karena perbedaan potensi daerah yang ada.

4. Pemanfaatan SDA, pengembangan perdagangan, jasa dan industri perlu memperhatikan unsur keterkaitan ke depan dan belakang antar sektor. Peran pemerintahlah untuk menyiapkan kebijakan yang mendukung keterkaitan tersebut, sedangkan swasta akan berperan untuk melakukan sinergi antara perusahaan maupun antar industri agar tercipta struktur ekonomi yang kokoh (Rahutami, 2001: 9).

Dengan melakukan ini langkah kedua tersebut, maka pengembangan daerah yang berbasis kompetensi melalui konsep PPP diharapkan akan mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi serta kemampuan berkompetisi pada masing-masing kabupaten atau kota. Dengan kemandirian ekonomi dan kemampuan berkompetisi tersebut, maka dengan sendirinya sumber penerimaan daerah (PAD) akan menjadi lebih luas sehingga akan mudah dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam penggalian sumber penerimaan daerah.

Dalam buku *Public-Private Partnership for Sustainable Development* (2002: 26), yang dikutip oleh Irawan (2004:21) dijelaskan bahwa bentuk kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai macam model, dimana model-model dari *Public-Private Partnership* (PPP) sebagai berikut:

a. Built/Operate/Transfer (BOT)

Dalam model ini swasta diperbolehkan untuk membangun fasilitas pelayanan publik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak publik, fasilitas yang telah dibangun tersebut kemudian dioperasikan oleh pihak swasta dalam periode waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang

telah disepakati bersama, setelah periode waktu berakhir maka kepemilikan fasilitas tersebut dialihkan dari pihak swasta kepada pihak publik. Hampir pada setiap bentuk kerjasama model ini, pihak swasta juga menyediakan dananya baik secara sebagian atau keseluruhan dalam rangka membangun fasilitas yang dimaksud, maka dalam menentukan periode waktu yang diberikan pada pihak swasta untuk memperoleh keuntungan atau investasi yang telah dikeluarkan, tentunya hal ini juga mempertimbangkan pemberlakuan tarif yang wajar atas pelayanan yang dihasilkan.

Setelah berakhirnya batas waktu perjanjian maka tanggung jawab biaya pengoperasian dibebankan kepada pihak publik, atau pihak publik dapat menyewa kembali pengoperasian fasilitas tersebut kepada pihak swasta lainnya melalui perjanjian baru yang saling menguntungkan kedua pihak.

b. *Build-Own-operate (BOO)*

Model kerjasama ini memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada sektor publik tanpa harus mengalihkan kepemilikan fasilitas tersebut kepada pihak publik. Dan tidak ada keharusan pada pihak publik untuk membeli atau mengambil alih kepemilikan atas fasilitas tersebut kecuali pihak publik akan memperoleh sumber pendapatan baru atas pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas tersebut, disisi lain pihak publik juga telah menunaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

c. *Operation Maintenance and/or Management Contract Services*

Model kerjasama ini dilakukan dengan cara pembuatan kontrak kerja antara pihak publik dengan pihak swasta untuk menyediakan, menyelenggarakan dan atau mengatur fasilitas dari pelayanan publik tertentu tetap dipegang oleh pihak publik akan tetapi pihak swasta juga diperbolehkan untuk menanamkan modalnya pada fasilitas tersebut. Jika hal tersebut dilakukan maka investasi yang ada akan diperhitungkan secara teliti berdasarkan kontribusi atau efisiensi operasional atau peningkatan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat. Biasanya semakin panjang batas waktu perjanjian kerja maka akan semakin besar pula kemungkinannya bagi pihak swasta untuk mendominasi prosentase investasi atas fasilitas tersebut, untuk itu perlu diberikan suatu pembatasan yang jelas akan hal ini.

d. *Design-Build-Operate*

Pelaksanaan model kerja sama ini dilakukan dengan pemberian kesempatan bagi pihak swasta untuk mendesain, membangun dan mengoperasikan suatu unit baru pada suatu fasilitas pelayanan umum yang telah ada, hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan agar mampu memenuhi harapan yang berkembang secara dinamis di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan akibat keterbatasan yang ada pada pihak publik, baik itu keterbatasan akan dana maupun ketidak mampuan manajemen dan teknologi. Pilihan ini dilakukan untuk mempercepat proses pemenuhan akan kebutuhan pelayanan umum tersebut kepada masyarakat,

agar masyarakat dapat sesegera mungkin menikmatinya. Kepemilikan fasilitas ini tetap dipegang oleh pihak publik, akan tetapi pengoperasian dan pembangunan serta pengembangan fasilitas dipegang sepenuhnya oleh pihak swasta dengan memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada pihak publik sehingga pihak publik mampu mengambil alih dengan cara mengembalikan investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

e. *Developer Finance*

Model kerjasama ini dilakukan melalui pembangunan atau pengembangan fasilitas umum yang telah ada, dimana biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan atau pengembangan ini dibebankan pada pihak, sebagai timbal baliknya pihak swasta diberikan kewenangan untuk membangun kompleks pemukiman, perdagangan dan fasilitas pendukung disekitar lahan tersebut. Pihak swasta tersebut memberikan kontribusi melalui penanaman modal dan diberikan kewenangan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dibawah kontrol dan pengawasan dari pemerintah, dengan kegiatan tersebut maka pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dari pengembangan kawasan yang dilakukannya atas pembelian dan penyewaan fasilitas pendukung yang mereka bangun. Dari hasil pemasukan yang diperoleh melalui pembagian keuntungan dari pihak swasta tersebut, hasilnya dapat digunakan untuk perluasan pembangunan fasilitas pelayanan yang telah ada.

f. *Leace/Develop/Operate (LDO) or Build/Develop/Operate (BDO)*

Melalui perjanjian model kerjasama ini, pihak swasta diperbolehkan untuk menyewa atau membeli fasilitas pelayanan umum yang dimiliki oleh pihak publik, kemudian menginvestasikan modal baru kepada fasilitas tersebut untuk merenovasi, memodernisasi, mengembangkan dan mengoperasikannya berdasarkan kontrak perjanjian dengan pihak publik. Model ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dengan melakukan kebijakan pembatasan pemungutan tarif secara pantas.

g. *Leace/Purcase*

Melalui model perjanjian kerjasama ini pihak swasta berperan dalam membiayai pembangunan fasilitas umum baru bagi masyarakat, fasilitas baru yang telah dibangun tapi kemudian disewakan kepada pihak publik untuk dipergunakan. Dari kerjasama tersebut kemudian pihak publik dengan pihak swasta melakukan negosiasi dan membuat jadwal pembayaran sewa atas penggunaan fasilitas tersebut dalam jangka waktu tertentu dianggap tidak memberatkan kedua belah pihak. Pihak publik berkewajiban untuk selalu memenuhi jadwal pembayaran tersebut secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang ada, hingga pada akhir waktu periode yang telah disepakati maka pihak swasta harus menjual atau memberikan kepemilikan atas fasilitas tersebut kepada pihak publik. Selama periode pembayaran tersebut maka operasional fasilitas umum tersebut dapat dilakukan baik oleh pihak swasta.

h. Conventional Workshop

Model kerjasama ini adlah suatu model kerjasama yang umu dilakukan oleh hampir seluruh perusahaan-perusahaan dunia, baik antara pihak swasta dengan pihak swasta, pihak negeri dengan pihak negeri ataupun pihak swasta dengan pihak negeri. Lazimnya kerjasama ini dilakukan dengan menanggung biaya dan reiko kerugian secara bersama-sama, atau dalam proses produksi yang bersifat kontinum yang dipecah menjadi beberapa bagian, sebagai contoh pihak A melakukan proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan baku, kemudian selanjutnya ditangani oleh pihak B untuk mengolah dari bahan baku menjadi bahan produk, lalu pihak C melakukan proses ditribusi dan pemasaran atau sebaliknya, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak A, B, dan C dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan sebuah proses (Irawan, 2004: 21-26).

Berdasarkan bentuk kemitraan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPP ini terutama memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, disisi lain peran yang dimiliki pihak swasta dalam pendanaan atau investasi fasilitas pelayanan tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab dari pemerintah untuk merumuskan regulasi yang menjamin standar pelayanan dan biaya yang tetap terjangkau bagi semua masyarakat pengguna jasa. Pemerintah akan menetapkan aturan dasar untuk menentukan model PPP mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontrol pemerintah memang berkurang dalam sejumlah tipe PPP, tetapi sebenarnya pemerintah tetap berperan penting

dalam menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Maka dari itu, karena tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada di tangan pemerintah.

Dari penjelasan diatas yang telah disebutkan secara terperinci, kita telah mengetahui apa dan bagaimana konsep model dari *Public-Private Partnership* itu. Selanjutnya peneliti akan mencoba memaparkan bagaimana bentuk kerja sama ini dapat dilakukan secara optimal atau dengan kata lain yang akan dipaparkan disini adalah faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan kerjasama.

D. Pajak Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada sistem desentralisasi. Wujud dari desentralisasi ini adalah diberikannya otonomi otonomi kepala daerah atau kata lainnya adalah daerah otonom. Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain daerah yang melaksanakan otonomi daerah yang disebut sebagai daerah otonom.

Membahas tentang otonomi daerah memang tidak terlepas dari konsep desentralisasi. Hal yang paling penting dari adanya kebijakan otonomi daerah adalah diberlakukannya asas desentralisasi. Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang yang sama, Mamun dalam Kaho (1997:11) menyatakan bahwa:

> "Melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan lebih demokratis. Hal ni disebabkan karena dalam Negara yang menganut peraturan demokratis, seharusnya diberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat *(government of the people, by the people, an for the people)."*

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah didaerah sebagai daerah otonom yang wajib untuk dipertanggungjawabkan dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpartisipasi.

Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah ini termasuk dalam hal penyerahan wewenang dibidang keuangan daerah. Daerah juga diberikan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat untuk mengelola urusan keuangannya sendiri. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam menglokasikan sumber-sumber ekonomi, memeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas politik. Peranan keuangan daerah ini penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan kedaeah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah. Maka dari itu, keuangan daerah yang makin meningkat akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah, Riwu (2001:61) menyatakan bahwa:

> "Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku."

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yani, 2002: 229).

Sehubungan dengan ini keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *"self supporting"* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain. Faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Kaho, 1997:123).

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah adalah semua yang dapat di jadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah, dan masuk dalam kas daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Lebih lanjut Kaho (1997:252) menyatakan bahwa:

> "Sumber-sumber keuangan daerah dapat ditempatkan kedalam dua kelompok urutan yaitu sumber PAD dan sumber pendapatan non Asli Daerah (Non PAD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber keuangan utama guna membiayai aktifitas daerah banyak dari PAD, paling tidak pembayaran rutinnya ditutup oleh sumber PAD. Sumber-sumber PAD merupakan sumber utama daerah. Hasil daerah dan hasil usaha lainnya yang sah."

Sumber-sumber keuangan daerah PAD ini kuantitasnya sangat bervariasi pada masing-masing daerah, karena tergantung pada potensi, situasi, dan kondisi dari suatu daerah. Penyerahan utusan kepada daerah untuk menjadi utusan rumah tangga daerah disesuaikan dengan kemampuan dari suatu daerah.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan daerah yang bersumber dari:
    a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meliputi:
        1. Pajak daerah
        2. Retribusi daerah
        3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
        4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
    b. Dana Perimbangan; yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan teridiri atas:

1. Dana bagi hasil
2. Dana aloksi umum
3. Dana alokasi khusus

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; terdiri atas:

1. Pendapatan hibah
2. Pendapatan dana darurat

2. Pembiayaan yang bersumber dari:

a. Sisa perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah; yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah ini bersumber dari:

1. Pemerintah
2. Pemerintah daerah lain
3. Lembaga keuangan bank
4. Lembaga keuangan bukan bank
5. Masyarakat

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, salah satunya yang paling nyata adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelancaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh Daerah Otonom baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan menggali kekayaan daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi belanja daerah serta untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak daerah yang merupakan prospek yang baik untuk dikembangkan secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak dan menegaskan bahwa sumber-sumber pembiayaan daerah selain dari pemerintah juga bersumber dari daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dinas Pendapatan didukung oleh pemerintah yang menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan dan pemotong pajak tertentu, sehingga pajak dapat pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang hendak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian pajak daerah menurut Dinas Pendapatan Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-undang Nomor 65 Tahun 2001 pasal 1).

Pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat segingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengn pajak nasional.

Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajk sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

a. Pajak Provinsi
    1. Pajak kendaraan bermotor
    2. Bea balik nama kendaraan bermotor
    3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    4. Pajak air permukaan
    5. Pajak rokok
b. Pajak Kabupaten/Kota
    1. Pajak hotel
    2. Pajak restoran
    3. Pajak hiburan
    4. Pajak reklame
    5. Pajak penerangan jalan
    6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
    7. Pajak parkir
    8. Pajak air tanah
    9. Pajak sarang burung walet
    10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
    11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan penggunaan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud, meliputi seluruh pembangkit listrik. Dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud tersebut kecuali:

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.

Kemudian untuk subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

2. Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksudkan tersebut, ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Selanjutnya dalam penetapan tarif Pajak Penerangan Jalan ialah sebagai berikut:

a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk :
   1) Rumah Tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
   2) Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
   3) Sosial sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
   4) Pemerintah sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
   5) Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan tersebut, dengan Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan. Dengan demikian, hasil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu metode yang akan dipergunakan. Metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan mengenai suatu hal (sasaran atau kajian), baik yang sudah lalu, sekarang, maupun yang akan datang, serta yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Sedangkan metodologi penelitian adalah hasil pengkajian terhadap berbagai metode yang digunakan menjadi suatu bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat atau sesuatu yang sedang terjadi dan berlangsung pada penelitian yang dilakukan. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah karena metode deskriptif secara prinsip tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena.

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan

pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2002:6) bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif, yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1992:1-2) menyatakan bahwa:

> "Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan lagi data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk mendukung kita memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah kebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal".

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, msalah-masalah sosial dan tindakan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi (Satori dan Komariah, 2014:25).

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif tersebut, maka yang akan dilakukan penulis adalah menggambarkan keadaan organisasi atau lembaga dengan apa adanya, mengungkapkan fakta berdasarkan apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan dengan melihat, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan

dan membahas masalah yang sedang diteliti. Sesuai yang diungkapkan oleh Moleong (2000:62) bahwa "penetapan fokus dapat membatasi studi".

Faisal (1995:41) menyatakan bahwa, "fokus adalah penelitian awal yang dipilih untuk meneliti dan bagaiman memfokuskannya". Maka fokus penelitian adalah merupakan pusat kajian yang menjadi pokok perhatian dari peneliti untuk mendapatkan suatu data yang akurat guna memudahkan dalam penganalisaan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh peneliti maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkaitan langsung dengan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang, meliputi:
    a. Proses kemitraan dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang.
    b. Peranan aktor kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang, diantaranya:
        1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang
        2. Peranan mitra atau PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang
        3. Peranan masyarakat
    c. Pengembangan *Public Private Partnership* dalam sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

2) Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kemitraan dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

a. Faktor-faktor penghambat

1. Terjadinya kurang bayar
2. Kesadaran masyarakat yang kurang mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi (liar)
3. Kurang konsistensi masing-masing pihak melaksanakan tugas
4. Tidak bisa daling intervensi atau campur tangan

b. Faktor-faktor pendukung

1. Partisipasi masyarakat
2. Kemudahan dalam pembayaran
3. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selalu mempunyai target
4. Adanya saling percaya dalam kerjasama
5. Potensi di daerah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Situs penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang akan diteliti berlangsung. Dengan menetapkan situs penelitian yang tepat, maka peneliti akan mudah mendapatkan dan memahami fenomena yang berkembang sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Malang. Kemudian, adapun yang menjadi situs penelitian, yakni di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di Jalan Mayjen Sungkono atau di lingkungan *Block Office* dan PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang di Jalan Basuki Rahmad No. 100 Malang. Alasan pemilihan lokasi dan situs penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi di Kota Malang, sebab Kota Malang merupakan kota terbesar kedua dari segi pendapatan pajak. Dimana jika dilihat dari segi regional, Kota Malang mempunyai peran yang strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Keuangan daerah dan dapat menjadi pedoman untuk daerah lain yang ada di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (PAD) juga mampu membiayai hampir sebagian APBD Kota Malang.
2. Situs penelitian yang dilakukan adalah di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang dapat menjadi institusi yang representatif didalam penelitian ini. Selain itu mengingat bahwa judul yang diangkat adalah sebuah bentuk kemitraan atau kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Malang, maka perusahaan ini menjadi bagian yang penting juga dalam lokasi penelitian. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian di kedua institusi tersebut dan mampu membandingkan kedua persepsi dari kedua tempat tersebut agar mendapatkan data yang valid dan cukup kompleks. Serta dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kedua institusi tersebut.
3. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan institusi atau badan pemerintahan yang mewakili dan mengurusi dalam hal pelaksanaan keuangan daerah di lingkup Kota Malang dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan yang menjual jasa penggunaan daya

tenaga listrik dan merupakan pelaksana pemungut Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana ditemukan data dan informasi-informasi penting yang dapat menunjang penelitian atau subyek darimana data diperoleh. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2000:112) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, fenomena/peristiwa, orang. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneiliti secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data yang digunakan, yaitu:

Dinas Pendapatan Kota Malang:

a. Pak Tri Okky Rudianto sebagai Kepala Bidang Pembukuann dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
b. Pak Bambang Nurmawan sebagai Kepala Seksi Pembukan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
c. Pak Eko Prabudi sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
d. Pak Wicaksono sebagai Supervisor Pelayanan Pelanggan Kantor PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang.

e. Bu Arifin dan Bu Dewi sebagai perwakilan masyarakat di Jalan Danau Ranau 1, Kelurahan Sawojajar.

2. Data Sekunder

Surachmad (1989: 163) menyatakan bahwa "data sekunder adalah data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupsun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli".

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Berupa catatan-catatan resmi, dokumen, petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sedangkan batasan dari data sekunder tersebut adalah segala hal yang berkaitan dengan isi dan pembahasan yang akan diperlukan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis dalam peneliti adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN Area Malang tanggal 6 Juni 2014. Dari data sekunder tersebut digunakan peneliti untuk mendukung dan membuktikan dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber

data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2014:63).

Menurut Arikunto (1998:134) menyatakan bahwa, "metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data". Oleh karena itu untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

   Adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperoleh teknik dokumentasi dan melakukan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dimana peneliti langsung berhadapan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik yang berupa laporan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen tertulis dari pendapat-pendapat para ahli dari berbagai tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan rancangan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2014: 59).

Instrumen penelitian menurut Arikunto (1998: 134) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan yang dapat

diwujudkan dalam benda, misalnya angket, daftar cocok atau pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal tes (yang kadang-kadang hanya disebut tes uji saja) skala dan lain sebagainya."

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali.

Selanjutnya, menurut Nasution dalam suatu kegiatan penelitian metode kualitatif, manusia merupakan alat yang berperan sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah karenasegala sesuatu yang diperoleh tidaklah pasti, baik masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan tidak dapat ditentukan secara pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sehingga peneliti itu sendirilah sebagai alat satu-satunya untuk mencapainya (Sugiyono, 2014:60).

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhan yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2014:61) peneliti sebagai

instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.

7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Didalam mendukung proses pengumpulan data, pada penelitian ini mempergunakan beberapa instrumen (alat), antara lain:

1. Peneliti sendiri, dalam penelitian kualitatif, manusia sangat berperan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti itu sendiri yang menjadi instrumennya.
2. Pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan yang dibuat oleh peniliti untuk mendapatkan berbagai keterangan atau informasi mengenai obyek yang diteliti para responden.
3. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat berbagai data yang diperoleh dilokasi penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian

yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian, sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Pekerjaan menganalisis adalah suatu aktivitas yang tidak akan sama bentuk dan langkahnya antara satu orang dengan yang lainnya. Namun demikian, apabila merujuk pada arti analisis sebagai suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian, maka peneliti dapat memulai analisisnya dari fakta-fakta lapangan yang ditemukan yang disintesakan kedalam kategori yang ditetapkan dalam penelitian.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2014:88) menyatakan bahwa:

> Analisis data adalah suatu kegiatan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain".

Sedangkan Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014:89) mengemukakan bahwa:

> "Analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola".

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

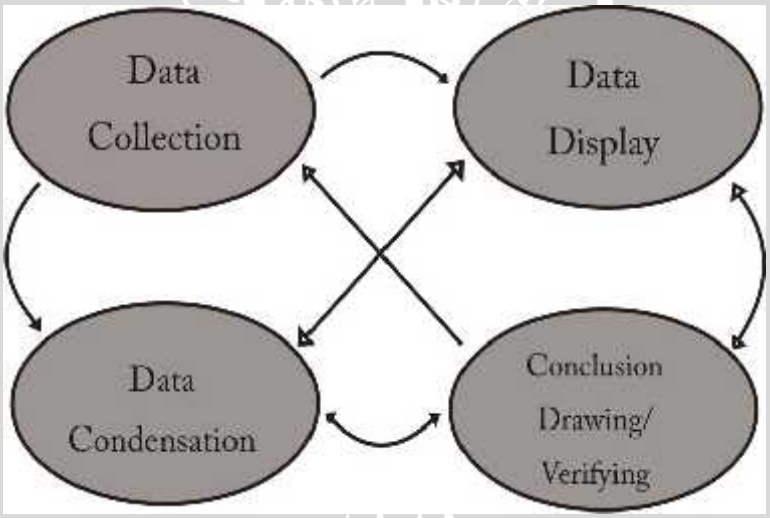
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 91), mengemukaan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Moleong (2000: 190) langkah-langkah atau proses analisis data secara umum dapat digunakan sebagai berikut:

> "Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi resmi, gambar, foto-foto

dan sebagainya. Data tersebut tidak sedikit kira-kira segudang. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis ini adalah pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu".

Selanjutnya menurut Miles and Huberman (dalam Sadana, 2014:92) terdapat model interaktif *(interactive model)* dalam analisa data kualitatif, komponennya yakni sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data *(interactive model)*

Sumber: Sadana, 2014:92.

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data mengacu pada proses seleksi, pemusatan, penyederhanaan, penjabaran dan atau mengubah data yang muncul pada bagan, salinan percakapan, dokumen dan bukti fisik lainnya. Melalui proses kondensi ini,

data yang di olah akan semakin kuat. Selain itu, kondensasi juga menghindari adanya reduksi data yang akan membuat data yang kita olah malah menjadi lemah atau hilang saat proses.

Kondensi data dapat digunakan untuk mengolah semua data kualitatif. Meskipun seluruh data belum benar-benar terkumpul, kondensi data terlebih dahulu bisa dilakukan tergantung kemauan peneliti akan mengolah konsep kerangka kerja,kasus, pertanyaan dan juga data yang muncul. Bila data sudah terkumpul, maka berikutnya ialah menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan tema, menggolongkan kategori serta menuliskan memo analitis. Proses kondensi data dilanjutkan setelah proses laporan akhir selesai.

Kondensi data tidak bisa dipisahkan dari proses analisis. Masih bagian dari analisis itu sendiri, Keputusan dari peneliti, bagian data yang mana yang akan dipakai dan mana yang tidak. Kategori mana saja yang paling baik untuk diolah, data mana yang paling bisa dikembangkan, kesemuanya adalah pilihan analitis. Kondensi data adalah bentuk analisis yang tajam, singkat dan terfokus serta mengolah data yang bisa menemukan gambaran akhirnya.

Dengan kondensi data kita tidak memerlukan metode kuantitatif. Data kualitatif bisa diolah dengan berbagai cara, yaitu proses seleksi, ringkasan atau parafrase, digolongkan secara umum. Tekadang akan sangat membantu bila data di kerucutkan menjadi mana yang paling penting, peneliti memilih mana yang paling efektif.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Langkah kedua dari proses analisi adalah data display. Secara umum,"display" atau "penyajian" dilakukan secara tersusun, memadatkan kumpulan informasi yang dapat memberikan gambaran kesimpulan dan langkah. Lewat "penyajian" dapat membantu kita memahami apa yang terjadi dan langkah apa yang diambil untuk menyelesaikannya, entah atau justru dianalisis lebih lanjut tergantung dari bagaimana kita memahaminya.

Dalam lingkup penelitian, kita diyakinkan bahwa penyajian yang baik adalah syarat penelitian kualitatif. Penyajian yang dibahas disini mencakup bentuk matriks, grafik, tabel, dan bagan. Kesemuanya didesain agar lebih efektif dan mudah diolah, sehingga peneliti bisa melihat langsung apa yang terjadi dan menggambarkan kesimpulan atau bahkan berlanjut ke langkah selanjutnya dari proses analisis.

Sama halnya dengan kondensasi data, penyajian data tidak bisa dipisah dari proses analisis dan masih bagian dari analisis. Merencanakan penyajian, menentukan jumlah baris dan kolom matriks data kualitatif dan memilih data mana yang akan dimasukkan kekolom. Sebagai catatan pula, mendesain penyajian data haruslah menyelesaikan menyusun kondensasi data. Disini, penyajiannya lebih sistematis, efektif, dan intinya kita harus tahu dengan apa yang kita sajikan.

c. *Drawing and Verifying Conclusion*

Proses analisis yang ketiga adalah memproseskesimpulan. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif diartikan sebagai hal-hal yang mencatat pola, penjelasan, alur sebab-akibat, dan pernecanaan. Peneliti yang bekompeten tidaklah biasa menyimpulkan dengan terburu-buru, memelihara keterbukaan dan keragu-raguan, tetapi kesimpulan masih ada, ketidakpastian diawal yang kemudian semakin tegas dan pasti. Kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai tergantung dari seberapa rumit data dan juga batas akhirnya.

Kesimpulan dianggap pembuktian dari proses analisis. Pembuktian didapatkan sebagai ringkasan dari menggabungkan gagasan selama peneliti mengolah data. Artinya, data muncul setelah data dites keakuratannya dan kevalidannya. Sisi lain,kita tertarik akan apa yang terjadi, tanpa tahu kebenaran dan fungsinya.

Penjelaskan sebelumnya tentang ketiga tahap, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan seperti yang sudah dijabarkan, selama proses dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel dilakukan dan membentuk suatu analisis. Ketiga tahap ini bisa di terapkan seperti pada gambar 4, dalam penyajian ini tiga bentuk analisis dan proses pengumpulan data. Selama proses penelitian peneliti bisa menggunakan metode tiga tahapan kondensasi, penyajian dan kesimpulan.

Coding data,seperti contohnya kondensasi data, membawa kita ke sebuah ide baru dalam pengolahan data matriks (penyajian data). Memasukkan data

memerlukan kondensasi data lebih lanjut. Sesampainya data matriks terisi, kesimpulan awal bisa dilakukan tapi mereka juga mengarah ke sebuah hasil, seperti contoh menambah kolom untuk mencoba mengubah kesimpulan. Seperti yang sudah kita sajikan sebelumnya analisis kualitatif sangat perlu di artikan sebagai sebuah proses yg membantu kita memahami. Kita perlu memahami betul apa yang sedang kita kerjakan dansaatkita menganalisisnya sebisa mungkin kita berusaha menyesuaikan dgn metode yang kita pakai agar lebih mudah juga untuk dipahami oleh orang lain.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis, atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Kedudukan

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang.

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malanh menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang awalnya terletak di Jl. Kertanegara No.7, Malang. Sejak awal tahun 2010 kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini mengalami perpindahan secara administrasi dan kantor ke daerah *Block Office* yang terletak Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung B Lantai 1, Jl. Mayjen Sungkono, Kecamatan Buring. Malang. Jumlah

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini sebanyak 116 orang. Dalam pelaksanaan keorganisasian Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan hukum yang di pakai adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf ahli.
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi:

1. Kantor (Gedung)

   Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menempati lantai 1 Gedung B di Block Office yang ada di Kecamatan Buring. Rasio antara luas gedung dengan jumlah bidang dan jumlah PNS saat ini sudah memadai.

2. Sarana Kendaraan

   Sarana kendaraan terdiri dari roda empat sebanyak 5 buah dan roda dua sebanyak 23 buah. Keseluruhan kendaraan tersebut yang dimiliki Dispenda dalam keadaan baik.

3. Peralatan Elektronik

   Peralatan elektronik *(computer)* untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 27 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia ini dengan kondisi baik, namun ada beberapa unit komputer dengan software yang belum diperbarui dan memiliki kapasitas dan kemampuannya sudah ketinggalan. Sehingga ada beberapa urusan yang masih tidak terakomodasi karena butuh pemrosesan yang cepat.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Susunan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebanyak 183 orang, yang terdiri dari 116 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan 66 orang Outsourcing yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Status Kepegawaian/ Pangkat	Gol./Ruang	Ka. Dispenda	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan				
			Sekretariat	Bidang Pajak Daerah Lainnya	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan	Bidang Penagihan	Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi
1. Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	-	-
2. Pembina Tingkat I	(IV/b)		1	-	1	-	-
3. Pembina	(IV/a)		1	2	2	1	1
4. Penata Tingkat I	(III/d)		2	1	1	1	3
5. Penata	(III/c)		2	4	3	3	-
6. Penata Muda Tingkat I	(III/b)		3	11	5	3	4
7. Penata Muda	(III/a)		4	7	-	5	1
8. Pengatur Tingkat I	(II/d)		2	-	-	-	-
9. Pengatur	(II/c)		6	7	2	3	3

10. Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)		2	1	4	3	1
11. Pengatur Muda	(II/a)		2	2	-	1	-
12. Juru Tingkat I	(I/d)		-	1	-	-	-
13. Juru	(I/c)		-	-	-	1	-
14. Juru Muda Tingkat I	(I/b)		-	1	-	-	-
15. Juru Muda	(I/a)		-	-	-	-	-
Total		1	26	37	18	22	13

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Desember 2015

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang terdiri dari:

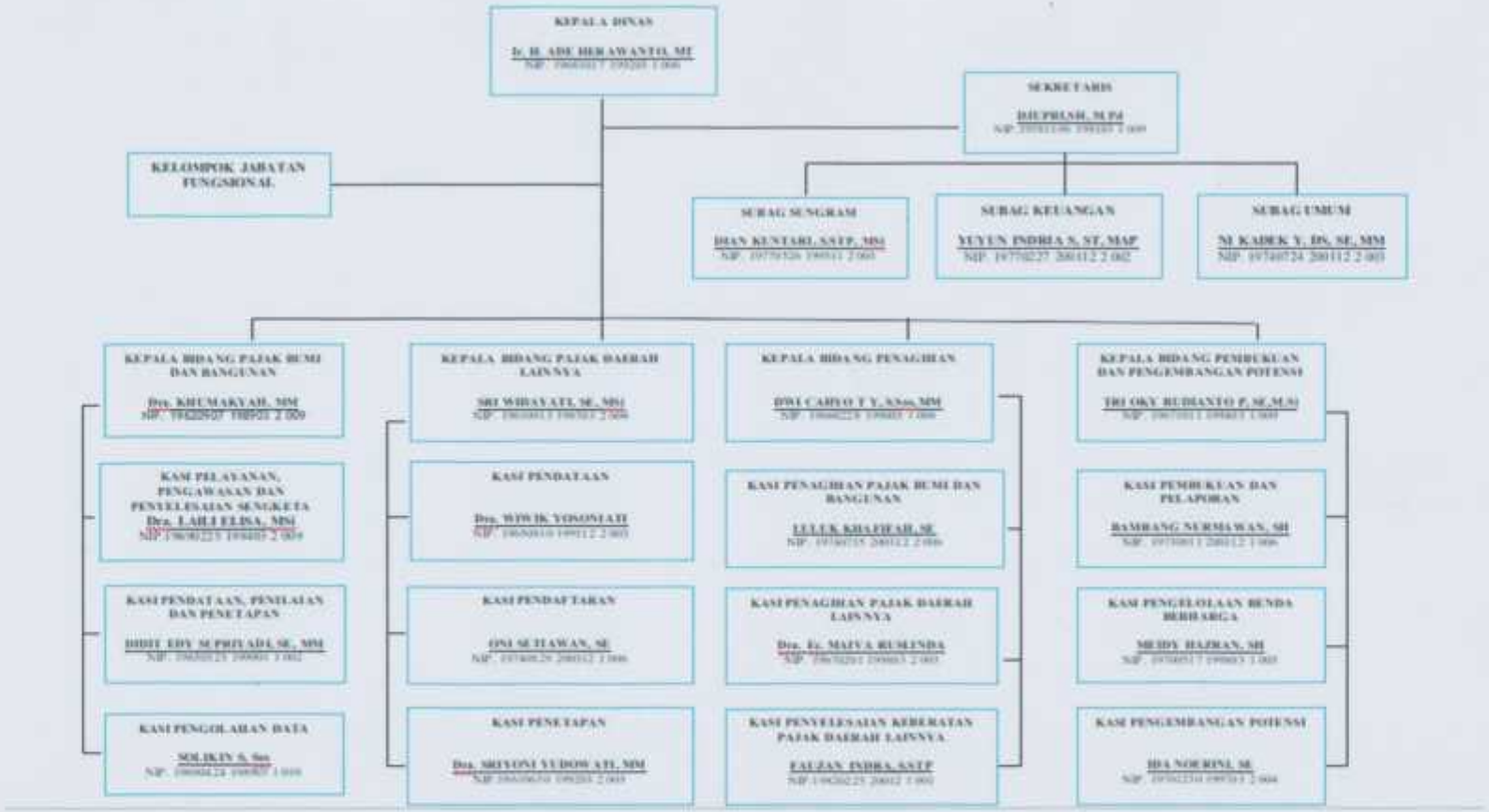
1. Kepala Dinas
2. Sektretaris, meliputi:
    a. Sub Bagian Penyusunan Program
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, meliputi:
    a. Kepala Seksi Pendataan
    b. Kepala Seksi Pendaftaran

c. Kepala Seksi Penetapan

4. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:
    a. Kepala Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa
    b. Kepala Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan
    c. Kepala Seksi Pengolahan Data
5. Kepala Bidang Penagihan, meliputi:
    a. Kepala Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
    b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya
    c. Kepala Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya
6. Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, meliputi:
    a. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan
    b. Kepala Seksi Pengelolaan Benda Berharga
    c. Kepala Seksi Pengembangan Potensi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 sebagai berikut:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
repository.ub.ac.id



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Desember 2015

93

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. TugasPokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

2. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB danPajak Daerah Lainnya;
4. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
5. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
6. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
7. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB danPajak Daerah Lainnya;
8. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

9. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB danPajak Daerah Lainnya.
10. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
11. Pembinaan dan pengendalian terhadap system pemungutan PBB Perkotaan danPajak Daerah Lainnya.
12. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
14. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
25. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
26. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

d. Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan

1. Visi

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

"Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat kota"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya, yaitu:

1. Meningkatkan

   Adalah suatu kegiatan atau aktivitas pelaksanaan tugas yang menunjukkan sesuatu yang lebih baik.

2. Pajak Daerah

   Adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Kesejahteraan

   Adalah kondisi yang baik dan makmur yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Malang dimana pendanaan untuk mewujudkan hal tersebut penyokong utamanya adalah dibiayai oleh penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah

4. Masyarakat Kota

   Adalah sebuah komunitas yang berinteraksi dan saling tergantung dengan lainnya pada daerah perkotaan.

   Visi diatas mengandung maksud untuk menciptakan suatu kinerja yang optimal pada masing-masing agar dapat memberikan pelayanan yang baikkepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Disamping itu melekat juga tujuan pembangunan Daerah Kota Malang yang melekat pada tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut:

"Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah"

Tugas dan fungsi utama Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan arahan misi yang diemban menjadi sangat strategis guna mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah.

3. Tujuan

Sejalan dengan misi yang diemban Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meingkatkan Penerimaan Pajak Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Prinsip Transparan dan Akuntabel

4. Sasaran

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Prinsip Transparan dan Akuntabel

2. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

a. Kedudukan

Dalam sejarah, Listrik mulai ada di wilayah indonesia pada akhir abad ke-19, zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Pembangunan kelistrikan di indonesia terjadi secara bertahap, yaitu Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893, di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903, di wilayah kota Surabaya tahun 1907 dan tahun-tahun berikutnya listrik dibangun di Palembang untuk kepentingan pertambangan minyak serta di Makassar dan Ambon untuk kepentingan Militer.

Setelah Perusahaan Listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di beberapa wilayah di Indonesia maka pendistribusian listrik oleh pemerintah Belanda dialihkan kepada Perusahaan Swasta Belanda antara lain, Perusahaan Listrik NV ANIEM, NV GEBEO, ELECTRA, SEM, OJEM, dan NV NIGM (NV OGEM). Perusahaan Listrik NV NIGM yang semula bergerak di bidang gas kemudian memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang maka Perusahaan listrik dan gas beserta personilnya diambil alih oleh Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan RI dilakukan penyerahan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian dengan penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan Listrik dan Gas Sumatra, Jawa, dan Madura dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga kemudian tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai hari Listrik Nasional dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI (Nomor 1134/43/MPE/1992).

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Listrik dan atau gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi" dimana semua perusahaan yang ada di wilayah Indonesia dinyatakan menjadi perusahaan-perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), antara lain Perusahaan Listrik "ANIEM", N.V.C.A kantor pusat di Surabaya.

Berdasarkan keputusan Menteri pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Nomor: Ment. 16/I/20 tanggal 20 mei 1961 diantaranya disebutkan di daerah-daerah, dibentuk daerah EXPLOITASI yang terdiri dari 10 daerah Exploitasi Listrik Umum (Pembangkit dan Distribusi) dimana untuk wilayah Jawa Timur adalah Exploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

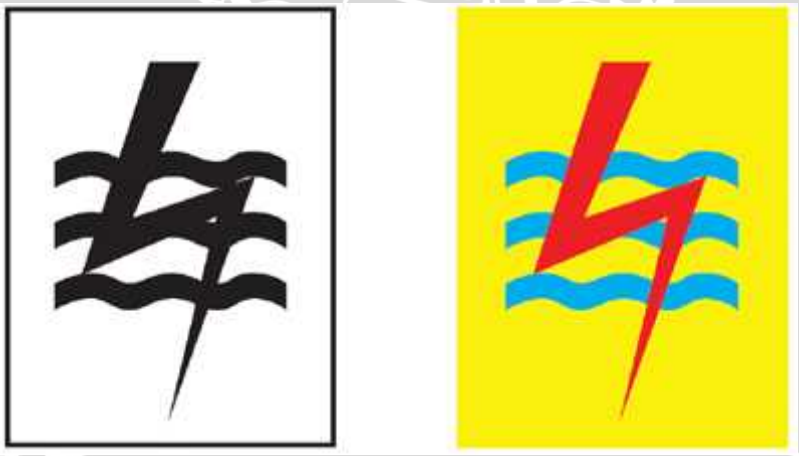
Pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan keputusan Direksi PLN No.054/DIR/73 nama PLN Exploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/Pembangkitan I. Kemudian tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi PLN wilayah XII berdasarkan keputusan Direksi PLN Nomor 012/DIR/1976. Selanjutnya, sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan keputusan Direksi Nomor 042/DIR/1982 nama PLN wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur, dengan tugas dan tanggungjawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur sampai dengan saat ini.

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 maka dengan keputusan PUTL No. 01/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan Umum Listik Negara yang memiliki wewenang satu-satunya perusahaan negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk merencanakan,

membangun, membangkit, dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh wilayah Negara Indonesia. Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 154.k/032/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi perubahan status dan namanya menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, yang tertuang pada keputusan Direksi PT. PLN (Persero) yang intinya organisasi dengan status unit PLN Jawa Timur menjadi PT. PLN (Persero) Nomor 120.k/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari 2003.

b. Makna Logo PLN

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.



Gambar 4.2 Logo Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Sumber : Arsip Profil PLN APJ Malang, Desember 2015

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energy listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan

keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

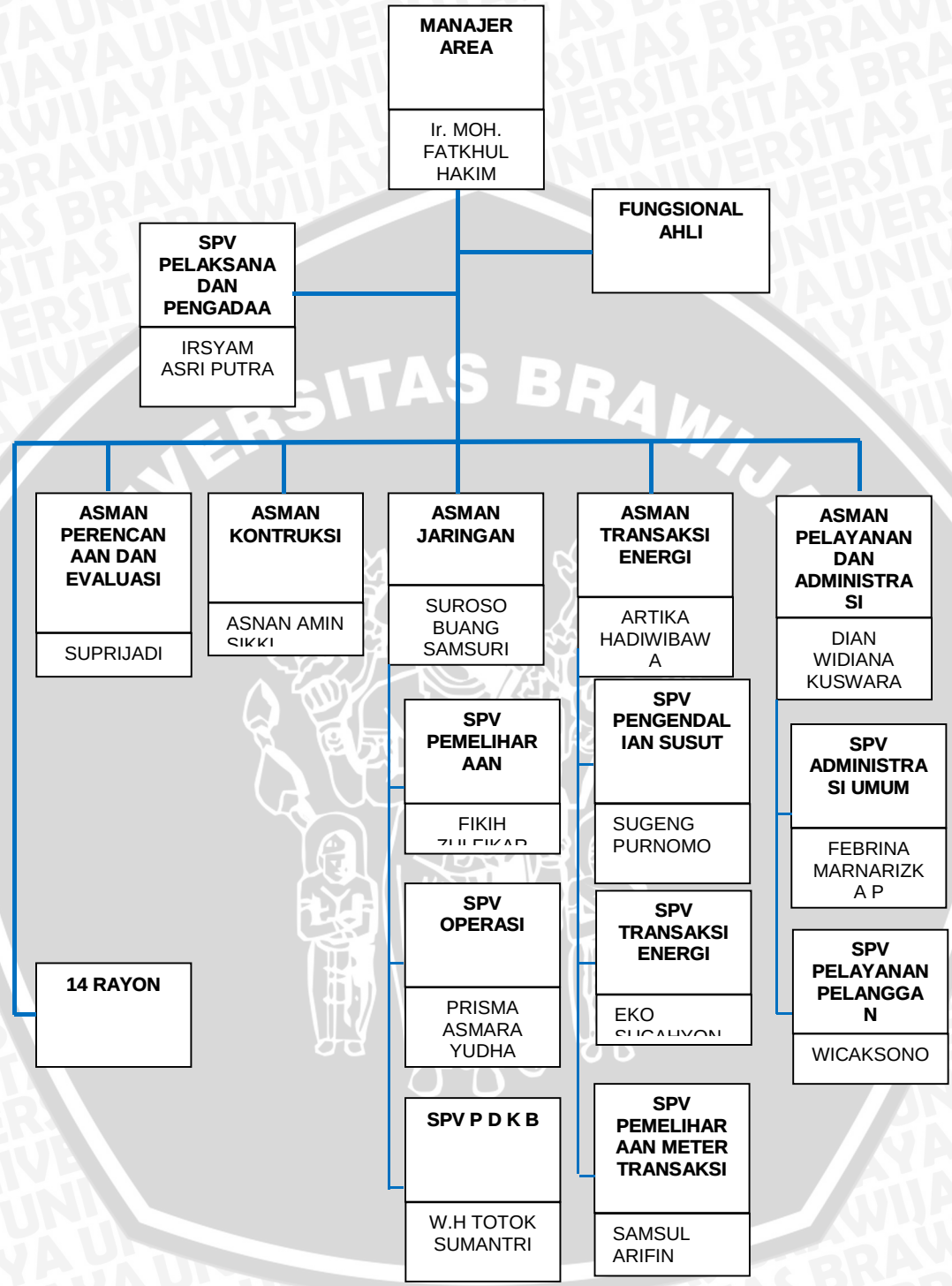
c. Struktur Organisasi

PT PLN (Persero) Distribusi merupakan perusahaan listrik yang bergerak dalan bidang penjualan, pemasaran energi listrik dan pelayanan jasa ke konsumen baik untuk pembayaran rekening maupun penanganan gangguan listrik. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berpusat di Jalan Embong Trenguli No. 19-21 Surabaya, yang membawahi seluruh Area Pelayanan di Jawa Timur, termasuk PT PLN (Persero) Area Malang yang bertempat di Jalan Basuki Rahmad No. 100 Malang, dengan dibantu oleh beberapa Unit Pelayanan yang terdiri dari:

1. Rayon Kota Malang
2. Rayon Dinoyo
3. Rayon Blimbing
4. Rayon Kebonagung
5. Rayon Batu
6. Rayon Lawang
7. Rayon Kepanjen
8. Rayon Tumpang
9. Rayon Gondanglegi
10. Rayon Bululawang
11. Rayon Singosari
12. Rayon Ngantang
13. Rayon Sumberpucung

14. Rayon Dampit

Dalam melakukan tugas operasi dan pemeliharaannya PT PLN (Persero) Area Malang bekerja sama dengan beberapa rekanan (tenaga Outsourching) dan kontraktor. Untuk melayani kebutuhan listrik pelanggan atau konsumen di wilayah kerja PT PLN (Persero) Area Malang dengan disuply 13 gardu induk. PT PLN (Persero) Area Malang dalam mendistribusikan energi listrik mencakup beberapa wilayah yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi PT. PLN (Persero) Area Malang:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Cabang Malang

Sumber: : Arsip Profil PLN APJ Malang, Desember 2015

d. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Manajer Area

   Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi serta membuat Laporan atas pencapaian pendapatan, penjualan, tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi didaerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan kehandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

   Bertanggung jawab dalam perencanaan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengevaluasi sistem, untuk menjamin tercapainya keandalan pasokan energi listrik.

   a. Menyusun rencana jaringan untuk melayani pelanggan dan pengevaluasian sistem.
   b. Mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan.
   c. Membuat data peta jaringan *(mapping)* dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.
   d. Melaksanakan evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.
   e. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian perencanaan dan evaluasi.

3. Bagian Kontruksi

   Bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, untuk menjamin tercapainya keandalan pasokan energi listrik.

a. Melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem.
b. Melaksanakan kontruksi jaringan distribusi dan administrasi pekerjaan.
c. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian kontruksi.

4. Bagian Jaringan

Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan Operasi , Efisiensi, Pemeliharaan, Pembangkitan , dan fungsi lain terkait, untuk mencapai keandalan, efisiensi dan tingkat mutu pelayanan.

a. Mengatur dan mengendalikan operasi sistem distribusitenaga listrik, untuk mencapai standard sistem keandalan dan tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan.
b. Mengatur kegiatan pemeliharaan jaringan tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi tenaga listrik.
c. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian jaringan.

5. Bagian Transaksi Energi

Bertanggung jawab dalam kegiatan pembacaan meter dan pembuatan tagihan listrik untuk menjamin keakuratan hasil baca meter dan tagihan listrik. Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian transaksi energi mempunyai fungsi:

a. Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembacaan meter.
b. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Mengelola pembuatan tagihan listrik.

d. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian transaksi energi.

6. Bagian Pelayanan dan Administrasi

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi pelayanan pelanggan, pengembangan dan administrasi, pengolahan kegiatan kesekretariatan dan umum untuk menjamin kelancaran operasional, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemberdayaan lingkungan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian administrasi mempunyai fungsi:

a. Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi serta mebuat laporan atas pelayanan pelanggan secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik.

b. Mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan.

c. Merencanakan dan mengelola kegiatan kesekretariatan, umum, dan khusus.

d. Mengatur menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan, baik dilingkungan internal maupun eksternal.

e. Mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan.

f. Menyusun laporan sesuai dengan tugas bagian pelayanan dan administrasi.

e. Visi dan Misi

Pada visi dan misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang selalu berusaha mengedepankan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Hal ini terbukti dari moto PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yakni " Listrikuntukkehidupan yang lebihbaik ". Selain itu adapun visi dan misinya sebagai berikut:

1. Visi

Visi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya denga nbertumbuh pada potensi insani.

2. Misi

a. Menjalankan bisnis kelistrikan, dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

B. Penyajian Data

1. Kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang

a. Proses kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang

Dalam sebuah kemitraan atau kerjasama yang dimaksud adalah adanya hubungan kerjasama yang terjadi anatara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan kerjasama ini dilaksanakan dengan maksud dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan menciptakan kualitas kinerja lebih baik. Tujuan yang diinginkan yakni mencapai pemerintahan yang baik *(good governance).* Sesuai dengan konsepnya *good governance* dapat terwujud dengan melibatkan tiga aktor didalamnya yaitu pemerintah, swasta (mitra), dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan swasta (mitra) inilah disebut dengan *Public Private Partnership (PPP).* Namun dalam konsep *good governance* ini pihak swasta bukanlah dari sektor swasta melainkan pemerintah Kota Malang memilih PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Hal ini dikarenakan adanya monopoli pemerintah dalam hal penyediaan listrik di Indonedia yang hanya dipegang oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tersebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hubungan kemitraan yang terjadi antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN Area Malang ini telah berlangsung selama 16 tahun bila dilihat dari pembuatan perjanjian yang pertama pada tanggal 16 Mei 2000. Setelah perjanjian tersebut diperbarui beberapa kali oleh pemerintah daerah, perjanjian paling baru yang digunakan sekarang adalah perjanjian yang diresmikan pada

tanggal 6 Juni 2014, yakni Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Malang Dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Malang Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik di Kota Malang. Penjelasan mengenai perjanjian kerja sama ini menjabarkan mengenai prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) baik yang menjadi hak maupun kewajiban kedua belah pihak.

Penjelasan dari Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) itu sendiri sesuai dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diuraikan dalam pasal 1 point (d) dan (g) mengenai Kententuan Umum sebagai berikut:

1) Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar ruangan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi, dan Kota serta Penghubung antar kelurahan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemiliharaan, serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya Penerangan Jalan Umum dibedakan menjadi Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan Jalan Umum Tidak Resmi (liar).
2) Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggan PLN di Kota Malang. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini, Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak pemakaian listrik yang dikenakan Pemerintah Daerah terhadap pelanggan PLN.

Kemudian adapun yang menjadi maksud dan tujuan kerjasama atau kemitraan ini dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada pasa 4 dan pasal 5 dibawah ini:

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membantu kelnacaran pembayaran atau pelunasan pembayaran Pajak Penarangan Jalan.
2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
    a. Untuk menjamin kelancaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari PPJ.
    b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan Rekening listrik Pemerintah Daerah kepada PLN.

Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang bertindak sebagai Pihak Pertama dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang bertindak sebagai Pihak Kedua. Dari perjanjian ini sudah ada pembagian yang jelas mengenai apa saja yang menjadi tugas, kewajiban, dan hak dari masing-masing pihak. Sehingga dibuatnya perjanjian ini bertujuan agar adanya koordinasi dan komunikasi yang bagus dari masing-masing pihak dan mencegah adanya kesalahan dalam pembagian tugas.

Seperti yang telah dijabarkan pada pasal 6 dan 7 mengenai mekanisme pemungutan dan pemyetoran PPJ dan pembayaran rekening listrik, yakni:

1) Pihak kedua melakukan pemungutan PPJ dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomo 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terhadap setiap rekening listrik pelanggan pihak kedua pada bulan yang bersangkutan, kecuali rekening listrik yang penggunaannya untuk:
    1. Instansi Pemerintah Kota Malang dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    2. Tempat-tempat yang digunakan oleh perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-Badan khususnya Badan/Organisasi Internasional dan Tenaga ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia
    3. Badan-badan sosial yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
2) Kemudian pada Pasal 7 berisi:
    1. Pihak Kedua menyetorkan hasil pungutan PPJ yang diperoleh ke dalam Rekening Kas Saerah Kota Malang milik Pihak Kesatu secara keseluruhan paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan.
    2. Keterlambatan penyetoran hasil pungutan PPJ oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan toleransi oleh Pihak Kesatu sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Pihak Kesatu menerima informasi tagihan listrik dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
    4. Pelunasan rekening listrikPihak Kesatu dilakukam setelah Pihak Kesatu menerima informasi tagihan dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Selain itu, hal ini juga terdefinisikan melalui lahirnya peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan itu sendiri, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan yang sampai sekarang masih berlaku. Dalam Peraturan Daerah ini berisikan tentang teknis pemungutan pajak, sebagai berikut:

Dalam bab II tentang Nama dan Objek Pajak pasal 2 ayat (1) dan (2):

1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berasal dari PLN maupun bukan PLN .

Pasal 3 merupakan beberapa objek pajak yang tidak dikenakan pajak penerangan jalan adalah:

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan,Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik
c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Kemudian pada Bab III mengenai dasar tarif pajak terurai dalam pasal 5 sebagai berikut:

1) Dasar Pengenaan Pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik
2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan:
    a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik
    b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau bahkan taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
3) Khusus untuk kegiatan industri , pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6 membicarakan pemungutan teknis yang akan dilakukan PT. PLN dalam pelaksanaan teknis tentang pengenaan tarif pajak untuk berbagai tipe objek pajak, adalah:

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, dengan penggunaan untuk
    1) Rumah tangga sebesar 7% dari nilai jual tenaga listrik

2) Urusan Bisnis sebesar 5% dari nilai jual tenaga listrik
3) Urusan sosial komersil sebesar 5% dari nilai jual tenaga listrik
4) Urusan Sosial non komersil sebsar 0% dari nilai jual tenaga listrik
5) Pemerintah sebesar 0% dari nilai jual tenaga listrik
6) Urusan Industri sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, dengan penggunaan bukan untuk industri ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik dan penggunaan untuk industri ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pasal 10 berisikan tentang penunjukan pihak-pihak yang terkait secara teknis sebagai berikut:

1) Untuk mendapatkan data obyek pajak secara benar dan akurat, Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada wajib pajak.
2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bab VIII pasal 13 dalam peraturan daerah ini merupakan gambaran secara umum pembayaran pajak sebagai berikut:

1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah
3) Pembayan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD
4) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan PLN merupakan SSPD
5) Untuk pelanggan listrik PLN tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik

Kemudian pada pasal 14 yang juga masih membahas tentang pembayaran pajak sebagai berikut:

1) Pembayar pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang di
5) tentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar

6) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 15 berisi tentang pembayaran dan bukti pembayaran pajak sebagai berikut:

1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
2) Untuk pelanggan listrik PLN, rekening pembayaran listrik merupakan bukti pembayaran pajak

Sesuai yang tertera pada perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pihak kedua yang mempunyai tugas sebagai penyedia pelayanan listrik dan juga sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penagihan pajak penerangan listrik kepada masayarakat. Maka berdasarkan prosedur proses pemungutan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang akan menyetorkan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan mengirimkan laporan dan hasil pemungutan ke rekening Kas milik Pemerintah Kota Malang yang dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta setiap tanggal 20 perbulan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara mengenai prosedur pemungutan yang dilakukan dengan Bapak Bambang, Kasi Pembukuan dan Pelaporan sebagai berikut:

> "Prosedurnya seperti biasa masyarakat melakukan pembayaran rekening listrik dan pajak ke PLN, setiap tertanggal 20 (dua puluh) PLN akan menyetorkan hasil pungutan pajak ke kas daerah dan mengirim Nota Kredit (NK) dari bank Jatim tempat dilakukan penyetoran ke kas daerah beserta mengirim Laporan Hasil Penerimaan PPJ kepada kami." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 10.15 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Dengan kata lain, Dispenda tempat pengelolaan data sedangkan BPKAD tempat penyetoran dana dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Prosedur yang telah berjalan setiap bulan ini juga terdapat pula tugas-tugas

dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang merupakan bagian dari proses kerjasama atau kemitraan kedua belah pihak. Hal ini didukung oleh data hasil wawancara berikut:

> "Kami dari pihak PLN mempunyai tugas untuk melakukan penagihan setiap bulan kepada masyarakat dan akan meneriman pelunasan atau pembayaran dari masyarakat. PLN akan mengelola keuangan yang kami terima. Dari situ akan dibuat laporan dari data yang ada kemudian kami kirimkan secara bersamaan kepada Dispenda dan BPKAD, namun untuk hasil pemungutannya kami kirimkan ke BPKAD. Jadi Dispenda hanya menerima hasil laporan atau data dari kami setiap bulannya dari kami. Dana atau uang yang kami terima setiap bulan akan langsung masuk ke rekening pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.00 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Dalam proses kemitraan ini, pemerintah Kota Malang selaku pihak publik menyerahkan urusan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (Dispenda). Seperti didukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

> "Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi pajak daerah, salah satunya pajak penerangan jalan tugas kami pada intinya melakukan koordinasi langsung dengan pihak PLN. Kami menerima laporan dan hasil pemungutan tagihan Pajak setiap bulan dari PLN, serta melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data jumlah pelanggan dengan jumlah tagihan. Maka dari itu kami harus menghimpun data dengan cara menyocokkan jumlah pelanggan dengan data yang. Selain itu kami juga mempunyai tugas membuat atau menentukan target pajak yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun kali. Jadi kami membuat target yang akan dicapai dalamsetiap tahunnya kemudian kami menyampaikan kepada pihak PLN." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oki pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 12.25 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Setelah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menyerahkan hasil laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah, yang dilakukan selanjutnya oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah melakukan rekonsiliasi atau

pencocokan. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi adalah untuk menyesuaikan atau mencocokkan data jumlah pelanggan dengan hasil perolehan, disini akan ditemukan permasalahan yang kebanyakan terjadinya kurang bayar. Pernyataan tersebut seperti dari hasil wawancara dibawah ini:

> "Memang setiap bulan ada saja kurang bayar, biasanya disebabkan karena rumah atau toko yang sudah lama ditinggal dan tidak membayar atau menunggak tagihan listrik. Sehingga permasalahan kecil tersebut memang selalu muncul di laporan setiap bulan, namun tetap akan ditinjau antara data dan perolehan pemungutannya." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 10.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Proses rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk konfirmasi ulang dari pihak pemerintah kota Malang kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan BPKAD Kota Malang bahwa laporan dan hasil pemungutan yang telah diterima sudah sesuai atau masih terdapat masalah kurang bayar. Jika laporan terdapat permasalahan maka akan dilakukan pengecekan ulang oleh pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Sehingga terjadi sebuah kegiatan koordinasi diantara kedua belah pihak disetiap bulan.

b. Peranan Aktor Kemitraan dalam pemungutan PPJ di Kota Malang

1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Otonomi daerah merupakan penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengelola masing-masing daerahnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan daerah di Indonesia dapat dengan menyeluruh sebab kewenangan sudah diberikan kepada daerah, serta daerah daerah-daerah di Indonesia mempunyai kemandirian dengan merata. Penyerahan wewenang ini terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Melalui Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan keuangan daerahnya masing-masing dengan melakukan perbaikan dan penyediaan fasilitas demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan diberikannya hak kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terdapat beberapa macam jenis pajak, dan pajak penerangan jalan (PPJ) ini salah satu pajak daerah yang dapat menjadi pendapatan asli daerah Kota Malang. Dilihat dari pelaksanaannya selama ini pemungutan pajak penerangan jalan adalah hak penuh dari pemerintah kota untuk memungutnya. Dengan didukung hasil wawancara sebagai berikut:

> "Sebenarnya urusan pajak penerangan jalan itu dikelola oleh sebuah badan daerah yang ditunjuk oleh Walikota yakni Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan PLN murni hanya mengurus dan melakukan pungutan atau penagihan atas penggunaan listrik beserta pajak penerangan jalannya. Sehingga hal ini kadang memunculkan beberapa kebingungan mengenai penentuan objek pajak dan pendataan wajib pajak. *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oki pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 12.25 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dan beberapa data pendukung lahirnya sebuah inisiatif dari Pemerintah Kota untuk melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang bertujuan agar lebih meningkatkan kualitas dan mutu pelayann dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Peran pemerintah sangat besar dalam penerapan *good governance*, dimana pemerintah memiliki peran sebagai *regulator* untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.. Sesuai dengan didukungnya pada Perjanjian Kerja Sama pada pasal 8 ayat 1 (satu) mengenai kewajiban dan pasal 9 ayat 1 (satu)

hak dari Dinas Pendapatan Daerah selaku PIHAK KESATU yang bertindak sebagai aktor Pemerintah, sebagai berikut:

1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
   a. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila terjadi perubahan tarif PPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
   b. Melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Kota Malang termasuk rekening PJU Resmi setiap bulannya setelah menerima informasi tagihan rekening listrik dari PIHAK KEDUA.
   c. Melakukan sosialisasi kepada pelanggan PLN mengenai pengertian PPJ, dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah mengenakan PPJ, dasar hukum kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tarif PPJ serta keberadaan kerja sama antara PARA PIHAK.
2) Hak PIHAK KESATU adalah:
   a. Menerima dari PIHAK KEDUA pembayaran hasil pungutan PPJ dari pelanggan PIHAK KEDUA pada saat pelanggan membayar rekening listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA setiap bulannya berupa:
      1. Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (Rekening Umum, TNI/POLRI, Vertikal, Pemerintah Daerah dan BUMN)
      2. Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif
      3. Rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ

Dari uraian penjelasan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan diatas telah dijabarkan secara rinci mengenai seberapa besar peran dan kewenangan pemerintah Kota Malang dalam mengurus pajak penerangan jalan ini. Selain itu, mekanisme pelaksanaan pemungutan pun juga sudah terdapat dalam peraturan daerah tersebut.

Pada intinya, peran pemerintah KotaMalang yang dipegang Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pajak penerangan jalan ini sangatlah penting sebab pengelolaan data pajak menjadi urusan utama pihak pemerintah bukan dari pihak mitra. Yang membuat peraturan dan menjalankan pelaksaannya juga menjadi tugas Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan berpengaruh

pula pada pendapatan asli daerah yang akan diperoleh Kota Malang. Seperti hasil wawancara yang mendukung dibawah ini:

> " Pemerintah Kota Malang dengan kata lain telah menitipkan urusan ini kepada Dispenda. Tugas utama Dinas Pendapatan Daerah membuat kebijakan tarif atau menentukan target setiap tahun dengan memberitahu hasil rapat bersama pejabat pemerintah daerah. Maka dari itu, untuk urusan pendataan berada pada kewenangan dan tugas kami, kami menerima dan menghimpun pendapatan pajak penerangan jalan yang kami terima setiap bulan dari PLN. Setelah itu, tugas paling penting ialah koordinasi rutin secara langsung dengan PLN dengan tujuan melakukan pencocokan data." *(berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 10.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Selain itu, terdapat pula kewenangan Dispenda terhadap pihak PLN sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> "Dengan begitu kami dapat melakukan pengamatan langsung kepada PLN. Kebijakan mengenai target setiap tahun yang kami buat jika dalam jangka waktu beberapa bulan dirasa target tersebut tidak akan terpenuhi, kami punya kewenangan untuk memberikan teguran kepada PLN dengan maksud agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan. Hal tersebut juga demi terpenuhinya target yang sudah kami buat dengan kesepakatan Pemerintah Daerah." *(berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 10.50 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

2. Peranan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Didalam penyelenggaraan *good governance*, sektor mitra berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sektor mitra ini meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lainnya. Berdasarkan regulasi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Malang, pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan dijalankan oleh pihak mitra. Kapasitas pihak mitra menjalankan pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Malang telah ditunjuk Pemerintah Kota Malang sebagai mitra kerjasama dalam pemungutan pajak penerangan jalan.

Pelaksanaan kerjasama ini didasarkan pada penyelenggaraan *good governance*, pemerintah tidak lagi dominan tetapi mitra dan masyarakat juga berperan dalam kepemerintahan. Dengan demikian adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah Kota Malang, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, dan masyarakat Kota Malang. Perjanjian ini juga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang melekat dalam *good governance* yaitu kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dituntut sebuah bukti otentik atau perjanjian yang sah antara pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Malang, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2000. Pemerintah Kota Malang yang diwakili Walikota selaku PIHAK PERTAMA dan Kepala PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Malang selaku PIHAK KEDUA, yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan *good governance* tersebut. Yang menjadi peran sector PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang berdasarkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang) pada pasal 8 ayat (2) dibawah ini:

a. Memungut PPJ dari pelanggan PIHAK KEDUA pada saat pelanggan membayar rekening listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menyetorkan hasil pemungutan PPJ ke Kas Pemerintah Kota Malang dengan memperhatikan ketentuan atau Mekanisme Pemungutan dan

Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

c. Menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU setiap bulannya berupa:
   1) Rekapitulasi rekening bank yang dicetak per kode golongan (Rekening Umum TNI/POLRI Vertikal, Pemerintah Daerah dan BUMN).
   2) Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif.
   3) Rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ.

Sedangkan yang menjadi hak dari PT. PLN pada pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:

a. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, apabila terjadi perubahan tarif PPJ, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomt 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
b. Menerima dari PIHAK KESATU atas pelunasan pembayaran rekening listrik menjadi beban PIHAK KESATU termasuk rekening PJU Resmi setiap bulannya setelah ada informasi tagihan dari PIHAK KEDUA.
c. Mendapatkan kepastian bahwa PIHAK KESATU melakukan sosialisasi kepada pelanggan PLN mengenai pengertian PPJ, dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah mengenakan PPJ, dasar hukum kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tarif PPJ serta kerja sama PARA PIHAK.

Namun, selain penjabaran hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dalam perjanjian kerjasama tersebut, adapun peran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dibawah ini yang semakin mendukung, yakni:

> "PT. PLN yang mempunyai fungsi sebagai pemberi pelayanan, maka kami akan memberikan informasi tagihan kepada setiap pelanggan dan wajib pajak untuk dibayar setiap bulan. Setelah tagihan terbayar oleh pelanggan, pencatatan dilakukan untuk dilaporkan setiap tertanggal 20 kepada Dispenda dan BPKAD sebagai penerima dana ke rekening Kas Pemerintah. Selanjutkan akan dilakukan koordinasi dengan Dispenda setelah Dispenda melakukan rekonsiliasi atau penyocokan." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 10.15 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Dalam hubungan kemitraan yang sudah berlangsung ini dilakukan telah melewati riset yang intensif dan spesialisasi baik bagi sektor publik dan sektor mitra. Perjanjian kerjasama berlangsung selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Hal

ini didukung data yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama pada pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai jangka waktu perjanjian sebagai berikut:

1) PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dievaluasi setiap tahunnya.
2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK KESATU paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Dari data diatas maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang bukan hanya pihak yang melakukan pemungutan pajak saja, namun memberikan pelayanan atas tagihan listrik dan pajak kepada pelanggan. Jelas kemitraan ini akan membawa hubungan yang lebih baik lagi antara PLN dengan pemerintah serta masyarakat sebagai wajib pajak.

3. Peranan Masyarakat

Masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal, seperti misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Konsep *good governance* menjelaskan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan peran masyarakat yang selama ini bergerak sebagai objek pembangunan harus diubah menjadi subjek pembangunan melalui pemberdayaan *(empowernment)* masyarakat

mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Peran masyarakat dalam pemungutan pajak penerangan jalan adalah sebagai wajib pajak, dimana masyarakat melakukan pembayaran pajak bersama rekening listrik perbulan atas penggunaan listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Jadi, kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat adalah tagihan rekening listrik perbulan, ditambah dengan pajak penerangan jalan sebesar 7% dari tagihan rekening listrik, dan jasa administrasi bank sebesar Rp. 2500,-. Hal ini merupakan sistematik yang dirancang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk memberikan pelayanan yang sederhana dan mudah tanpa memakan waktu yang banyak. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam kemitraan atau kerjasama ini untuk memberikan input berupa saran, studi kasus di lapangan dan kualitas pelayanan yang diberikan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat berupa ketepatan waktu selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) dalam membayar juga sangat diharapkan agar segala kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap bulan juga dapat diproses dengan baik dan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.Hal ini seperti hasil wawancara yang telah diperoleh berikut ini:

> “Masyarakat kami berikan tenggang waktu dalam pembayaran maksimal selambat-lambatnya pada tangga 20. Harus adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran tepat waktu karena itu juga akan mempermudah kinerja kami setiap bulan. Selain itu, kesadaran jika ada lampu jalan yang padam dengan berpartisipasi aktif menyampaikan keluhan tersebut kepada kami atau kepada PLN sehingga kami pun dapat segera mengatasi permasalahan tersebut.” *(berdasarkan*

hasil wawancara dengan Bapak Oki pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 13.40 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Melihat semakin aktif dan tinggi partisipasi masyarakat sekarang ini sebenarnya semakin mempermudah sistem pembayaran yang semakin canggih pula. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang telah mempunyai sistem pembayaran secara kolektif atau bersama-sama di beberapa kelurahan, kecamatan, atau desa. Selain itu, masyarakat membuka lapangan pekerjaan sendiri berupa loket pembayaran secara online kini juga semakin mempermudah proses pembayaran. Loket pembayaran online ini dapat dibuka sendiri dirumah yang tentunya bekerja sama dengan bank. Hal ini didukung oleh hasil wawancara berikut ini:

> "Kami sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan bank untuk mempermudah kami dengan pembayaran secara online. Dan sekarang ini juga sudah banyak agen dari masyarakat yang membuka loket pembayaran listrik online. Dengan ini sangat membantu kami dengan mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Loket pembayaran online ini juga bekerja sama pula dengan bank." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 10.25 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Selain itu, didukung pula oleh hasil wawancara dengan masyarakat dari pengguna listrik pra bayar dan pasca bayar sebagai berikut:

> "Saya sebagai pengguna listrik pra bayar yan sistemnya seperti beli pulsa, satu bulan tidak cukup beli satu kali pembelian pulsa listrik jika kurang. Maka dengan adanya loket pembayaran online yang sudah banyak ditemui di sawojajar ini sangat mempermudah saya dalam pembayaran listrik. Bahkan tidak harus berlokasi di toko atau ruko, dirumah juga bisa membuka usaha seperti itu." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Arifin pengguna listrik pra bayar pada tanggal 10 September 2016 pukul 11.00 WIB di Jalan Danau Ranau 1).*

Hal yang sama juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pengguna listrik pasca bayar dibawah ini:

> "Sekarang ini dengan semakin majunya teknologi, terobosan yang dibuat PLN akan sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Tidak usah bingung untuk membayar listrik dan pajak penerangan jalan ini. Pengguna pasca bayar yang diharuskan membayar maksimal tanggal 20 jadi tidak merasa sulit harus mengantri seperti dulu." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Dewi pengguna listrik pasca bayar pada tanggal 9 September 2016 pukul 09.15 WIB di Jalan Danau Ranau 1).*

Partisipasi masyarakat yang seperti ini yang diinginkan dalam penyelenggaraan *good governance,* artinya masyarakat sudah ikut serta dalam prose pembangunan yang diadakan oleh pemerintah. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuangkan keluhan dan sarannya melalui *website.* Dan kerjasama yang telah dijalin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan lembaga keuangan untuk pembayaran secara online melalui transaksi dan layanan bank sehingga dapat sangat mempermudah masyarakat untuk membayar listrik dan pajak dimana saja ditengah kesibukan. Dengan demikian, yang diharapkan agar masyarakat ikut andil dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan evaluasi perbaikan sistem kepada pemerintah dapat lebih baik kedepannya.

c. Pengembangan *Public Private Partnership* dalam sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang

Pengembangan *Public Private Partnership* dalam sistem pemungutan pajak penerangan jalan ini ditandai adanya proses pengembangan daerah yang berdasarkan pada potensi masing-masing daerah dengan memperhatikan heterogenitas Sumber Daya Alam, kualitas Sumber Daya Manusia, dan struktur industri. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan yang sinergi antara tiga komponen pembangunan diarahkan untuk melakukan pembangunan yang berbasis

kompetensi. Pemerintah-mitra harus dapat melihat atau mengidentifikasi potensi daerahnya. Pemerintah akan memberikan arah pembangunan yang jelas dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, sedangkan mitra akan bertindak sebagai penggerak ekonomi dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini merupakan salah satu pajak yang sangat potensial yang mampu menyumbang terhadap pendapatan yang dapat diperoleh daerah. Sumber keuangan yang dapat digali oleh pemerintah Kota Malang ini harusnya dapat dimanfaatkan dengan semakin baik lagi sehingga perolehan pajak tersebut juga dapat semakin optimal. Pengembangan dan perbaikan sistem dalam proses pemungutan harus dilakukan pemerintah Kota Malang untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyedian sarana dan prasarana yang semakin maju. Perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan yang semakin meningkat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Kontribusi Penerimaan PPJ terhadap Pendapatan Daerah Kota Malang

Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
1.	2011	24.581.144.223,00	104.644.701.180,71	23,50
2.	2012	26.744.632.033,00	125.828.676.756,77	21,25
3.	2013	33.870.696.565,00	238.499.748.161,57	14,20
4.	2014	39.768.777.893,00	278.879.540.252,87	14,26
5.	2015	45.603.347.367,00	316.814.967.743,76	14,40
	Rata-Rata			17,522

Sumber: Data dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011-2014 yang sudah diolah oleh penulis

Kemudian berikut ini tabel yang merupakan laporan bulanan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari Januari sampai dengan Desember pada Tahun 2015:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA repository.ub.ac.id

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Januari-Desember Tahun 2015

No.	BULAN	ANGGARAN TAHUN 2016	REALISASI PENERIMAAN			KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D AKHIR BULAN		
1.	Januari	38.496.943.638,94	-	3.908.603.058,00	3.908.603.058,00	34.588.340.581,94	10,15
2.	Februari	38.496.943.638,94	3.908.603.058,00	3.780.034.507,00	7.688.637.565,00	30.808.306.073,94	19,97
3.	Maret	38.496.943.638,94	7.688.637.565,00	3.792.726.406,00	11.481.363.971,00	27.015.579.667,94	29,82
4.	April	38.496.943.638,94	11.481.363.971,00	3.585.348.565,00	15.066.712.536,00	23.430.231.102,94	39,14
5.	Mei	38.496.943.638,94	15.066.712.536,00	3.760.498.827,00	18.827.211.363,00	19.669.732.275,94	48,91
6.	Juni	38.496.943.638,94	18.827.211.363,00	3.795.022.447,00	22.622.233.810,00	15.874.709.828,94	58,76
7.	Juli	38.496.943.638,94	22.622.233.810,00	3.876.604.652,00	26.498.838.462,00	11.988.105.176,94	68,83
8.	Agustus	38.496.943.638,94	26.498.838.462,00	3.663.187.664,00	30.162.026.126,00	8.334.917.512,94	78,35
9.	September	40.496.943.638,94	30.162.026.126,00	3.754.288.162,00	33.916.314.288,00	6.580.629.350,94	83,75
10	Oktober	40.496.943.638,94	33.916.314.288,00	3.768.546.616,00	37.684.860.904,00	2.812.082.734,94	93,06
11	November	40.496.943.638,94	37.684.860.904,00	3.854.832.953,00	41.539.693.857,00	(1.042.750.218,00)	102,57
12	Desember	40.496.943.638,94	41.539.693.857,00	4.063.653.510,00	45.603.347.367,00	(5.106.403.728,00)	112,61
	TOTAL	**40.496.943.638,94**			**45.603.347.367,00**	**(5.106.403.728,06)**	**112,61**

Sumber: Laporan Realisasi PPJ Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

129

Pengembangan *Public Private Partnership* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam kemitraan ini, baik pemerintah kota dengan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Berikut beberapa pengembangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pihak mitra:

> "Kami sudah mulai memberlakukan pembayaran sistem baru yaitu PPOB *(Payment Point Online Bank)* berakumulasi pada pertengahan 2008, dalam artian PT. PLN melakukan kerjasama juga dengan beberapa bank untuk pembayaran rekening listrik dan pembayaran pajak. Pembayaran melalui bank ini akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,-." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.08 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Sistem ini mengedepankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga transaksi dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Dengan pembayaran sistem ini dapat tercapai dan memakan waktu yang cukup singkat. Program ini juga dilakukan secara berlaku untuk menghindari dan mengatasi jumlah pelanggan yang terus meningkat.

> "Jumlah pelanggan yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini bertambah kurang lebih 200.000 pelanggan, menuntut kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang dulunya pembayaran dilakukan di loket-loket yang ada di kantor-kantor Pelayanan PLN Area, yang tentunya akan sangat tidak efektif dengan jumlah pelanggan yang semakin meningkat. Kini kami mempermudah pembayaran rekening listrik melalui bank dimanapun. Tetapi kami tetap memperbaiki dan perubahan sistem pelayanan yang ada." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.25 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Pemerintah melakukan perbaikan, pengembangan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan potensi daerah. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak, berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Oki pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 13.45 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dilakukan peneliti dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Memperluas basis penerimaan

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Penyesuaian tarif juga dilakukan sesuai dengan perkembangan kenaikan nilai jual tenaga listrik oleh PT. PLN. Pemerintah kota dengan segera harus mengeluarkan ketetapan tarif pajak yang baru karena terkait dengan masyarakat luas. Terlebih prinsip pajak ini tidak boleh membebankan masyarakat dan penggunannya untuk masyarakat.

3. Meningkatkan pengawasan

   Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

   Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Pemerintah sudah melakukan riset untuk melakukan kerjasama berikutnya agar efisiensi pemungutan pajak bisa dirasakan masyarakat dan perhitungan ulang atas biaya operasional yang tertera di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

   Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan PT. PLN. Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan penanggungjawab dalam pelaporan perhitungan pajak penerangan jalan ke Walikota.

2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kemitraan dalam proses pemungutan PPJ di Kota Malang

a. Faktor-faktor penghambat

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang merupakan pihak penyedia listrik dan dan jasa pelayanan kepada subjek pajak atau masyarakat. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak pengatur kebijakan, pengelola data, dan penyedia fasilitas kepada masyarakat. Setiap bulan proses pemungutan akan berjalan seperti ini. Dengan kata lain, yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat adalah Dinas Pendapatan Daerah. Namun,

dalam pelaksanaannya masih ada saja faktor yang dapat menghambat dan faktor yang justru mendukung proses pemungutan ini. Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pemungutan kemitraan dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan adalah:

1. Terjadinya kurang bayar

Dari data hasil laporan pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) yang berasal dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, setelah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data oleh Dinas Pendapatan Daerah beberapa telah ditemukan adanya "kurang bayar". Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kurang bayar ini kebanyakan berasal dari kelompok rumah tangga dan urusan bisnis. Hal tersebut sering kali terjadi disebabkan karena tidak adanya atau keterlambatan pembayaran penggunaan tenaga listrik oleh kelompok rumah tangga dan urusan bisnis ini rumah atau toko yang sudah lama tidak dihuni atau ditinggal dan rumah yang penghuninya sudah pindah namun tidak melakukan konfirmasi kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang maupun keterlambatan pelanggan membayar listrik. Seperti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

> "Karena saya yang melakukan koordinasi di lapangan, dalam laporan setiap bulan yang kami terima dari PLN setiap bulan selalu ditemui banyak kekurangan pembayaran masyarakat. Untuk kelebihan pembayaran jarang terjadi, yang selalu terjadi adalah kekurangan pembayaran." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko bagian Bendahara Penerimaan pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 14.10 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

> "Biasanya kurang bayar ini kebanyakan karena tidak adanya pembayaran yang berasal dari kelompok rumah tangga dan bisnis. Setelah dilihat dilapangan ternyata rumah atau toko tersebut sudah ditinggal lama atau

sudah pindah. Namun penghuninya tidak melakukan konfirmasi dan pembayaran kepada PLN" *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Selain itu, permasalahan lainnya disebabkan oleh pembayaran dari pelanggan yang dilakukan setelah pelaporan dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Sehingga data pembayaran tidak masuk pada laporan rekapitulasi. Permasalahan-permasalahan tersebut cukup menjadi kendala bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan Dispenda setiap bulan. Hal ini juga sesuai dengan data Laporan Rekonsiliasi Bulan Desember 2015 yang diperoleh peniliti sebagai berikut:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
repository.ub.ac.id

Tabel 4.4
REKONSILIASI DATA PPJ DENGAN PLN AREA MALANG
BULAN : DESEMBER 2015

NO.	JENIS PPJ	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH REKENING	JUMLAH PPJ	SESUAI DENGAN PERDA PAJAK DAERAH	SELISIH	PPJ YANG TERTAGIH BULAN INI									KET
							LISTRIK PASKA BAYAR			LISTRIK PRA BAYAR			NON TAGLIS			
							PLG	REK	PPJ	PLG	REK	PPJ	PLG	REK	PPJ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SOSIAL	5.431	5.603.427.701	14.215	-	-	4.268	5.485.637.662	-	1.066	112.739.092	7.408	77	5.050.947	6.807	
2	RUMAH TANGGA	354.388	36.397.290.270	2.526.201.779	2.547.810.319	[illegible]	199.164	26.574.031.992	1.835.513.480	153.200	9.700.595.391	679.056.849	2.024	122.662.887	11.631.450	
3	BISNIS	28.364	25.799.401.632	1.283.017.286	1.289.970.082	[illegible]	14.264	22.468.538.686	1.116.836.988	13.804	3.281.926.013	163.778.887	296	48.936.933	2.401.411	
4	INDUSTRI	776	10.083.500.055	302.505.654	302.505.002	852	647	10.060.666.139	301.819.987	128	22.833.916	685.084	1	-	583	
5	PEMERINTAH	1.599	6.953.093.191	-	-	-	1.456	6.919.546.690	-	138	33.353.300	-	5	193.201	-	
6	LAIN-LAIN	54	56.863.777	4.647.196	852.957	3.794.239	18	50.948.732	2.547.436	13	5.915.045	295.755	23	-	1.804.005	
		390.612	84.893.576.626	4.116.386.130	4.141.138.359	[illegible]	219.837	71.559.369.901	3.256.717.891	168.349	13.157.362.757	843.823.983	2.426	176.843.968	15.844.256	

Sumber: Laporan Hasil Rekonsiliasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Keterangan:
KURANG
LEBIH

1. Rumah Tangga masih ada kekurangan tidak sesuai dengan Perda Pajak Daerah
2. Bisnis masih ada kekurangan tidak sesuai dengan Perda Pajak Daerah

135

2. Kesadaran masyarakat yang kurang mengenai penerangan jalan umum (PJU) yang liar (tidak resmi)

Melihat kesadaran masyarakat dalam membayar rekening listrik dari data yang dihimpun dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, jumlah pelanggan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ditandai pula dengan meningkatnya pelanggan yang mengalami keterlambatan membayar. Dan semakin banyaknya penerangan jalan umum yang ilegal, sedangkan hal tersebut akan dibebankan kepada pemerintah kota untuk membayar tagihan tersebut. Permasalahan seperti ini sudah terjadi beberapa tahun silam.

Pemkot Malang meminta PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk tidak membongkar penerangan jalan umum (PJU) yang telah dipasang pada tiang listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, meski PJU tersebut diindikasi tergolong liar. PLN tidak perlu melakukan razia PJU liar, karena Pemkot Malang sebenarn'ya telah membayar tarif yang telah melebihi riil pemakaian. Sedangkan tarif yang dikenakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang terhadap Pemkot Malang, dua kali lipat dari beban daya. Bagaimanapun hasil pajak penerangan jalan umum (PPJU), hampir semuanya akan kembali ke PLN sebagai bentuk pembayaran tarif listrik PJU dari pemkot Malang.Penerangan jalan umum yang liar ini, tetap dihitung dan dibebankan ke pemerintah kota. Sedangkan penerangan jalan umum liar ini banyak dilakukan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Bambang pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang, yang menjadi faktor-faktor penyebab penerangan jalan umum ilegal ini adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang merasa sudah membayar rekening listrik dan pajak sehingga semena-mena membuat saluran listrik dan PJU bahkan yang dibuat melekat pada tiang listrik PLN.
2. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang mekanisme pembuatan PJU yang sah, padahal cara yang kami lakukan cukup mudah, dengan mengajukan surat permohonan dan PLN akan merealisasikan.
3. Kurangnya perhatian pemerintah kota untuk mengawasi PJU ilegal ini terkesan pemerintah yang menuntut PLN untuk melakukan pengawasan.
4. PJU ilegal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap trafo PLN (mesin listrik statis yang berfungsi untuk mengubah menaikkan atau menurunkan tegangan dan arus listrik pada sistem tenaga atau rangkaian listrik) pada daerah sekitar PJU ilegal.

Maka dari itu pihak PLN mencoba mencegah hal tersebut terjadi, sesuai dengan pernyataan pada wawancara yang telah dilakukan pada pihak PLN sebagai berikut:

> "Untuk mencegah pemasangan penerangan jalan umum secara liar, kami memiliki tim pengawas lapangan untuk masalah ini. Kami juga tidak mau dirugikan. Penerangan jalan yang sah merupakan penerangan jalan umum yang terdaftar pada *database* kami sesuai dengan nomor identitas pelanggan yang ada. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor pemicu penerangan jalan umum ilegal ini adalah kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penerangan jalan umum yang legal, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut. *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 10.35 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

3. Kurangnya konsistensi dalam kinerja

Pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang masih terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja agar kerjasama dapat berjalan dengan semakin baik, tetapi setelah dilihat dilapangan masih ada beberapa ketidak konsistenan dari kedua belah pihak dalam kerjasama pemugutan pajak penerangan jalan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bambang pada 26 Mei 2016 pukul 11.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, sebagai berikut:

1. Pihak Mitra tidak menyampaikan daftar rekening listrik sebagai dasar penetapan besarnya Pajak Penerangan Jalan terhutang.
2. Pihak Mitra tidak menyampaikan daftar nama pelanggan yang terlambat membayar. PLN hanya menyampaikan laporan kepada Dispenda secara keseluruhan saja.
3. Sulitnya untuk koordinasi dengan pemerintah kota untuk memberantas penerangan jalan umum yang liar.

Seperti tabel dibawah ini yang merupakan Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Cabang Malang yang disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan Januari 2016:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
repository.ub.ac.id

Tabel 4.5

LAPORAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)

BULAN: Januari 2016

No.	AREA	PEMDA	PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN				TOTAL PENERIMAAN
			Postpaid (Pasca Bayar)	Prepaid (Prabayar)	Eks. PRR (Piutang Ragu-Ragu)	Non Taglis	
1.	MALANG	KODYA MALANG	3.235.288.846	819.574.111	4.340.221	11.270.588	4.070.413.766
	TOTAL		3.235.288.846	819.574.111	4.340.221	11.270.588	4.070.413.766

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT. PLN yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

139

Padahal dengan data-data laporan diatas, dapat menjadi sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan peningkatan pemungutan pajak penerangan jalan. Penerimaan yang berasal dari pajak penerangan jalan menjadi bersifat stabil tanpa ada kenaikan yang signifikan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah pelanggan tiap tahunnya. Kita mengetahui penerimaan dari pajak ini yang sangat besar memberikan sumbangan bagi sektor pendapatan pajak daerah. Hal tersebut mengakibatkan realisasi dari penerimaan pajak penerangan jalan kurang dapat diyakini nilainya. Permasalahan tersebut disebabkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak transparan dalam data daftar perhitungan pengenaan pajak penerangan jalan. Hal ini yang membuat kedua belah pihak masih belum bisa menemukan formula yang tepat dalam manajemen pemungutan dan sistem pelaporan yang tepat serta banyaknya kewajiban dari kedua belah pihak yang belum mampu dipenuhi dan dijalankan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.00 WIB di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terhadap objek pajak, mekanisme pemungutan, *cross-check* terhadap tagihan listrik yang ditanggung pemerintah kota. Padahal dalam kerjasama ini, urusan pajak merupakan tanggung jawab utama Pemerintah sehingga tugas untuk melakukan pengawasan adalah tugas Dispenda.
2. Kurangnya koordinasi yang jelas untuk membahas permasalahan yang insidental atau darurat dan harus membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat.

Dari penjelasan data diatas menunjukkan bahwa kedua belah piah kurang konsisten dalam menjalankan tugasnya masing-masing, pemerintah kota seolah-olah identik memasrahkan tanggung jawabnya kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang memang telah diminta bekerja sama atas pemungutan ini. Dispenda hanya bertanggungjawab terhadap laporan-laporan yang telah ada yang memang menjadi pekerjaannya setiap bulan. Hal ini harusnya berdasarkan pada konsep *public-private partnership,* dimana hasil, resiko, dan pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan kemitraan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

4. Tidak bisa saling intervensi atau campur tangan

Adanya ketidak konsistenan dalam kinerja masing-masing pihak, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang dirasa masih kurang rinci dalam hasil laporan, kurang transparan dalam menyampaikan daftar rekening listrik dan daftar nama pelanggan yang terlambat membayar. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah yang masih kurangnya pengawasan dalam objek pajak, mekanisme pemungutan, pengecekanterhadap tagihan listrik yang ditanggung pemerintah kota. Dari fenomena yang terjadi ini, kualitas kinerja masing-masing pihak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam proses berlangsungnya kerjasama dan kemitraan masih kurang maksimal. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> “Kami dari pihak PLN hanya melakukan tugas sebagaimana mestinya memungut tagihan kepada masyarakat dan melaporkannya saja kepada Dinas Pendapatan Daerah, diluar itu kami tidak ikut campur.” *(berdasarkan*

> *hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2010 pukul 11.40 WIB di Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).*

Namun dari pihak Dispenda selaku penanggungjawab utama pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ) tidak dapat melakukan koordinasi kepada pihak PT. PLN mengenai ketidaknyamanannya. Karena Dispenda merasa tidak dapat campur tangan atau mengintervensi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang mempunyai kewenangan dan kebijakan masing-masing. Begitu juga hal sebaliknya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang tidak dapat menyampaikan kritiknya terhadap Dispenda. Seperti yang telah diperoleh dari hasil wawancara berikut:

> "Kami tidak bisa melakukaan intervensi atau campur tangan langsung kepada PLN sebab kami juga mempunyai wilayah kewenangan masing-masing, tidak bisa seenaknya menyampaikan pendapat jika merasa ada yang harus diperbaiki." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 13.05 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

b. Faktor-faktor pendukung

Selain adanya hambatan atau kendala dalam berlangsungnya proses pemungutan pajak penerangan jalan, ada pula beberapa hal yang justru dapat mendorong keberhasilan pemungutan ini, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi

Dari konsep *public-private partnership* ini memunculkan berbagai konsep *empowernment* yang dihasilkan, agar masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi dapat berperan sebagai subjek pembangunan dan pelaku ekonomi sosial dengan adanya penawaran partisipasi dari PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan membuat masyarakat memiliki peluang usaha di bidang pemungutan pajak ini. Hal ini didukung data sebagai berikut:

> "PT. PLN melakukan kerjasama juga dengan beberapa bank dalam hal pembayaran rekening listrik dan pembayaran pajak. Pembayaran yang dilayani bank dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,-. Sebenarnya PT. PLN sekarang tidak memiliki loket pembayaran, semua sudah merupakan kontrak manajemen dengan bank-bank tersebut. Tetapi peran masyarakat justru lebih terlihat dan lebih mendidik untuk berjiwa wiraswasta. Masyarakat bisa membuka usaha dengan memberikan modal atau investasi kepada bank dan berhak memungut pembayaran rekening secara kolektif, tetapi hanya sebesar modal yang diinvestasikannya pada bank. *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.05 WIB di PT. PLN Cabang Malang).*
> Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara sebagai berikut:
> "Sebenarnya dengan banyak terobosan yang dibuat oleh PLN ini disambut dengan sangat baik oleh masyarakat di Kota Malang, terbukti dengan banyaknya usaha loket pembayaran yang ada dimana-mana." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 14.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.*

Dari penjelasan diatas, maka masyarakat lebih diberi peluang atau kesempatan dalam membuka usaha loket pembayaran tersebut. Hal ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat karena dapat menjadi lapangan pekerjaan yang cukup mudah untuk dilakukan. Dengan begitu pemerintah telah mendukung masyarakat mempunya jiwa usaha atau kewirausahaan.

2. Adanya kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran

Semakin majunya teknologi pada zaman ini, mempermudah segala urusan pembayaran khususnya dalam pembayaran listrik yang sekaligus pembayaran pajak. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang bekerjasama dengan bank-bank untuk urusan pembayaran listrik, memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pembayaran tidak harus di loket pembayaran milik PLN. Dibukanya peluang usaha untuk masyarakat menjadi agen loket pembayaran yang

bekerja sama dengan bank, sangatlah membantu masyarakat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam pembayaran pajak.

Apalagi sekarang pembayaran pun juga bisa dilakukan secara online, bahkan pembayaran pun bisa dilakukan dirumah. Semakin majunya teknologi ini tentunya memudahkan proses pembayaran yang bisa dilakukan dimana saja. Berbagai terobosan cara pembayaran inilah yang diharapkan pemerintah akan semakin mendorong proses pemungutan pajak. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara berikut ini:

> "Saya sangat terbantu dengan kemudahan pembayaran listrik sekarang, bisa dibayar di agen pembayaran yang terdekat di Sawojajar yang sudah sangat banyak. Jika tidak sempat membayar atau tempat pembayaran sudah tutup jika malam juga bisa dibayar melalui aplikasi transaksi bank" *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Dewi pengguna Listrik Pasca Bayar pada tanggal 10 September pukul 09.15 WIB di Jalan Danau Ranau 1).*

3. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mempunyai target

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sesuai yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama mempunyai kewajiban untuk menetapkan target tahunan yang harus dicapai dan memberitahukan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Penetapan target tersebut bertujuan baik tentunya selain agar Kota Malang memiliki pendapatan daerah yang selalu bertambah, yaitu supaya kinerja para aparatur Dinas Pendapatan Daerah dan pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang akan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Pendapatan daerah yang akan selalu bertambah akan semakin meningkatkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti didukung hasil wawancara berikut ini:

> "Kami selalu membuat target pencapaian setiap tahunnya. Hal ini bertujuan baik bagi pemerintah dan PLN. Sehingga kami sama-sama bekerja keras

dalam mencapai target tersebut." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 13.15 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Sedangkan hasil wawancara dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai berikut:

"Sejauh ini kami bekerja memungut tagihan listrik dan pajak penerangan jalan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.45 WIB di Kantor PT. PLN (Persero) Area Malang).*

4. Adanya saling percaya dalam kerjasama

Kerjasama atau kemitraan yang telah dijalin antara Dinas Pendapatan Daerah dan PT. PLN berlangung selama 16 (enam belas) tahun ini membuktikan bahwa adanya saling percaya yang tinggi. Kerjasama yang selama ini tidak pernah mmunculkan konflik ini menunjukkan hubungan yang baik. Seperti yang diungkapkan salah satu pegawai Dispenda bagian Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagai berikut:

"Walaupun ada saja masalah yang ditemukan, namun sejauh ini kami mempunyai kepercayaan yang besar terhadap PT. PLN untul melaksanakan tugasnya sebagai penarik pajak. Soal pemberi pelayanan kepada masyarakat juga kami percayakan pada perusahaan yang sudah bertahun-tahun bekerja di bidang penyedia listrik." *(berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 13.20 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*

Kemudian selain itu terdapat hasil wawancara dari pihak mitra sebagai berikut:

"Sesuai dengan perjanjian yang ada kami tidak mau ikut campur terlalu banyak terhadap kebijakan pemerintah, jadi kami pun juga percaya terhadap Dinas Pendapatan Daerah sebagai tangan kanan pemerintah kota atas tugasnya yang bermitra dengan kami" *(berdasarkan hasil wawanvara dengan Bapak Wicaksono pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.50 WIB di Kantor PT. PLN (Persero) Area Malang).*

5. Potensi di Daerah

Penggambaran Kota Malang menunjukkan tidak heran jika pemungutan pajak penerangan jalan sangat memungkinkan dapat ditingkatkan. Disamping Kota Malang merupakan kota pendidikan tetapi juga memiliki roda perekonomian yang kokoh melihat Kota Malang yang semakin hari menjadi daerah yang semakin maju. Hal ini dibuktikan pesatnya pembangunan sektor industri, bisnis, dan perkantoran yang sangat representatif dapat menjadi keuntungan tambahan bagi pendapatan Kota Malang dalam pemungutan pajak. Terlebih-lebih jumlah penduduk Kota Malang yang mengalami kenaikan cukup stabil tiap tahunnya.

Kedua hal diatas menjadi faktor yang mendukung, baik untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang secara profit untuk menjual jasa tenaga listrik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang bisa menetapkan target kenaikan pemungutan pajak penerangan jalan setiap tahunnya yang berdasarkan jumlah pelanggan yang menjadi subjek pajak semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga tentunya.

C. Analisis Data

1. Kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang

Governance merupakan cara pemerintah untuk mengelola sumber daya sosial dan politik untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Hal ini begitu berkembang pesat di wilayah otonomi daerah yang merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah itu sendiri. Demi mencapai sebuah pemerintahan yang baik *(good governance)* yang dicita-citakan maka harus ada kerjasama dan partisipasi

yang mendukung dari semua pihak. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam proses *good governance* yaitu pemerintah (*state),* dunia usaha *(private sector),* dan masyarakat *(society)* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Kushandajani, 2001: 67).

Intitusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif karena selain berperan sebagai *regulator* pemerintah juga sebagai *fasilitator* bagi masyarakat agar ikut berperan aktif dan mempunyai kesadaran secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial dalam jalannya pemerintahan. Sektor mitra berperan menghasilkan sesuatu dalam bentuk jasa atau produk demi kepentingan masyarakat yang dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan itu sendiri bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan secara positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

a. Proses kemitraan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Malang

Dalam sebuah kemitraan, adanya kerjasama merupakan faktor yang sangat penting, seperti kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercipta. Kerjasama tersebut memang membutuhkan waktu dan tahapan tertentu agar kolaborasi antara ketiga pihak dapat terjalin komunikasi yang baik. Kepentingan yang muncul harus bejalan secara seimbang dan sejajar, tidak ada satu kepentingan berjalan diatas kepentingan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004:129) bahwa dalam kemitraan diperlukan

beberapa ciri dan syarat yang meliputi ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, adanya kesepakatan, dan saling membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, haruslah ada transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan partisipatif sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik *(good governance)* dalam sebuah kemitraan atau kerjasama yang dijalin. *Good governance* yang ingin diwujudkan ini sesuai dengan konsepnya haruslah melibatkan pemerintah, swasta (mitra), dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:1) dalam Widodo (2001:23) bahwa *Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Dari hubungan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dan swasta (mitra) inilah muncul suatu hubungan yang disebut sebagai *Public Private Partnership (PPP).*

Pelaksanaan kerjasama yang disebut dengan *Public Private Partnetship* ditandai dengan adanya kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta (mitra). Pola kemitraan yang berjalan di sektor pemerintah dan mitra sebagai pemegang kendali selama ini ada beberapa macam, bentuk, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi daerah sekitarnya. Seperti halnya dalam pembahasan ini, kemitraan yang terjadi antara Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak pemerintah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pihak mitra di bidang pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ).

Sesuai dengan penjelasan dari Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Daerah yang menggambarkan bagaimana mekanisme kerja sama atau kemitraan Dinas

Pendapatan Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang mengarah pada konsep *Public Private Partnership (PPP).* Secara umum mengenai konsep *Public Private Partnership (PPP)* ini dapat disimpulkan sebagai perjanjian dalam bentuk kontraktual antara pihak publik (lembaga negara) dengan pihak kedua (swasta) yang bertindak atas dasar mencari keuntungan melalui perjanjian ini. Seluruh keuntungan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah dan dipergunakan untuk menghasilkan sebuah fasilitas yang digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Irawan (2004:20) *partnership* (kerjasama) ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua buah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya dan dari tindakan tersebut akan diperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai suatu nilai lebih yang diperoleh oleh masing-masing pihak jika dibandingkan dengan melakukan tindakan tersebut secara individu.

Public Private Partnership merupakan pengaturan antara pemerintah dan swasta (mitra) untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, penyedia fasilitas-fasilitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang merupakan satu-satunya perusahaan yang menjual jasa pemakaian tenaga listrik di Indonesia. Kegiatan kemitraan yang cukup sulit dimana pemungutan pajak penerangan jalan ini terkait dengan penerangan jalan umum yang merupakan tanggungan dari pemerintah kota untuk membayarnya, sedangkan laporan dan proses pemungutan pajak itu dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Area Malang setiap bulannya. Pembayaran rekening listrik yang ditangguhkan ke pemerintah kota diambil dari hasil pemungutan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan jangka waktunya bentuk kemitraan antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan Pemerintah Kota Malang bersifat kemitraan jangka dan terus-menerus. Kemitraan ini dilakukan dalam bentuk jangka panjang dan terus-menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini didasari saling ketergantungan dalam hal pengadaan jasa tenaga listrik dan manajemen pemungutan pajak penerangan jalan ini. Bentuk kemitraan antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan Pemerintahan Kota Malang berlaku untuk 1 periode (3 tahun). Hal ini dipertegas didalam *Memorandum of Understanding (MOU)* sebagai berikut:

> Pada pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai jangka waktu perjanjian dan perpanjangan sebagai berikut:
> 1) PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dievaluasi setiap tahunnya.
> 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK KESATU paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Sesuai perjanjian ini jelas mengenai batasan waktu dan perpanjangan kerjasama atau kemitraan ini dapat berlangsung. Bentuk kemitraan ini bersifat terus-menerus sampai dengan perjanjian baru terbentuk dan bila salah satu pihak, baik Pemerintah Kota Malang maupun PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang ingin mengakhiri perjanjian ini harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan bersama.

Berdasarkan dari hasil wawancara, prosedur atau alur proses kerjasama atau kemitraan ini dilakukan dengan pemungutan pada setiap bulan oleh PLN, Dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memang merupakan lembaga negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang penerimaan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Maka dari itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selaku "tangan kanan" Walikota Malang dalam pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ).

Dengan adanya penerapan *Public Private Partnership (PPP)*, kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah dan mitra dapat dipadukan. Peran dan pertanggungjawaban dari masing-masing pihak dalam kemitraan bisa beragam, bisa jadi peran pemerintah lebih dominan atau malah sebaliknya peran mitra lah yang lebih dominan. Namun, bagaimanapun peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Pemerintah tetap harus menjadi pihak yang bertanggungjawab dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pola kerjasamanya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang ini merupakan proses kontrak kerja yang dilakukan berdasarkan perjanjian kemitraan ini dibuat. Batasan-batasan atau cakupan peranan kinerja mitra harus tertulis secara detail didalam perjanjian tersebut. Sistem kontrak kerja ini memiliki arti bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menjalankan salah satu fungsi peranan pemerintah kepada masyarakat untuk memungut pajak penerangan jalan. Sebuah asumsi bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

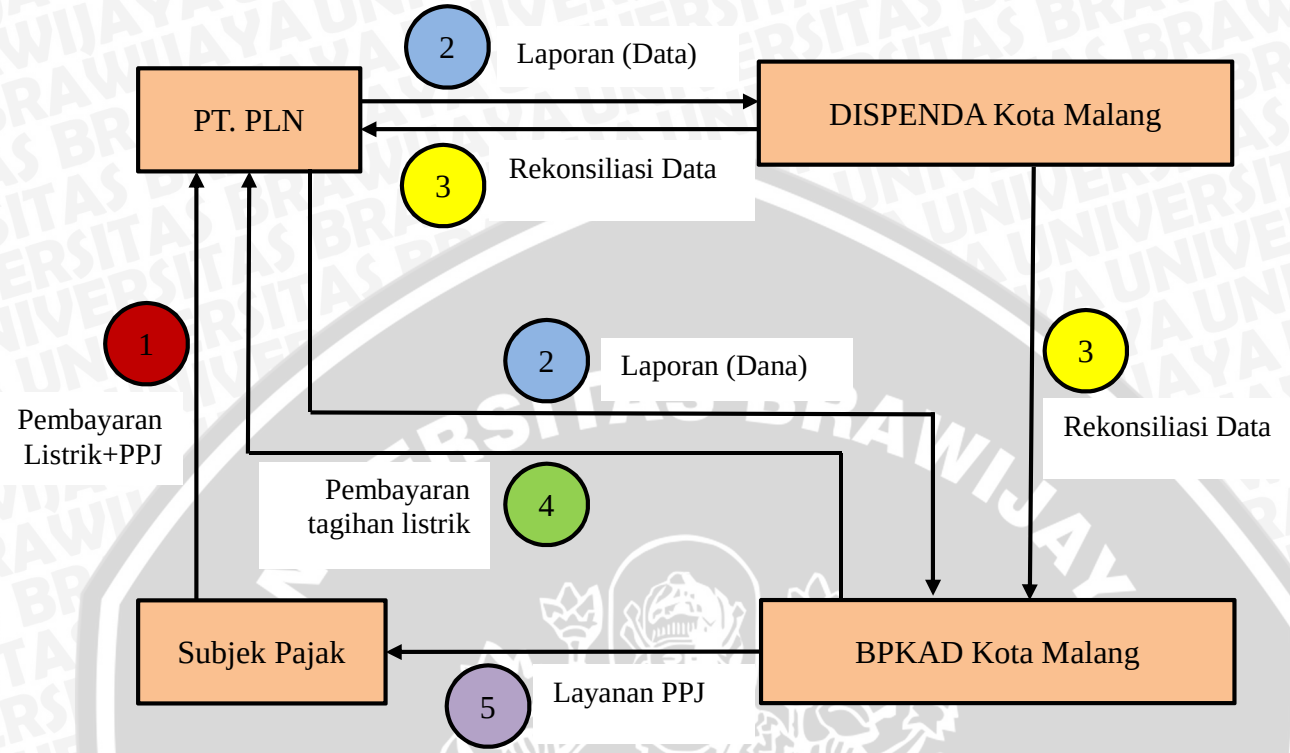
Area Malang sebagai peranan mitra hanya menjalankan pelayanan untuk pemungutan pajak penerangan jalan saja, maka peranan pemerintah yang dituntut sebagai *regulator* tentunya.

Dalam penerapan *Public Private Partnership (PPP)* ini memiliki beberapa tipe. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, tipe yang diterapkan dalam kemitraan antara pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang adalah bentuk kotrak pelayanan *(service contract)* merupakan bentuk *Public Private Partnership* yang menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari investasi maupun fasilitator dan *regulator*. Pemerintah bertindak sebagai pengadaan infrastruktur dan penjamin kualitas jasa layanan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai penyedia jasa. Hal ini sesuai dalam buku *Public-Private Partnership for Sustainable Development* (2002: 26), yang dikutip oleh Irawan (2004:21) bahwa *Operation Maintenance and Management Contract Services* yaitu model kerjasama yang dilakukan dengan membuat kontrak kerja antara pihak publik dengan pihak swasta atau mitra untuk menyediakan, menyelenggarakan, dan mengatur fasilitas dari pelayanan publik.

Langkah penerapan *Public Private Partnership* merupakan proses pembenahan peran tiga komponen yang terdiri dari pemerintah, swasta (mitra), dan masyarakat. Hal ini mempertegas dibutuhkannya perencanaan yang matang oleh pemerintah sebagai landasan dalam memulai *Public Private Partnership.* Penerapan ini tidak otomatis memberikan hasil yang diharapkan, sehingga perlu ada strategi yang jelas untuk mengantisipasi kendala dan resiko yang mungkin

muncul. Sebagai suatu proses, *Public Private Partnership* merupakan siklus yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan *(input)* hingga ke tahap impelementasi dan money *(output)* yang menghasilkan pemasukan kembali untuk memperbaiki *input*. Pada tahap *input, Public Private Partnership* diawali oleh kegiatan identifikasi kebutuhan yang mencakup pemetaan potensi, masalah, kepentingan, dan fasilitas pelayanan publik yang akan dikelola. Hasilnya berupa kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk melandasi proses realisasi *Public Private Partnership* secara substantif maupun administratif.

Dimensi substantif antara lain mencakup kriteria dan metode untuk memilih mitra, jenis pelayanan yang akan dikelola, penentuan kriteria evaluasi, dan metode pelibatan publik untuk menjamin akuntabilitas proses. Dimensi substantif ini menjelaskan penentuan dari pemerintah kota atas pelayanan publik yang akan dikelola PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Sesuai dengan konsep *Public Private Partnership* ini menjelaskan penerapan yang diambil oleh pemerintah untuk melibatkan mitra dan masyarakat dalam porsi yang sama. Sementara dimensi administratif mencakup prosedur dan mekanisme yang ditempuh dalam merealisasikan perjanjian kemitraan tersebut. Prosedur dan mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan ini sebagai tahap dimensi administratif yang akan secara detail.



Gambar 4.4 Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016.

Penjelasan skema prosedur pemungutan pajak penerangan jalan diatas sebagai berikut:

1. Subjek pajak yang terdiri dari masyarakat, industri, dan pemerintah sendiri melakukan pembayaran pajak penerangan jalan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Hal ini menjadi kewajiban semua subjek pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang itu sendiri.Pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan sistem beban pajak penerangan jalan yang akan ditambahkan dengan tenaga listrik yang dipergunakan setiap bulan oleh subjek pajak.

2. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang akan menerima pembayaran listrik dari masyarakat dan membuat laporan dari hasil pemungutan tersebut. Kemudian pada setiap tanggal 20 perbulan, dari hasil pemungutan dan hasil laporan tersebut. Selanjutnya, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang berkewajiban menyerahkan laporan berupa data kepada Dinas Pendapatan Kota Malang, mengingat Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang sebagai penanggung jawab teknis yang telah ditunjuk dalam perjanjian kerjasama mewakili pemerintah kota. Pelaporan tersebut terdapat 3 (tiga) lembar terdiri dari: (periode Februari 2016)
    a. Surat Pengantar kepada Walikota Malang yang juga tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang bulan Januari 2016 (terlampir)
    b. Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bulan Januari 2016 (terlampir)
    c. Berita acara rekonsiliasi bulan Januari 2016 (terlampir)
    d. Nota Kredit atau laporan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum bulan Januari 2016 (terlampir)

    Dari hasil laporan berupa data yang diperoleh tersebut akan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan hasil pemungutan akan dikirim ke rekening Kas milik Pemerintah Kota Malang yang dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku badan yang melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan dan

aset daerah Kota Malang beserta hasil laporan yang sama dikirim pula ke Dinas Pendapatan Daerah tersebut.

3. Setelah proses PLN menyerahkan laporan bulanan kepada Dinas Pendapatan Daerah, kemudian tugas dari Dinas Pendapatan Daerah adalah melakukan rekonsiliasi dan melaporkan rekapitulasi dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tersebut ke pemerintah kota. Pelaporan ini tentunya dilakukakn secara periodik sesuai dengan periode yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Rekonsiliasi ini merupakan proses pencocokan antara jumlah pelanggan dengan hasil pemungutan yang diterima. Dari hasil rekonsiliasi tersebut juga akan diperoleh evaluasi dari bulan ke bulan untuk pencapaian target yang telah ditentukan sendiri oleh Dinas Pendapatan Daerah. Jika terdapat permasalahan kurang bayar dengan beberapa permasalahan yang muncul juga harus ditinjau apakah kurang bayar tersebut sesuai dengan data. Dinas Pendapatan Kota Malang juga melakukan pencatatan peningkatan pendapatan dari sektor pajak penerangan jalan agar mengetahui pencapaian target pendapatan pajak pada tahun bersangkutan, serta menjadikannya sebagai tolak ukur dalam penetapan target pendapatan dari pajak penerangan jalan untuk tahun berikutnya.

   Proses rekonsiliasi ini juga dimaksudkan untuk pengkonfirmasian kembali dari pihak Dinas Pendapatan Kota Malang yang ditujukan kepada (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan BPKAD Kota Malang bahwa laporan dan hasil pemungutan yang telah diterima sudah sesuai atau masih

terdapat masalah kurang bayar. Jika laporan terdapat permasalahan maka akan dilakukan pengecekan ulang oleh pihak PLN. Sehingga terjadi sebuah koordinasi dan komunikasi dua arah diantara kedua belah pihak disetiap bulan.

4. Pemerintah kota menjalankan konsekuensi perjanjian, sebagai penanggungjawab teknis mewakili dari pemerintah kota adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dari hasil tagihan pajak penerangan jalan, yang menjadi hak pemerintah kota adalah sebesar 95% dari tagihan pajak penerangan jalan setiap bulan dan sisanya 5% digunakan untuk biaya operasional. Dana yang menjadi hak penerimaan pemerintah kota harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sesuai pada tahap yang kedua diatas selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 setiap bulan. Kewajiban pemerintah kota yaitu membayar tagihan listrik atas penggunaan listrik pada bangunan dan penerangan jalan umum kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan cara memotong 95% dari penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan, sehingga sisa hasil pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 5% ini yang dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah dari pajak penerangan jalan.
5. Pada tahap ini menunjukkan adanya hubungan dari pemerintah kota kepada masyarakat. Ini merupakan timbal balik pemerintah kota kepada masyarakat dalam bentuk pelayaanan atas penerangan jalan umum dan pembayaran rekening atas gedung yang digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan

masyarakat seperti gedung-gedung pemerintahan, perpustakaan, terminal, puskesmas, dan lain-lain yang merupakan sarana dan prasarana umum. Sarana umum ini disediakan pemerintah kota dan perawatannya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Ini sebagai bentuk pelayanan yang bisa digunakan dan dinikmati masyarakat dari pembayaran pajak penerangan jalan. Dalam skema gambar tersebut juga bisa disimpulkan bahwa pemerintah adalah dari masyarakat kepada masyarakat.

b. Peranan Aktor Kemitraan dalam Proses Pemungutan PPJ di Kota Malang

Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* seperti yang diharapkan tidaklah bisa tercapai tanpa adanya partisipasi atau kerja sama yang baik pula dari aktor-aktor didalamnya. Aktor-aktor yang dimaksudkan tersebut ialah pemerintah, mitra, dan masyarakat. Dalam proses kerjasama atau kemitraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini juga akan terlaksana dengan baik apabila adanya dorongan kerja sama dari ketiga pihak tersebut.

1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Kota Malang merupakan daerah yang memiliki perkembangan yang cukup baik, selain didukung karakteristik pendidikan yang cukup tinggi. Kota ini memiliki kemampuan pengelolaan rumah tangga yang baik pula. Sejak diberlakukannya otonomi daerah tidak membuat kinerja pemerintah kota Malang menurun atau adaptasi yang membutuhkan waktu yang lama. Melainkan dengan waktu cukup singkat mampu melaksanakan otonomi daerah sesuai peraturan yang berlaku. Menurut perundang-undangan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan keuangan daerahnya melakukan perbaikan dibidang pembangunan dan penyesuaian kebutuhan daerah. Penjelasan Undang-undang tersebut menekankan secara rinci mengenai batas-batas penerimaan daerah, sehingga keluarnya Undang-undang Nomot 34 Tahun 200 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah diperbarui yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang tersebut dapat memberikan solusi yang praktif dalam pembiayaan daerah. Salah satunya dengan memberikan hak memungut pajak dan retribusi, dengan harapan setiap daerah mampu melakukan peningkatan dalam pemungutan pajak sehingga mampu pula memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakatnya. Berbagai pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa menjadi pendapatan daerah telah tertulis jelas dalam undang-undang. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini salah satu jenis pajak daerah yang menjadi upaya peluang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan pendapatan asli daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Kota Malang Hak penuh dalam pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) telah diberikan pemerintah Kota kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Negara (Mardiasmo, 2006:22) yang menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten.

Sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara Dinas Pendapatan Kota Malang antara PT. PLN pada pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak pemerintah memiliki peran utama sebagai pengawas pelaksanaan, pengatur *(regulator),* dan penanggungjawab pemungutan pajak penerangan jalan. Peran pemerintah sebagai *regulator* atau pengatur juga tertulis bahwa perjanjian tetap berlaku walaupun ada perubahan tarif pajak maupun kenaikan nilai jual listrik tidak perlu perjanjian baru atau penambahan pasal yang mengatur perubahan tersebut.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat ketetapan apabila terjadi perubahan tarif PPJ serta target tahunan yang harus dicapai sesuai dengan yang ada pada Perjanjian Kerja Sama pasal 8 tentang kewajiban pihak Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran rekening listrik setiap bulan setelah menerima informasi tagihan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian PPJ, dasar hukum kewenangan (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, besaran tarif PPJ dan kerjasama kedua belah pihak.

Sesuai dengan tugas utama yang diemban Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu melakukan pengawasan dan *regulator* dalam pelaksaan pemungutan pajak. Maka berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa:

1. Sebagai pengawas

Pemerintah kota merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam urusan kepemerintahan yaitu pajak daerah, maka dalam jalannya pelaksanaan proses pemungutan pajak penerangan jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu melakukan pengawasan. Pemerintah Kota Malang untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan sektor mitra yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efetifitas dan efisiensi pemungutan dan pelayanan pajak serta menciptakan *good governance*. Peran pemerintah sangat besar dalam penerapan *good governance*, dimana pemerintah memiliki peran sebagai pengawas untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.

Pengawasan sangat diperlukan dalam pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pengawasan juga dilaksanakan agar pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan baik dalam hal sistem maupun prosedurnya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pengawasan ini tentunya mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati. Dan juga dikarenakan Pemerintah Kota ini menitipkan pelayanan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, maka perlu dilakukan pengamatan langsung agar berlangsungnya proses pemungutan pajak penerangan jalan ini masing-masing pihak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai yang ada pada Perjanjian Kerja Sama. Hal ini juga dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota malang dapat memacu kinerja yang lebih baik sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai bahkan melebihi target.

2. Sebagai *regulator* (pembuat kebijakan) dan fasilitator

Peranan pemerintah dalam pemungutan pajak penerangan jalan ini sebagai *regulator* atau pembuat kebijakan. Dalam penyajian data peranan pemerintah ini digambarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002. Kebijakan peraturan daerah ini cukup kondusif dalam menciptakan lingkungan hukum dan politik dengan pemilihan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai mitra kerjasama pemungutan pajak penerangan jalan serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Kebijakan melalui peraturan daerah ini menuntut pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi, efektif, dan partisipatif. Prinsip transparansi yang dimaksud bahwa dalam pasal 6 mengenai tarif pajak harus memiliki perhitungan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan melakukan pelaporan terhadap pihak pemantau atau pengawas yang telah ditunjuk dalam pasal 10. Sebaliknya pemerintah juga harus transparan terhadap masyarakat mengenai penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak penerangan jalan. Prinsip efektif memiliki arti efektif dalam pemungutan pajak penerangan jalan, yang berasal dari tenaga listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang langsung dipungut pihak PLN dan dari non PLN telah ditunjuk pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Prinsip partisipatif ini ditekankan pada pihak pemerintah untuk mempertimbangkan rasio kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, agar tidak memberatkan masyarakat atas tarif pajak yang dipungut dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk wajib pajak melalui berbagai media. Serta hal yang penting diharapkan penerimaan pemungutan pajak ini digunakan untuk

pembangunan daerah dan perawatan sarana prasarana yang terkait atas pajak yang dipungut seperti penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas umum lainnya.

Sedangkan fungsi pemerintah sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan berperan serta aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial. Peran pemerintah mengedepankan konsep *"empowernment"* dan *"customer focus"*, artinya pemerintah yang melakukan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan bertanggungjawab terhadap perawatan sarana dan prasarana tersebut serta digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang. Sarana dan prasarana ini merupakan salah satu bentuk pelayanan umum yang langsung bisa dirasakan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam pelaku ekonomi-sosial yang terbukti dari loket-loket pembayaran tagihan listrik di semua kelurahan yang ada di Kota Malang. Program ini berjalan sejak perjanjian kerjasama dari kedua belah pihak diadakan yaitu pada tahun 2000. Pengadaan ini dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, tetapi dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan memberdayakan masyarakat dan program ini berlangsung hingga sekarang.

3. Menentukan target PPJ

Dinas Pendapatan Daerah selaku pihak dari pemerintah akan melakukan rapat bersama dengan pejabat pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tarif atau menentukan target dalam 1 (satu) tahun yang akan dicapai pemerintah. Hal ini menjadi kewajiban utama Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang bersama pemerintah kota untuk melakukan rapat rutin. Dari hasil rapat tersebut Dinas

Pendapatan Daerah atau Pemerintah Kota wajib memberitahukan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

Kebijakan mengenai target yang akan ditetapkan ini tentunya dengan kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan agar adanya peningkatan kualitas kinerja dengan selalu dilakukan peningkatan target dari tahu ke tahun. Selain itu tentunya juga upaya ini dilakukan agar pendapatan asli daerah Kota Malang selalu bertambah sehingga dapat melakukan peningkatan kemampuan daerah dan penyediaan fasilitas yang semakin baik pula kepada masyarakat.

4. Menerima dan menghimpun data PPJ

Setiap tanggal 20 PT. PLN akan mengirimkan laporan hasil pemungutan berupa rekapitulasi kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara bersamaan dihari yang sama. Sedangkan hasil pemungutannya akan dikirim ke rekening Kas daerah miliki pemerintah yang dikelola BPKAD sebagai badan pemerintah yang bertugas sebagai pengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari laporan rekapitulasi Dinas Pendapatan Daerah akan menghimpun data pendapatan pajak penerangan jalan dan membukukan laporan 1 bulan sekali secara online.

5. Koordinasi dan rekonsiliasi (pencocokan)

Setelah laporan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, Dispenda akan melakukan rekonsiliasi atau proses pencocokan data antara jumlah pelanggan dan jumlah perolehan pajak penerangan jalan. Dari proses ini akan diketahui kendala yang biasanya berupa kurang bayar. Kurang bayar yang disebabkan banyak hal berupa

rumah atau toko yang sudah pindah atau tidak dihuni lagi sehingga terjadi tidak adanya transaksi pembayaran dari pelanggan, keterlambatan subjek pajak membayar, dan pembayaran yang dilakukan setelah pelaporan PT. PLN. Hal ini akan dilakukan pencocokan oleh Dispenda dan kemudian hasilnya akan dikonfirmasikan kembali kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan BPKAD Kota Malang adanya kendala tersebut. Sehingga Dispenda berperan sebagai koordinator dalam proses berlangsungnya pemungutan pajak penerangan jalan.

2. Peranan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Peran mitra sangat diharapkan pemerintah dalam upaya pengembangan daerah. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak mitra untuk membangun daerah dan melakukan peningkatan di berbagai sektor. Hal ini jelas tidak lepas dari penyelenggaraan *good governance* di setiap daerah. Maka dari itu peran mitra memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di daerah terutama di Kota Malang.

Sesuai dengan hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pihak mitra pada Perjanjian Kerja Sama pada pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan) memiliki peran utama sebagai penyedia pelayanan untuk memungut pajak penerangan jalan dari pelanggannya dan menyetorkan hasil pemungutan dan laporan pajak penerangan jalan kepada pemerintah. Sehingga dalam sistem kerjasama ini, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menjalankan salah satu peranan pemerintah untuk memungut pajak penerangan jalan dari masyarakat. Sistm pelayanan yang hanya akan dilakukan oleh PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang saja. Maka berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peran dari PT. PLN dapat diketahui bahwa:

1. Pemberi pelayanan

PT. PLN merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang penyedia listrik, memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melakukan penagihan atas listrik yang dipakai oleh subjek pajak atau pelanggan. Jadi dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memang sengaja menggandeng dan mengajak kerja sama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dalam hal pemungutan pajak penerangan jalan. Pemerintah berharap dengan pelayanan penarikan listrik yang selama ini diberikan kepada masyarakat dan diberikan pula dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang mengemban tugas dari pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaiknya kepada masyarkat sehingga proses pemungutan pajak penerangan jalan yang merupakan pendapatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik pula. Dengan cara memberikan informasi tagihan listrik dan pajak yang dihitung sesuai dari penggunaan listrik yang dibayar setiap bulan.

2. Melakukan pelaporan

Setelah tagihan terbayar, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang akan melakukan pencatatan yang kemudian pada setiap tanggal 20 hasil pemungutan dan laporan rekapitulasi tersebut akan dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD. Pada intinya, proses ini menunjukkan bahwa PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang mempunyai peran untuk mengelola hasil pemungutan yang masuk ke PLN dan kemudian dari hasil pengelolaan tersebut akan dilakukan pencatatan. Pencatatan yang dikirim berupa rekapitulasi hasil pemungutan pajak. Hal ini merupakan kewajiban PLN setia bulan sebagai penyetoran yang sudah diperoleh dari hasil kinerjanya setiap bulan.

3. Meningkatkan kualitas

PT. PLN sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat harus terus dapat meningkatkan mutu pelayanannya mengingat jumlah pelanggan yang semakin bertambah setiap tahun. Sebab pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang akan menentukan pendapatan yang bisa diperoleh. Dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan yang diperoleh pemerintah juga semakin meningkat, maka pemyediaan sarana dan prasarana, seta fasilitas kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan kesejahteraan masyarakat pun dapat dicapai.

Resiko yang terjadi dalam proses pemungutan pajak penerangan jalan secara teknis menjadi tanggung jawab peran mitra dalam pemungutan pajak penerangan jalan dimana penerangan jalan umum ini digunakan untuk penerangan kota dan salah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh pemerintah kota. Secara resiko yang diperankan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang memiliki tingkatan resiko yang cukup tinggi. Dari segi pelayanan listrik yang ditanggung penuh oleh pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, misalnya pemadaman yang dikarenakan adanya trafo yang rusak, pemadaman bergilir karena daya watt yang terbatas, penerangan jalan umum yang

rusak harus diperbaiki serta penerangan jalan umum yang secara bersamaan ikut mati dalam pemadaman bila dilihat dari teknis. Khusus pada pemungutan penerangan jalan, subjek pajak yang membayar terlambat dipegang penuh oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, serta harus mampu mencapai target yang diinginkan pemerintah kota atas pemungutan pajak penerangan jalan dalam setahun. Pelaporan terperinci atas pajak peneranganjalan harus dilakukan secara transparan dan profesionalitas yang dijunjung tinggi dalam kemitraan ini. Input dari masyarakat juga merupakan tanggung jawab dari pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Dengan demikian PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang bukan hanya selaku pihak yang melaksanakan pemungutan pajak penerangan jalan saja, disisi lain PT. PLN juga memberikan pelayanan atas rekening penggunaan tenaga listrik juga sekaligus pemungutan pajak kepada pelanggan di Kota Malang. Jelas kemitraan ini membawa manfaat bagi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang karena tidak hanya mendapatkan pemasukan atau menghasilkan profit, tetapi juga memungkinkan meningkatkan kualitas jasa pelayanan yang diberikan, memperluas jaringan calon pelanggan dan wajib pajak, dan menciptakan hubungan yang lebih baik lagi dengan *stakeholder* yang terkait yaitu pemerintah sebagai mitra kerjasama dan partisipasi masyarakat sebagai pelanggan dan wajib pajak.

3. Peranan Masyarakat

Masyarakat juga merupakan bagian atau indikator penting yang menjadi pelaku atau aktor dalam pelaksanaan *good governance.* Peran masyarakat yang selama ini sebagai objek pembangunan pemerintah harus diubah menjadi subjek pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dan menanamkan jiwa kewirausahaan. Peran masyarakat dapat dibuktikan dari berbagai segi baik peningkatan pelayanan, peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan, partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Masyarakat memiliki peran yang kompleks, tanpa peran masyarakat yang tinggi pemungutan pajak penerangan jalan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan dalam kemitraan ini atas penyelenggaraan *good governance*. Dari peningkatan kualitas pelayanan, peran masyarakat adalah memberi input yang positif baik kepada pemerintah kota maupun pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Maka berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peran sebagai masyarakat meliputi:

1. Wajib pajak

Peran masyarakat dalam pemungutan pajak penerangan jalan adalah sebagai wajib pajak, dimana masyarakat melakukan pembayaran pajak bersama rekening listrik perbulan atas penggunaan listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Jadi, kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat adalah tagihan rekening listrik perbulan, ditambah dengan pajak penerangan jalan sebesar 7% dari tagihan rekening listrik, dan jasa administrasi bank sebesar Rp. 2500,-. Hal ini merupakan sistematik yang dirancang PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk memberikan pelayanan yang sederhana dan mudah tanpa memakan waktu yang banyak. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam kemitraan atau kerjasama ini untuk memberikan input berupa saran, studi kasus di lapangan dan kualitas pelayanan yang diberikan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan.

2. Membayar tagihan

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam ketepatan waktu membayar tagihan juga sangat diharapkan agar segala kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap bulan juga dapat diproses dengan baik dan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Masyarakat diberikan kesempatan membayar tagihan dan pajak selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. Tingginya partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam kerja sama berdasarkan *good governance.*

Dalam peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan, peran masyarakat adalah sebagai pembayar pajak. Konteks ini telah dikoordinasikan dalam perjanjian kerjasama bahwa penagihan pajak penerangan jalan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Secara tidak sengaja masyarakat yang membayar rekening listrik sudah pasti juga membayar pajak. Hal ini memiliki tujuan agar pemabayaran pajak dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan menekankan masyarakat untuk patuh membayar pajak pada waktunya. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan dengan cara seperti ini, dua pembayaran dapat dilakukan dalam satu tahap transaksi. Namun pada kwitansi pembayaran rekening dan pajak penerangan jalan ini

masyarakat terkadang tidak memperhatikan dan bahkan tidak mengenal penggunaan pajak yang dipungut, serta batasan-batasan konsep penarikan pajak penerangan jalan itu sendiri. Peran masyarakat yang seperti ini harus diubah dengan cara mengubah pola perilaku masyarakat dan sosialisasi atas pajak penerangan jalan.

3. Kesadaran untuk ikut berpartisipasi secara aktif

Dalam hal ini peran masyarakat memberikan saran melalui media *website,* keluhan secara lisan kepada semua loket pembayaran atau masalah-masalah yang dialami pelanggan listrik dalam penggunaan listrik di masimg-masing rumah. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang memberikan pelayanan publik atas jaminan pemerintah daerah sehingga adanya unsur perbaikan dan evaluasi yang menjadi *feed back* atas input yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menekankan agar adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah dan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang itu sendiri dan menjadikan input yang diberikan sebagai parameter pelayanan yang dilakukan unit pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan. Hal ini merupakan nilai positif yang dapat diterapkan artinya masing-masing organisasi belajar satu sama lain untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pemungutan pajak penerangan jalan.

Pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga memberikan ruang publik dalam hal ini melalui *website* atas keluhan dan saran pelanggan serta ada pula di beberapa loket pembayaran yang terdekat dengan masyarakat yang bersangkutan. Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Area Malang ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan baik seperti apa yang diinginkan masyarakat. Sehingga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan Pemerintah Kota Malang dapat mengoreksi diri dan melakukan perubahan sistem ke arah yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai dari masyarakat kepada masyarakat pula dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak penerangan jalan, dilakukan dengan pembayaran rekening secara kolektif. Berawal dari dua pembayaran dalam satu tahap transaksi mampu dimanfaatkan baik oleh masyarakat. Sejak tahun 2000 sistem pembayaran yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menghasilkan sebuah inisiatif masyarakat melalui pembayaran rekening listrik secara kolektif di beberapa kelurahan, kecamatan, bahkan desa. Masyarakat mempunyai kesadaran untuk mencari cara yang lebih praktis dan kebersamaan dengan berkeliling didaerahnya menarik tagihan sehingga satu lingkungan kelurahan, kecamatan, atau desa pembayaran dihimpun menjadi satu dan baru disetor ke PLN.

Selain itu, sekarang ini juga sudah ada bentuk dari partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan, yakni masyarakat yang ingin membuka usaha dengan membuka loket pembayaran listrik online yang bisa dilakukan dirumah. Program pemerintah yang sudah lama dengan membuka loket-loket pembayaran di setiap kelurahan ini bekerja sama dengan masyarakat dimana masyarakat itu sendiri sebagai pemberi pelayanan. Pembayaran melalui agen loket pembayaran secara online ini tentunya juga bekerja sama dengan bank tentunya. Hasilnya cukup efisien

dan efektif, mengingat jumlah loket yang ada di Kantor Pelayanan PLN tidak memadai bila dilihat dengan peningkatan jumlah pelanggan. Program ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan masyarakat tidak harus mengantri panjang hanya untuk melakukan pembayaran di loket-loket. Banyaknya usaha seperti ini, tentunya wajib pajak atau pelanggan akan sangat merasa dipermudah dalam hal pembayaran listrik. Masyarakat diikut sertakan agar masyarakat mampu untuk berjiwa mandiri dan berwirausaha Hal ini menunjukkan bentuk dari kemandirian masyarakat yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mendukung adanya roda perekonomian pemerintah Kota Malang.

Dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan atau bank untuk melakukan terobosan pembayaran rekening listrik online melalui transaksi online melalui transaksi bank dan layanan bank yang ditawarkan untuk memudahkan pelanggan yang memiliki kesibukan. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang melakukan program PPOB tetapi tidak melepas peran masyarakat bahkan memberikan peran masyarakat yang lebih menjanjikan untuk berwirausaha. Dalam PPOB *(Paymen Point Online Bank)* ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang melakukan kerjasama dengan beberapa bank dalam hal pembayaran rekening listrik dan pembayaran pajak. Pembayaran yang dilayani bank akan dikenakan baiay administrasi sebesar Rp. 2.500,-. sehingga sekarang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak memiliki loket pembayaran, semua sudah merupakan kerjasama dengan bank-bank. Tetapi peran masyarakat justru lebih terlibat dan lebih mendidik untuk berjiwa wirausaha. Masyarakat bisa

membuka usaha dengan memberikan modal atau investasi kepada bank dan berhak memungut pembayaran rekening secara kolektif, tetapi hanya sebesar modal yang diinvestasikan pada bank. Misalnya si A membayar rekening listrik sebesar Rp. 250.00,- kepada si pemilik usaha loket tersebut, otomatis modal yang diinvestasikan pada bank tersebut juga akan berkurang sebesar Rp. 250.000,-. Keuntungan yang didapat oleh si pemilik usaha loket berasal dari biaya administrasi yang dibayar si A sebesar Rp. 2.500,- tersebut, masalah sistem bagi hasilnya itu merupakan kesepakatan bank dengan si pemilik usaha loket, sedangkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak memiliki kuasa dalam hal tersebut.

Partisipasi masyarakat yang seperti ini yang diinginkan dalam penyelenggaraan *good governance*, sehingga masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan dan mengetahui arah kebijakan dari pemerintah serta dapat memberikan sebuah tolak ukur penilaian dari kualitas kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, input yang diharapkan dari masyarakat, mampu meningkatkan mutu pelayanan dan evaluasi perbaikan sistem serta pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kedepannya dalam koridor masalah yang terkait.

4. Menjaga fasilitas

Pemerintah berusaha menyediakan sarana, prasaran, dan fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, terutama dalam hal ini penerangan jalan umum (PJU). Agar fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah ini dapat terawat dengan baik, maka sebagai masyarakat tidak hanya berkewajiban membayar tagihan atas fasilitas yang diperoleh namun harus dapat menjaga fasilitas tersebut

dengan baik. Sehingga akan ada hubungan timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah dan PLN. Ada baiknya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan dan permohonan atas permohonan penerangan jalan umum jika terjadinya PJU yang padam dan apabila masih terdapat jalan yang yang tidak terjangkau oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat cukup besar, karena tidak membicarakan masyarakat yang bergelompok tetapi masyarakat yang perseorangan juga berhak untuk membuka usaha terhadap peluang yang diberikan akibat kemitraan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan kesinergisan antara input yang diberikan dengan output yang didapatkan dalam kerjasama ini. Pencapaian target yang direncanakan lebih mudah dicapai dan penggunaan dari penerimaan pajak penerangan jaln ini bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan diatas mengenai peran pemerintah yang tidak lagi dominan tetapi tetap penting untuk memberikan standar pelayanan dan perencanaan peningkatan penerimaan dari sektor pajak harus dicapai.

c. Pengembangan *Public Private Partnership* dalam sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang

Pengembangan *Public Private Partnership* dalam kerja sama atau kemitraan ini, bentuk *Public Private Partnership* yang diterapkan adalah *Operation Maintenance and Management Contract Services.* Hal ini sesuai dalam buku *Public-Private Partnership for Sustainable Development* (2002: 26), yang dikutip oleh Irawan (2004:21) bahwa kerjasama ini dilakukan dengan cara pembuatan

kontrak kerja antara pihak publik dengan pihak mitra dalam rangka menyediakan, menyelenggarakan, dan atau mengatur fasilitas dari pelayanan publik tertentu yang tetap dipegang oleh pihak publik. Sedangkan pihak mitra melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kerjasama ini pihak mitra yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang melakukan pelayanan pemungutan pajak penerangan jalan, dimana bentuk pelayanan yang diberikan dijamin oleh pemerintah Kota Malang.

Public Private Partnership memiliki tahap pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan yang erat antara pemerintah dan swasta (mitra). Pengembangan ini berorientasi pada daerah yang berdasarkan pada potensi masing-masing daerah dengan memperhatikan heterogenitas sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan struktur industri. Pada langkah ini sinergi antara tiga komponen pembangunan diarahkan untuk melakukan pembangunan yang berbasis kompetensi. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan *Public Private Partnership* adalah:

1. Dilakukannya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan yang dimaksud bahwa adanya sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan penggunaannya. Pajak penerangan jalan ini dikenakan atas bentuk fasilitas berupa penerangan lampu jalan, penerangan jalan rumah penerangan fasilitas umum, dan digunakan untuk perawatan infrastruktur yang sudah ada. Perbaikan ini juga harus menunjukkan sikap sadar pajak, dimana wajib pajak membayar pajak

selambat-lambatnya tanggal yang sudah ditentukan agar pendapatan terus meningkat dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

2. Kota Malang memiliki potensi dalam penggunaan listrik yang cukup tinggi. Pemerintah dan mitra harus mengetahui arah pengembangan yang dilakukan. Dari segi pengembangan pelayanan publik yang diberikan maupun kualitas insfrastruktur yang digunakan. Untuk pengadaan penerangan jalan umum bisa dipermudah, pelaksaan secara intensif perawatan atau infrastruktur yang sudah ada, pembaharuan proses pembayaran agar lebih mudah, peningkatan daya watt, pemasangan jaringan listrik dengan prosedur yang mudah dan biaya yang dikenakan tidak memberatkan masyarakat. Hal ini dapat memicu peran mitra melakukan perluasan jaringan.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk mencari sumber pembangkit tenaga listrik lain dan perluasan jaringan listrik agar semua daerah dapat terjangkau jaringan listrik. Sehingga dapat semakin meningkatkan jumlah pelanggan listrik dan dapat meningkatkan penerimaan pemungutan pajak penerangan jalan tentunya. Kota Malang hampir semuanya tertampung dalam jaringan listrik yang cukup baik, hanya saja dalam pemakaian listrik ini terkadang tidak seimbang. Pemakaian listrik yang berlebihan ini bisa menimbulkan banyak masalah seperti trafo meledak dan pemadaman bergilir yang sangat diresahkan warga selama ini. Masalah pemanfaatan sumber daya alam

ini harus menjadi sorotan pihak PT. PLN untuk lebih mempersiapkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan pemanfaatan sumber daya manusia sudah dipaparkan bahwa masyarakat yang selama ini menjadi objek pembangunan akan diubah menjadi subjek pembangunan. Artinya perubahan partisipasi masyarakat yang ikut membangun dan mengarahkan masyarakat untuk lebih terlibat. Masyarakat bisa menjadi aktor pelaku dalam pemberi pelayanan dengan membuka loket pembayaran online kepada pelanggan. Partisipasi masyarakat mengalami peningkatan pesat dari program yang dibuat oleh PT. PLN sebagai pemberi layanan pemungutan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan pengembangan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, pengembangan ini merupakan penerapan *Public Private Partnership,* peningkatan partisipasi masyarakat yang terus ditingkatkan yang berawal dari bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN ini. Bentuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui prosedur pembayaran ini juga merupakan bentuk kemitraan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan beberapa bank yang ada. Melalui PPOB *(Payment Point Online Bank)* ini dijelaskan bawha program yang dilakukan dikarenakan jumlah loket pembayaran yang dulunya terbatas sedangkan jumlah pelanggan listrik khususnya Kota Malang meningkat terus sebanyak kurang lebih 200.000 pelanggan setiap tahun. Program ini beradaptasi dari kebutuhan Kota Malang akan listrik yang terus meningkat.

Langkah ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk menghimpun pembayaran tenaga listrik dan mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan yang lebih efektif dan efisien serta akurat dalam perhitungannya. Program ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat lebih berpengaruh dan mendidik untuk berwirausaha. Penjabaran di penyajian data, bisa kita ambil kesimpulan hal ini memacu pertumbuhan ekonomi dan meletakkan peran masyarakat sebagaimana mestinya. Harapanyya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini terus berkembang dan dapat dioptimalkan.

Pengembangan yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam pemungutan pajak penerangan jalan juga dengan menerapkan konsep *Public Private Partnership*. Pengembangan yang dilakukan meliputi:

1. Memperluas basis penerimaan

   Seperti yang telah dijelasan pada penyajian data, terdapat banyak masalah yang muncul. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tidak dapat mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensi jumlah pelanggan listrik dikarenakan hal ini menjadi wewenang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, dimana identifikasi objek pajak berdasarkan penentuan pelanggan listrik baru. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai unit teknis pemungutan pajak penerangan jalan tidak dilibatkan dalam proses ini. Pemerintah kota hanya melakukan pencatatan dan pemutakhiran data berdasarkan laporan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang saja. Sedangkan untuk non PLN tidak menjadi masalah yang serius.

Hal ini yang perlu diperbaiki dalam pengembangan *Public Private Partnership* dalam sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Malang.

2. Memperkuat proses pemungutan

   Memperkuat proses yang dijelaskan adalah lebih menguatkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk pelaksaan teknis baik melalui Peraturan Daerah maupun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dengan piha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Agar terdapat batas-batas dan pembagian tugas yang jelas dalam kemitraan dan mampu bersikap profesional dari kedua belah pihak dalam menjalankan kemitraan. Tidak lepas dari peran pemerintah dalam penetapan kebijakan atas tarif dan target pajak harus bercermin pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat Kota Malang. hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Malang masih menjalankan perannya dalam wilayahnya belum ada dampak negatif yang berarti dari kebijakan tarif pajak penerangan jalan ini.

3. Meningkatkan pengawasan

   Melakukan pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan perbulan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Tetapi PT. PLN tidak melaporkan perhitungan pajak penerangan jalan untuk setiap wajib pajak dan tidak melaporkan jumlah pengguna listrik yang dikenakan pajak penerangan jalan. Hal ini yang menyebabkan ketidakpercayaan pemerintah kota terhadap rekapitulasi yang dilaporkan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Seharusnya ini yang perlu dihindari

dan diterapkannya transparansi laporan agar semuanya jelas dan terkendali serta menghindari sikap saling curiga. Biasanya laporan yang diberikan berupa tagihan pemerintah kota atas gedung dan penerangan jalan umum, sedangkan pendapatan dari pajak penerangan jalan hanya berupa nominal saja. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, dapat berdampak buruk pada hubungan kemitraan ini. Setidaknya pengawasan dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah kota untuk menghindari sikap saling menyalahkan dan saling curiga serta kehilangan kepercayaan yang menjadi kunci dalam kemitraan.

4. Peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

   Peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan terus dilakukan melalui koordinasi Pemerintah Kota Malang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Selama ini usaha-usaha peningkatan efisiensi administrasi dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang melalui prosedur pembayaran pajak penerangan jalan.

5. Peningkatan kapasitas penerimaan

   Peningkatan kapasitas penerimaan ini melalui perencanaan yang lebih baik. Proses ini juga didasarkan hubungan koordinasi antara kedua belah pihak dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Perencanaan yang dibuat merupakan input dari subjek pajak atau masyarakat, input yang bagus akan menghasilkan pelayanan yang optimal pula maka kapasitas penerimaan terus meningkat. Dalam perencanaan ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Timur Area Malang dan Pemerintah Kota Malang memang memiliki perencanaan masing-masing. Hal ini menunjukkan harus adanya *sharing* atau komunikasi yang intensif antara keduanya agar perencanaan yang dibuat masing-masing dapat tercapai.

Dengan melakukan pengembangan *Public Private Partnership* maka pengembangan daerah yang berbasis kompetensi diharapkan akan mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi serta kemampuan berkompetisi Kota Malang untuk bersaing dengan daerah lainnya. Dengan kemandirian ekonomi dan kemandirian berkompetisi tersebut, maka dengan sendirinya sumber penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pajak penerangan jalan akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam penggalian sumber penerimaan daerah.

Konsep *Public Private Partnership* memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, disisi lain peran mitra dalam penyedia pelayanan tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan regulasi yang menjamin standar pelayanan dan biaya yang tetap terjangkau bagi semua masyarakat pengguna jasa. Pemerintah menetapkan aturan dasar untuk menentukan *Public Private Partnership* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontrol pemerintah memang berkurang tetapi sebenarnya pemerintah tetap berperan penting dalam menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak mitra. Karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada di tangan pemerintah.

Penerapan *Public Private Partnership* ini memberikan banyak perbaikan yang positif khususnya pada pemungutan pajak penerangan jalan. Terutama pada tahun 2012 yang menjadi penyumbang terbesar untuk penerimaan APBD. Maka penerapan *Public Private Partnership* ini akan mampu semakin menyokong keberlangsungan proses pemungutan pajak penerangan jalan.

Pada tabel 4.2 mengenai Kontribusi Penerimaan PPJ terhadap Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2011-2015, penerimaan Pemerintah Kota Malang yang berasal dari pajak penerangan jalan ini terus meningkat. Pada tabel tersebut dari data yang diperoleh telah diolah oleh peneliti maka diperoleh data seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pemerintah kota dari tahun 2011 hingga 2015 berkisar sekitar 17,52%. Namun pada tahun 2011 memiliki presentase paling tinggi dari perolehan pajak penerangan jalan selama lima tahun sebesar 23,50%. Dari hasil presentase tersebut dapat disimpulkan pajak penerangan jalan sebenarnya merupakan pajak yang berpotensi tinggi menjadi sumber pendapatan daerah namun hasilnya yang tidak mencapai 25% ini menunjukkan bahwa proses pengelolaannya masih kurang maksimal.

Proses pemungutan yang dilaksanakan oleh dua pihak namun terbatasnya koordinasi dan komunikasi serta masyarakat yang masih belum sadar pajaklah yang menjadi penyebabnya. Padahal jika pemerintah dapat memanfaatkan pajak ini dengan diikuti hubungan kemitraan yang baik, perolehan pajak penerangan jalan dapat lebih banya daripada hasil tersebut. Sebab pajak penerangan jalan juga merupakan pajak yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah dibandingkan pajak-pajak lainnya. Namun disisi lain, pajak penerangan jalan selalu mengalami

peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2011 hingga 2015. Maka PT. PLN dan Pemerintah harus memilik keseriusan dalam mengembangkan penerapan *Public Private Partnership* dalam kerjasama atau kemitraan yang telah dijalin. Supaya penerapan *Public Private Partnership* ini dapat membawa dampak yang positif dan agar kedua belah pihak saling belajar atas nilai-nilai yang terkandung pada proses kerjasama.

Pada tabel 4.2 juga menunjukkan presentase penerimaan PPJ pada tahun 2011 hingga tahun 2015 yang meningkat namun diikut dengan meningkatnya pula total pendapatan daerah sehingga presentasi mengalai penurunan, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan selama ini menjadi kendala mendapat perbaikan yang lamban dan respon dari pihak pemerintah dan PLN sehingga efektifitas dan efisiensi sulit untuk dicapai. Kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan ini tergantung pemerintah untuk menekan pemakaian listrik gedung dan penerangan jalan umum. Sedangkan jumlah pelanggan yang semakin bertambah dapat dimanfaatkan sebab mampu memberikan kontribusi dalam kenaikan pajak penerangan jalan. Dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang harus segera melakukan perluasan jaringan dan perbaikan pelayanan untuk pemakaian tenaga listrik di Kota Malang.

Kemudian pada tabel 4.3 yang menunjukkan Laporan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap bulan pada tahun 2015, penerimaan dari bulan Januari sampai Desember cenderung tidak stabil dilihat dari terjadinya kenaikan dan penurunan secara acak. Tetapi pada bulan September, Dinas Pendapatan Daerah memutuskan untuk menaikkan target yang akan dicapai sebab pada bulan

tersebut diperkirakan target yang telah ditetapkan akan terpenuhi. Dan pada bulan November, penerimaan yang diperoleh sebesar 3.854.832.953,00 sudah mampu mencapai total 41.539.693.857,00 dari target yang sebelumnya yaitu sebesar 38.496.943.638,94. Hal ini dikarenakan pembayar yang terlambat dan menjadi tanggungan pemerintah Kota Malang. Padahal diketahui jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahun sekitar 200.000 pelanggan tetapi secara sistematin tidak terlihat lonjakan yang berarti dari penerimaan perbulannya. Hal ini disebabkan Dinas Pendapatan Daerah yang sulit melakukan pengawasan, dimana pelaporan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak mencantumkan daftar pelanggan, perhitungan pajak penerangan jalan pada setiap objek, dan daftar pelanggan yang mengalami keterlambatan menjadi sebuah unsur penting bagi pemerintah Kota Malang untuk melakukan peningkatan pemungutan PPJ dan target ditahun berikutnya juga sebagai evaluasi perbaikan mutu pelayanan serta menyusun perencanaan yang lebih matang dalam kemitraan ini. Hal inilah yang perlu dipakai untuk pembelajaran bagi pemerintah, swasta (mitra), dan masyarakat agar penerapan *Public Private Partnership* membawa keuntungan diberbagai sektor.

2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kemitraan dalam proses pemungutan PPJ di Kota Malang

Kerjasama atau kemitraan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang dilakukan ini mempunyai satu-satunya tujuan agar Pemerintah Kota Malang bisa mendapatkan pendapatan melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pemerintah Kota Malang

berharap dengan menggandeng PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sebagai rekan bermitra untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan dapat berjalan semakin efektif dan efisien. Namun, berdasarkan penyajian data dalam kerjasama masih ditemui faktor penghambat dan pendukung, yakni:

a. Faktor-faktor penghambat

Sesuai penyajian data dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat kemitraan dalam proses pemungutan ini, meliputi:

1. Terjadinya Kurang Bayar

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara, kegiatan rekonsiliasi atan pencocokan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan setiap bulan ini hampir menemui kasus seperti adanya “kurang bayar”. Hal ini terjadi biasanya disebabkan dari kelompok rumah tangga atau industri yang rumah atau toko yang penghuninya pindah atau sudah ditinggal lama dan tidak melakukan pembayaran kapada PLN. Selain itu, terdapat sumber permasalahan lainnya adanya pelanggan yang melakukan pembayaran diatas tanggal 20 setelah pelaporan oleh PLN kepada Dispenda. Sehingga pembayaran tidak masuk dalam laporan rekapitulasi PLN.

Seperti pada tabel 4.4 mengenai Laporan Rekonsiliasi Data Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bulan Desember 2015, dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang diperoleh hasil yang kurang dan lebih. Data yang kurang berasal dari kelompok rumah tangga sedangkan lebih berasal dari kelompok industri,

pemerintah, dan lain-lain. Terdapatnya data yang kurang ini diperoleh dari jumlah penerimaan sesuai dengan ketentuan berdasarkan jumlah pelanggan dan jumlah pelanggan dan jumlah rekening tidak sama dengan jumlah yang diterima pada bulan Desember 2015.

Dinas Pendapatan Daerah menduga hal ini disebabkan oleh kelompok rumah tangga atau bisnis yang telat dalam pembayaran, rumah atau toko yang sudah ditinggal atau pindah. Sehingga pelanggan yang tidak melakukan pembayaran tidak masuk pada laporan penerimaan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima Pemerintah Kota. Hal ini menjadi tugas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang untuk memenuhi kekurangan tersebut dan membayarkan kepada pemerinta kota.

Kendala yang dialami PLN dan Dispenda setiap bulan ini akan sangat mempengaruhi proses pemungutan dan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh. Apalagi hal tersebut terjadi hampir disetiap bulan. Maka dari itu, seharusnya yang dilakukan PLN dan Dinas Pendapatan Daerah adalah pengawasan terhadap subjek pajak atau pelanggannya. PLN harus melakukan penelusuran atas data pelanggan yang tidak melakukan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi serta peneguran baik kepada pelanggan yang tidak membayar maupun yang telat membayar. Pengawasan haru dilakukan oleh PLN karena selain mempengaruhi pajak penerangan jalan, hal ini juga akan mempengaruhi perolehan tagihan listrik yang diterima oleh PLN. Dari pemerintah harus ada tindakan tegas pula dalam menanggapi permasalahan tersebut, jangan hanya memasrahkan pada PLN. Sehingga hal tersebut akan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya

banyak kurang bayar setiap bulan. Ini akan merubah kebiasaan ditemui data yang kurang bayar tersebut serta menambah jumlah penerimaan pajak penerangan jalan.

2. Kesadaran masyarakat yang kurang mengenai penerangan jalan umum (PJU) tidak resmi (liar)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan munculnya berbagai permasalahan dalam bentuk pemasangan penerangan jalan umum tidak resmi atau liar ini cukup menjadi kendala bagi pemerintah. Penjelasan hal ini sudah dijelaskan melalui penyajian data bahwa kesadaran masyarakat yang kurang akan banyaknya penerangan jalan umum yang liar, menyebabkan pembengkakan pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah. Penerangan jalan umum yang liar ini akan merugikan pemerintah dalam perolehan pendapatan daerah.

Masalah ini berawal dari ketidakpercayaan Pemerintah Kota Malang atas rekening listrik yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Hal ini dikarenakan tidak dilampirkannya penghitungan pemakaian tenaga listrik yang rinci dan pemakaian penerangan jalan umum yang seharusnya dibayar atas pemakaian 12 jam akan tetapi yang harus dibayar 24 jam secara penuh oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga tarif yang dikenakan PLN kepada pemerintah sebesar dua kali lipat dari beban daya yang seharusnya.

Sebaiknya dalam faktor penghambat ini, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang harus melakukan koordinasi untuk merazia penerangan jalan umum yang liar ini. Tidak hanya itu saja, pemerintah kota juga seharusnya jangan

hanya memasrahkan urusan tersebut kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang saja. Harus ada saling kerjasama yang solid diantara keduanya dalam mengatasi permasalahan tersebut. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang harus mampu meningkatkan kegiatan razia dilapangan dan pemerintah melakukan pengawasan secara disiplin terhadap hal-hal yang dapat memicu terjadinya pemasangan penerangan jalan umum liar.

Hal ini jelas mampu memberikan nilai positif, disatu sisi pemerintah kota bisa melakukan penekanan pemakaian listrik dan penataan kota yang lebih baik lagi serta mampu mengurangi beban pembayaran rekening listrik dan juga mampu meningkatkan nilai nominal dari pemungutan pajak penerangan jalan. Inti yang menjadi solusi pada faktor penghambat ini adalah kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak dan keduanya merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sehingga tak hal ini tak bisa dihindari. Namun usaha yang telah dilakukan Pemerintah dan PLN untuk mengatasinya harus diimbangi dari campur tangan masyarakat yang sebaiknya semakin sadar dan peka untuk melaporkan kepada pemerintah atau PLN jika terdapat keluhan mengenai penerangan didaerahnya dan mencegah terjadinya pemasangan penerangan jalan umum tidak resmi ini.

3. Kurangnya konsistensi dalam melaksanakan kewajiban

Berdasarkan pemaparan yang ada pada penyajian data, seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang konsisten dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai perjanjian kemitraan ini. Apabila ada yang belum melaksanakan tanggung

jawabnya hendaknya ada koordinasi untuk melakukan pembahasan terhadap keluhan yang dirasakan masing-masing. Namun dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, kenyataanya hubungan koordinasi diantara keduanya dinilai masih minim dan bahkan Pemerintah Kota Malang hanya terkesan pada fokus pencapaian target dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang fokus mendapatkan keuntungan saja tanpa memikirkan bagaimana memberikan pelayanan atas pemakaian listrik dan pajak penerangan jalan yang lebih baik lagi.

Seperti pada tabel 4.5 mengenai Laporan Penerimaan PPJ pada bulan Januari 2016 dari PT. PLN yang disetorkan ke Dinas Pendapatan daerah tersebut terlihat PLN yang tidak menyampaikan daftar rekening listrik dan daftar nama pelanggan yang terlambat membayar secara rinci. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang hanya memberikan data secara keseluruhan berupa nominal mengenai penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kota Malang dalam satu bulan. Kurangnya koordinasi antara keduanya akan semakin memperparah kondisi yang seperti ini terus jika ketidak transparansian PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dalam memberikan data dibiarkan begitu saja. Padahal hal tersebut mempengaruhi Dinas Pendapatan Daerah dalam berupaya memperbaiki sistem pemungutan agar meningkatkan penerimaan dan menangani permasalahan yang muncul. Sehingga permasalahan PJU liar pun yang selalu muncul dalam tagihan masih sulit untuk dikendalikan dan dicegah sebab minimnya koordinasi keduanya dalam membahas permasalahan. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah juga kurang melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap tagihan yang

ditanggung serta kurangnya koordinasi untuk membahas permasalahan yang harus segera dilakukan penanganan.

Dilihat tidak adanya komunikasi dalam permasalahan tersebut juga dikarenakan adanya bentuk lembaga yang berbeda ini akan menyebabkan terdapat sekat atau batasan diantara keduanya jika ingin menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004:130) menegnai model kemitraan berdasarkan dunia organisme yaitu *Pseudo Partnership* (Kemitraan Semu) artinya persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak, namun sesungguhnya melakukan kerjasama secara berimbang satu dengan lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Dari sini diharapkan adanya hubungan koordinasi dan komunikasi yang terjalin lebih baik lagi dalam pemberian pelayanan ataupun perbaikan pemungutan pajak penerangan jalan, baik melalui pengadaan fasilitas umum, prosedur pemungutan pajak penerangan jalan, dan perbaikan sistem pelaporan pada pemungutan pajak penerangan jalan. Kedua belah pihak harus bisa menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, pengawasan, responsibilitas, dan akuntabilitas untuk mewujudkan *Public Private Partnership* dalam rangka *good governance*.

4. Tidak bisa saling intervensi atau campur tangan

Dari penyajian data yang disajikan oleh peneliti, kedua belah pihak yang masih kurang konsisten dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang yang kurang rinci dan transparan dalam memberikan data laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah juga kurang dalam melakukan pengawasan dalam mekanisme pemungutan dan pengecekan terhadap beban tagihan pemerintah. Terlihat dari masing-masing pihak masih kurang maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Namun, menanggapi hal tersebut masing-masing pihak tidak dapat saling melakukan campur tangan atau intervensi sebab keduanya merupakan badan atau lembaga yang berbeda yang tentunya mempunyai kebijakan dan kewenangan masing-masing dalam mengelola manajemennya. Adanya perbedaan bentuk kelembagaan dan mempunyai kebijakan masing-masing sehingga tidak dapat saling mengoreksi dan memberikan saran satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004:131-132) mengenai model kemitraan berdasarkan kehidupan organisasi pada umumnya yaitu *Subordinate Union of Partnership* yang artinya kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak yang memiliki status, kemampuan, dan kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada hubungan atas, bawah, kuat, lemah. Oleh karena itu, kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan, tidak adanya komunikasi dengan maksud untuk

lebih membangun akan menjadi penyebab kerjasama atau kemitraan ini dapat berlangsung dengan baik. Masing-masing juga mempunyai cara yang berbeda untuk menanggapi permasalahan.

Dari sini seharusnya dapat dibangun sebuah komunikasi yang lebih intens dan koordinasi yang baik. Ada baiknya memperbaiki hubungan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi sehingga tidak akan saling merasa tidak nyaman namun tidak dapat menyampaikan. Tujuannya juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Tentunya juga akan memperlancar proses pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ).

b. Faktor-faktor pendukung

Selain adanya hambatan atau kendala dalam berlangsungnya proses pemungutan pajak penerangan jalan, ada pula beberapa hal yang justru dapat mendorong keberhasilan pemungutan ini, meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat

Pada penyajian data, hal ini menjadi sebuah ide yang sangat baik untuk melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan ikut menjadi penggerak roda ekonomi serta mampu mendidik masyarakat berjiwa kewirausahaan. Harapannya dari kemitraan ini dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan dan opini masyarakat dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kemajuan negara. Suara masyarakat ini juga sebagai input pemberian pelayanan dan regulasi penetapan kemitraan diatas sehingga masyarakat mengerti dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dan ikut memelihara fasilitas umum. Pemerintah Kota Malang dan PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur Area Malang harus berbenah diri untuk melaksanakan kemitraan ini bukan lagi berbicara sistem pelaksanaan melainkan kualitas pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan dan dapat dilakukan dimana saja.

2. Adanya kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran

Terobosan yang sudah banyak dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang diikuti dengan kemajuan teknologi sekarang ini sangat mempermudah cara pembayaran yang bisa dilakukan masyarakat. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang telah bekerja sama dengan bank-bank untuk pembayaran melalui transaksi dan layanan bank dengan online, artinya masyarakat tidak perlu pergi ke loket milik PLN untuk melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di bank mana saja atau melalui layanan bank secara online. Selain itu, dibukanya peluang usaha untuk masyarakat membuka loket pembayaran online dirumah atau dimana saja juga tentunya masyarakat sangat diberi kemudahan dalam proses pembayaran. Hal ini sangat efektif dan efisien sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk proses pembayaran yang rumit.

Memang sudah seharusnya hal ini dilakukan PLN yang pada dasarnya merupakan perusahaan negara yang berlandaskan mencari keuntungan atau profit atas listrik yang sudah dijual. Yang harus terus dilakukan oleh PLN adalah terus meningkatkan kualitas kinerjanya, memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan pelayanan, sedangkan Pemerintah Kota dengan mendukung dan mengawasi bahkan ikut berkontribusi dalam semua usaha dan kemajuan sistem yang telah dilakukan PLN. Sehingga menjadi warga negara yang baik adalah warga negara yang

mendukung dan taat pada pajak. Dengan demikian, sistem pelayanan yang semakin maju akan mendukung kelancaran proses pemungutan.

3. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mempunyai target

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selalu menetapkan target pajak penerangan jalan (PPJ), biasanya target akan ditentukan pada saat rapat bersama pejabat Pemerintah Daerah yang lainnya. Hal ini tentunya bertujuan supaya pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang lebih dari tahun ke tahun dengan semakin meningkatkan kualitas kinerja pegawai secara maksimal. Dengan target tersebut, bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah Kota Malang dengan dibantu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Target yang ditetapkan disetiap awal tahun ini, akan berpengaruh besar terhadap kinerja Dispenda dan juga kualitas pelayanan yang akan diberikan PT. PLN sehingga akan mendukung pula terhadap kelancaran proses pemungutan dan pendapatan akan diperoleh pemerintah.

4. Adanya saling percaya dalam kerjasama

Disisi lain, walaupun faktor penghambat berupa ketidak konsistenan kinerja sesuai perjanjian kerjasama namun diantara kedua belah pihak ini terdapat saling kepercayaan. Hal ini terbukti dari kerjasama atau kemitraan yang sudah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun sejak perjanjian pertama kali dibuat. Kerjasama dan kemitraan yang berlangsung juga sejauh ini berjalan dengan sangat baik, terlihat tidak adanya konflik yang muncul. Hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan yang tinggi inilah yang selalu diharapkan dapat berjalan terus sehingga

menjadi sebuah jalan bagi Pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan pemasukan daerah.

5. Potensi di Daerah

Kota Malang merupakan kota yang sangat dinamis terlihat dari perkembangan pembangunan dan industri berkembang secara pesat. Harusnya hal ini yang bisa mendukung peningkatan pemungutan pajak penerangan jalan. Setiap tahunnya jumlah pelanggan PT. PLN terus bertambah. Saat sepert ini tidak boleh dilewatkan, ini merupakan waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan pemungutan yang efektif dan efisien serta melakukan penekanan biaya pemungutan. Penggalian potensi didaerah harus dikembangkan sejalan dengan pembangunan yang dinamis. Harapan Pemerintah Kota Malang dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang mampu menggali potensi daerah dan perbaikan sumber daya manusia dan aparatur. Terlebih dahulu kedua belak pihak yang mengerti kebutuhan Kota Malang dan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa membebani masyarakat sendiri. Inti dari pengembangan potensi ini adalah penerapan *Public Private Partnership* harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan saling melengkapi atas kelebihan yang dimiliki pemerintah dan pihak mitra. Apabila hal ini mampu dilaksanakan, kemandirian ekonomi dan kemampuan berkompetisi daerah dapat tercapai sehingga tidak tergantung lagi dengan pusat dan selalu memiliki inovasi untuk mengembangkan kemampuan daerah. Hal ini menjadikan cita-cita ekonomi daerah tercapai dan hubungan antara pemerintah, swasta (mitra), dan masyarakat dapar bersinergi dan harmonis dalam penyelenggaraan *good governance.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai pola kemitraan dalam pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses kemitraan sesuai pada Perjanjian Kerja Sama dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) dilakukan dengan 5 (lima) tahap yaitu:
   1) Subjek pajak melakukan pembayaran kepada PLN.
   2) PLN menerima pembayaran, dari pembayaran tersebut akan dicatat dalam laporan hasil rekapitulasi, kemudian PLN akan menyerahkan laporan rekapitulasi dan hasil pemungutan tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah (data) dan BPKAD (dana).
   3) Dinas Pendapatan Daerah akan melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data yang selanjutnya akan dilaporkan kembali hasil rekonsiliasi tersebut kepada PLN dan BPKAD.
   4) Dari hasil penerimaan yang diperoleh, BPKAD akan membayar tagihan listrik atas penggunaan listrik yang menjadi beban pemerintah Kota Malang kepada PLN sesuai tagihan.

5) Tahap terakhir merupakan *feed back* atau timbal balik Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat berupa pelayanan dan penyediaan fasilitas atas pajak dan tagihan listrik yang sudah dibayar masyarakat.

2. Peranan ketiga pihak sebagai berikut:

1) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, walaupun dalam proses pemungutannya diserahkan kepada pihak mitra yaitu PT. PLN. Tetapi dalam implementasinya peran Dinas Pendapatan Daerah masih lemah dalam menjalankan perannya. Pihak mitra malah lebih terlihat banyak berperan secara prosedural pemungutan dan penentuan sistem pelayanan. Kurangnya pengawasan terhadap objek pajak, mekanisme pemungutan, *cross-check* terhadap tagihan listrik yang ditanggung pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang jelas untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul dapat menghambat proses pemungutan pajak penerangan jalan dan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat.

2) Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, PT. PLN juga mempunyai fungsi sebagai penyedia pelayanan kepada subjek pajak dan melakukan penagihan, namun pada kenyataannya pihak mitra (PT. PLN) belum mampu memenuhi kewajibannya untuk pelaksanaan *Public Private Partership.* PT. PLN tidak melaksanakan pelaporan secara berkala sesuai yang telah disepakati sebelumnya pada perjanjian kerjasama. PT. PLN belum bisa melaporkan daftar rekening listrik sebagai dasar

penetapan besarnya pajak yang terhutang, dan daftar keterlambatan pembayaran pelanggan serta perhitungan pajak penerangan jalan untuk setiap pembayar pajak secara rinci. Selain itu, PT. PLN sulit melakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk menangani permasalahan yang muncul seperti penerangan jalan umum yang tidak resmi atau liar.

3) Kerjasama PT. PLN dengan bank yaitu PPOB *(Payment Point Online Bank)* ini mampu mengatasi beberapa kendala di PT. PLN sendiri untuk memungut pembayaran melihat loket pembayaran yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pelanggan tiap tahunnya. Cara atau metode yang dikembangkan PT. PLN ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pembayaran swadaya secara kolektif. Sehingga penghimpunan pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan prosedur yang telah ditentukan. Masyarakat juga harus memberikan input berupa kritik dan saran melalui *website* yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT. PLN dan penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang ikut serta sebagai penggerak roda ekonomi daerah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dalam rangka otonomi daerah.

3. Didalam *Memorandum of Understanding* dijelaskan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan menggunakan sistem *service contract.* Terlihat kerjasama ini dilakukan dengan cara pembuatan kontrak kerja antara pihak

publik dengan pihak mitra dalam rangka menyediakan, menyelenggarakan, dan atau mengatur fasilitas dari pelayanan publik tertentu yang tetap dipegang oleh pihak publik yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan pihak mitra (PT. PLN) melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada sistem *service contract* pelayanan yang diberikan pihak mitra ditentukan oleh kebijakan pemerintah kota. Dalam hal ini prosedur pemungutan pajak penerangan jalan ditentukan oleh pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan cara menggabungkan pembayaran rekening listrik dengan pemungutan pajak penerangan jalan dalam satu tahap transaksi atau sekali pembayaran.

4. Faktor penghambat dalam pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) adalah banyak terjadi kurang bayar, kesadaran masyarakat yang kurang mengenai penerangan jalan umum (PJU) tidak resmi (liar), kurangnya konsistensi masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, dan tidak bisa saling intervensi atau campur tangan masing-masing pihak. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi adanya partisipasi masyarakat, kemudahan dalam pembayaran, Dinas Pendapatan selalu mempunyai target pencapaian setiap tahun, adanya saling percaya dalam kerjasama, dan potensi di daerah.

B. Saran

1. Dalam proses kemitraan yang terjadi dilapangan, hubungan koordinasi yang sudah ada harus lebih ditingkatkan dan lebih sering dilakukan dalam penentuan rencana pemungutan pajak penerangan jalan, baik penerapan prosedur pemungutan dan pengembangan peningkatan kualitas kedua belah

pihak. Dinas Pendapatan Daerah justru harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan dan pelaporan yang dilakukan PT. PLN. Sementara bagi PT. PLN dapat melakukan pelaporan secara bertanggung jawab dan pengawasan terhadap infrastruktur listrik yang ada untuk menunjang penyediaan listrik di Kota Malang. Keduanya juga harus berkoordinasi untuk memberantas penerangan jalan umum liar ini sehingga dapat dikurangi dan penerimaan pajak penerangan jalan terus meningkat.

2. Peran pemerintah harus lebih dominan lagi, dimana pemungutan pajak penerangan jalan adalah wewenang pemerintah daerah sehingga terdapat keseimbangan wewenang di lapangan. Meskipun telah dilaksanakan kerjasama, tanggung jawab tetap berada ditangan Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Pendapatan Daerah baik penjamin kualitas pelayanan maupun pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk menjawab permasalahan yang muncul mengenai pelaporan data yang masih belum rinci yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dilakukan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat membuat sebuah Tim Khusus yang memang sengaja ditempatkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Tim Khusus ini mempunyai fungsi yang dikhususkan untuk melakukan pengawasan atau yang melakukan *crosscheck* langsung terhadap pelaporan data setiap bulan yang diterima Pemerintah Kota Malang, serta mungkin mampu melakukan pencatatan pelaporan data sendiri yang selama ini sulit diperoleh Pemerintah Kota Malang tanpa harus menunggu atau menyuruh PT. PLN

untuk melakukan hal tersebut. Sehingga fungsi pengawasan atas data yang diperoleh Pemerintah Kota Malang ini setiap bulan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sosialisasi pajak dan kewajiban sadar pajak harus terus digencarkan oleh pemerintah kota. Harapannya kedua belah pihak yang melakukan kerjasama ini mampu lebih konsisten dalam menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian kerjasama.

3. Peningkatan dan penyempurnaan *Memorandum of Understanding* yang sudah ada dimaksudkan agar pelaksanaan kewajiban masing-masing dan mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan dapat berjalan lancar sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Perlu pula adanya efektivitas dalam mempercepat alur dan prosedur pemungutan.
4. Saling belajar dan mengadopsi nilai-nilai yang baik dalam penyelenggaraan *good governance* bagi Dinas Pendapatan Daerah, seperti profesionalisme, saling terbuka atau transparansi, dan akuntabel atau bertanggungjawab. PT. PLN belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak hanya berfokus pada mendapatkan keuntungan. Masyarakat juga harus ikut serta berperan secara aktif dan mendukung dalam pembangunan dengan membayar kewajiban pajak tepat waktu, melaporkan dan menghindari tindakan pemasangan PJU liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Djam'an Satori, Aan Komariah. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Irawan, Ferry. 2004. Implementasi Public-Private Partnership di PT. Kereta Api Indonesia-Bandung. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Islamy, Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kaho, Josep Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Kumar, Sasi, dan C. Jayasankar Prasad. 2004. "Public-Private Partnership in Urban Infrastructure". Dalam Kerala Calling, edisi Februari.

Kushandajani, 2001, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, dalam Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, PUSKODAK-UNDIP, Semarang.

Kushandajani. 2001. Good Governance dan Otonomi Daerah. Semarang: Puskodak UNDIP.

Luthfi, Muchtar. 2013. *Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan/SPBN Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara).* Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Marsiatanti, Dyah Yusi. 2011. *Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan).* Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana J. 1994. *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook (2nd ed).* Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

_____. 2014. *Qualitative data analysis: An Methods sourcebook* (3rd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Mindarti, Lely Indah. 2007. Revolusi Administrasi Publik-Aneka Pendekatan dan Teori Dasar. Malang: Bayumedia Publishing.

Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahutami, Angelina Ika. 2001. Public-Private Partnership: Suatu Solusi Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Berbasis Kompetensi. Semarang: Jurnal Ekonomi.

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik).* Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik.* Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional & CV. Sofa Mandiri.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulistiyani, AT. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Guava Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

United Nation Development Programme. 1997. *Participatory Local Governance, Local Inititif Facility For UrbanEnvironment Management Development Governance Division.* UNDP New York.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance " Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta.

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Lampiran 1 : Surat Pengantar kepada Walikota Malang yang juga tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang bulan Januari 2016



PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA MALANG

Jl. Basuki Rahmad No. 100 Malang
Telepon : (0341) 326034, 326035
Kode Pos : 65111
Faksimile : (0341) 362046
Email : pinmig@pln.co.id
Website : www.pln.co.id

Nomor :0097/KEU.03.01/AREA-MLG/2016
Surat Sdr. No. :
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Laporan Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

10 Februari 2016

Kepada Yth :
WALIKOTA MALANG
Jl. Tugu No. 1
di
Malang

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kota Malang untuk pemakaian rekening bulan Januari 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAJER

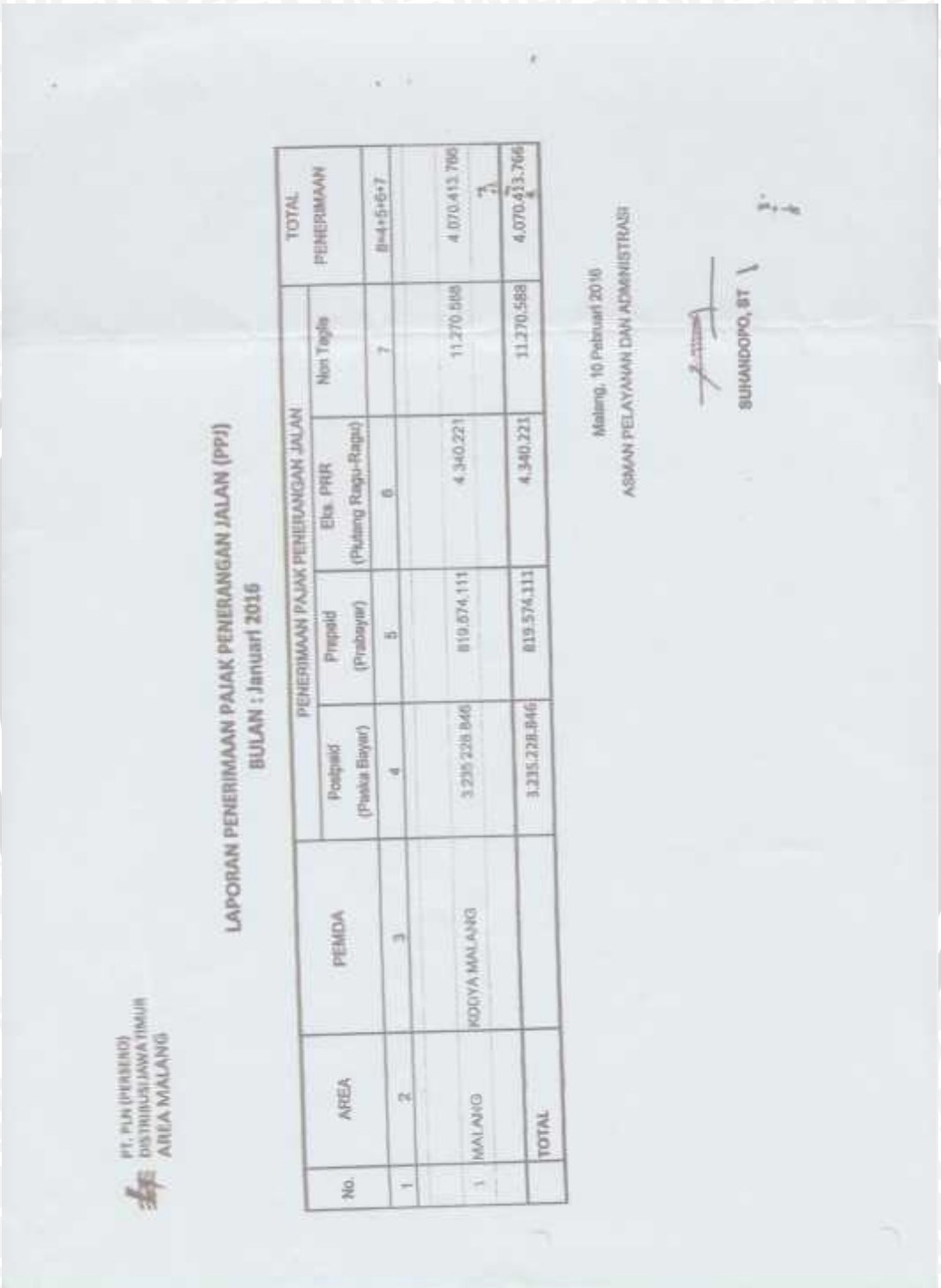
Ir. MOH. FAKHUL HAKIM

Tembusan :

- Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang.

Meterai No. 1001

Lampiran 2 : Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bulan Januari 2016



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA MALANG

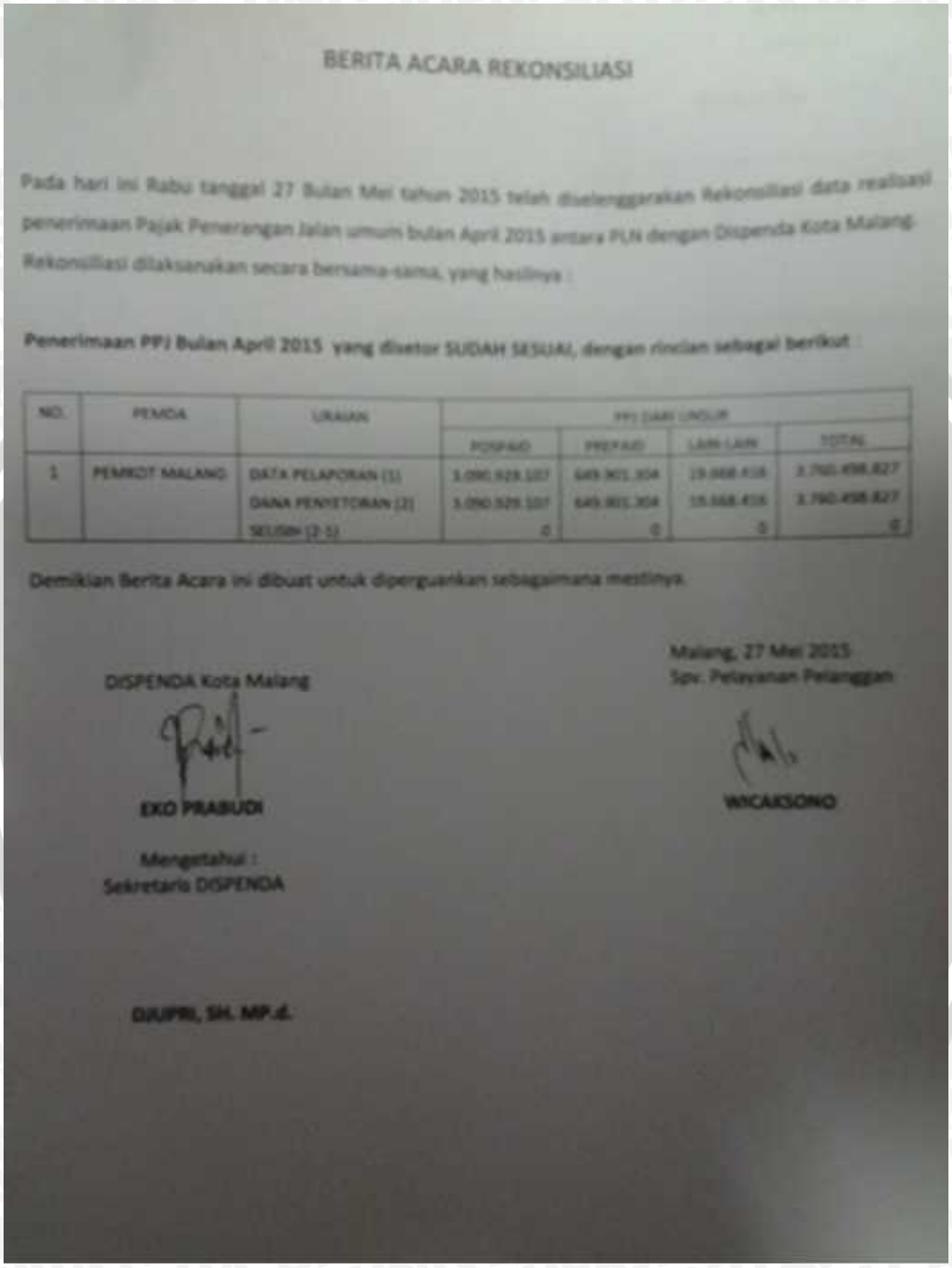
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)
BULAN : Januari 2016

No.	AREA	PEMDA	PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN				TOTAL PENERIMAAN
			Postpaid (Pasca Bayar)	Prepaid (Prabayar)	Eks. PRR (Pulang Ragu-Ragu)	Non Tagla	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	MALANG	KODYA MALANG	3.235.228.846	819.574.111	4.340.221	11.270.588	4.070.413.766
	TOTAL		3.235.228.846	819.574.111	4.340.221	11.270.588	4.070.413.766

Malang, 10 Pebruari 2016
ASMAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

SUHANDOPO, ST

Lampiran 3 : Berita acara rekonsiliasi bulan April 2015



BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Bulan Mei tahun 2015 telah diselenggarakan Rekonsiliasi data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan umum bulan April 2015 antara PLN dengan Dispenda Kota Malang. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya :

Penerimaan PPJ Bulan April 2015 yang disetor SUDAH SESUAI, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PEMDA	URAIAN	PPJ DARI UNSUR			
			POSPAID	PREPAID	LAIN-LAIN	TOTAL
1	PEMKOT MALANG	DATA PELAPORAN (1)	3.090.929.107	649.901.304	19.668.416	3.760.498.827
		DANA PENYETORAN (2)	3.090.929.107	649.901.304	19.668.416	3.760.498.827
		SELISIH (2-1)	0	0	0	0

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Mei 2015
Spv. Pelayanan Pelanggan

WICAKSONO

DISPENDA Kota Malang

EKO PRABUDI

Mengetahui :
Sekretaris DISPENDA

DJUPRI, SH. MP.d.

Lampiran 4 : Nota Kredit atau laporan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum bulan Januari 2016



NOTA DEBET KREDIT

bankjatim

Nota No.

Kepada : WALIKOTA MALANG (PAD)

Telah kami :
☐ Debet Rek. No. : 0041000266
☐ Kredit Rek. No. :

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
PELIMPAHAN KE REKENING SAUDARA ATAS BMRBCIJA PI.N		Rp 4.070.413.788,00
JUMLAH		Rp 4.070.413.788,00

Tanggal Valuta : MALANG, 18 Februari 2015

bankjatim

Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015

LAPORAN REALISASI PAJAK DAERAH

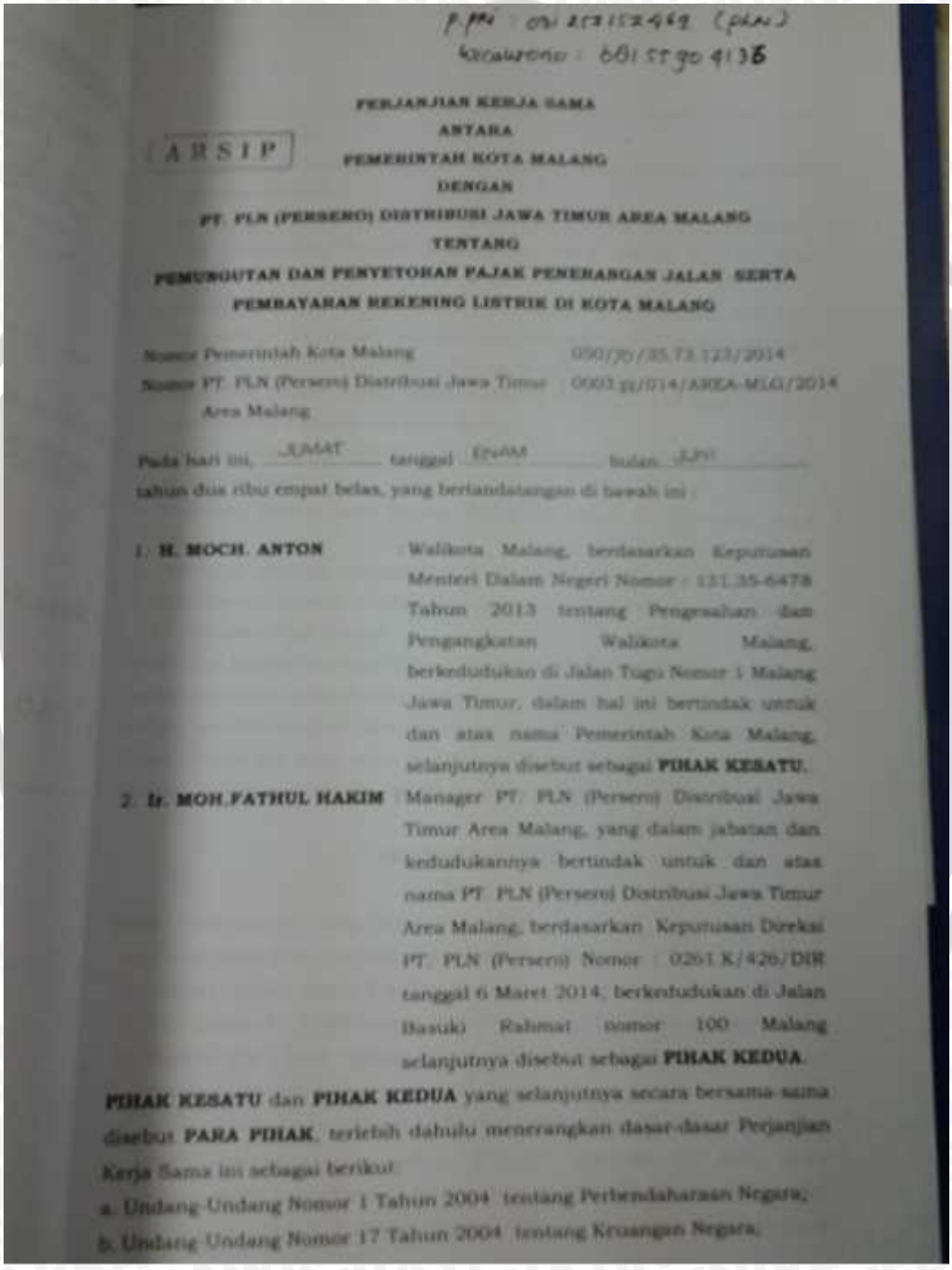
T.A 2011 S/D 2015

TAHUN	URAIAN	TARGET SETELAH PAK (Rp)	REALISASI PENERIMAAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
2011	**Pajak Daerah**	**104.644.701.180,71**	**125.332.979.877,83**	**119,77**
	Pajak Hotel	7.937.911.592,30	8.485.718.854,76	106,90
	Pajak Restoran	16.551.035.303,41	17.992.470.997,13	108,71
	Pajak Hiburan	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80	23,47
	Pajak Reklame	10.556.778.935,00	9.944.155.284,00	94,20
	Pajak Penerangan Jalan	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00	109,07
	Pajak Parkir	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00	108,35
	Pajak Air Tanah	375.732.000,00	393.903.242,04	104,84

	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah&Bangunan (BPHTB)	41.516.900.527,00	58.031.496.633,10	139,78
2012	Pajak Daerah	125.828.676.756,77	159.124.119.792,89	126,46
	Pajak Hotel	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,81
	Pajak Restoran	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,75
	Pajak Hiburan	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85
	Pajak Reklame	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45	108,18
	Pajak Penerangan Jalan	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	108,63
	Pajak Parkir	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00	141,19
	Pajak Air Tanah	400.772.081,00	509.265.868,70	127,07
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah&Bangunan (BPHTB)	59.887.500.269,19	85.192.801.059,10	142,28
2013	**Pajak Daerah**	**210.287.899.778,18**	**238.499.748.161,57**	**113,42**
	Pajak Hotel	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87	125,37
	Pajak Restoran	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	118,85
	Pajak Hiburan	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,30
	Pajak Reklame	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75	118,58
	Pajak Penerangan Jalan	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90	107,64
	Pajak Parkir	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00	114,52
	Pajak Air Tanah	641.130.420,40	694.747.885,20	108,36
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah&Bangunan (BPHTB)	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80	116,50
	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04	107,26
2014	**Pajak Daerah**	**260.000.000.000,00**	**278.885.189.548,87**	**107,26**
	Pajak Hotel	17.169.937.868,68	25.069.057.562,87	146,01
	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	30.473.435.484,90	107,31
	Pajak Hiburan	4.542.595.922,58	5.140.722.135,41	113,17

	Pajak Reklame	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52	123,97
	Pajak Penerangan Jalan	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27	106,22
	Pajak Parkir	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00	135,70
	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	819.219.964,44	116,84
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah&Bangunan (BPHTB)	100.050.000.000,75	101.525.731.993,94	101,47
	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52	100,02
2015	**Pajak Daerah**	**272.000.000.000,00**	**316.814.967.743,76**	**116,48**
	Pajak Hotel	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43	143,82
	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	137,21
	Pajak Hiburan	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94	122,02
	Pajak Reklame	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32	104,71
	Pajak Penerangan Jalan	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	112,82
	Pajak Parkir	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90	146,40
	Pajak Air Tanah	749.475.964,90	777.523.080,54	103,74
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah&Bangunan (BPHTB)	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23	111,41
	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869.267.940,29	58.614.789.726,00	108,81

Lampiran 6 : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Malang Dengan PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Di Kota Malang



P.PK : 081 2131524469 (pln)
Kecamatan : 0815590413B

ARSIP

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA MALANG
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI KOTA MALANG

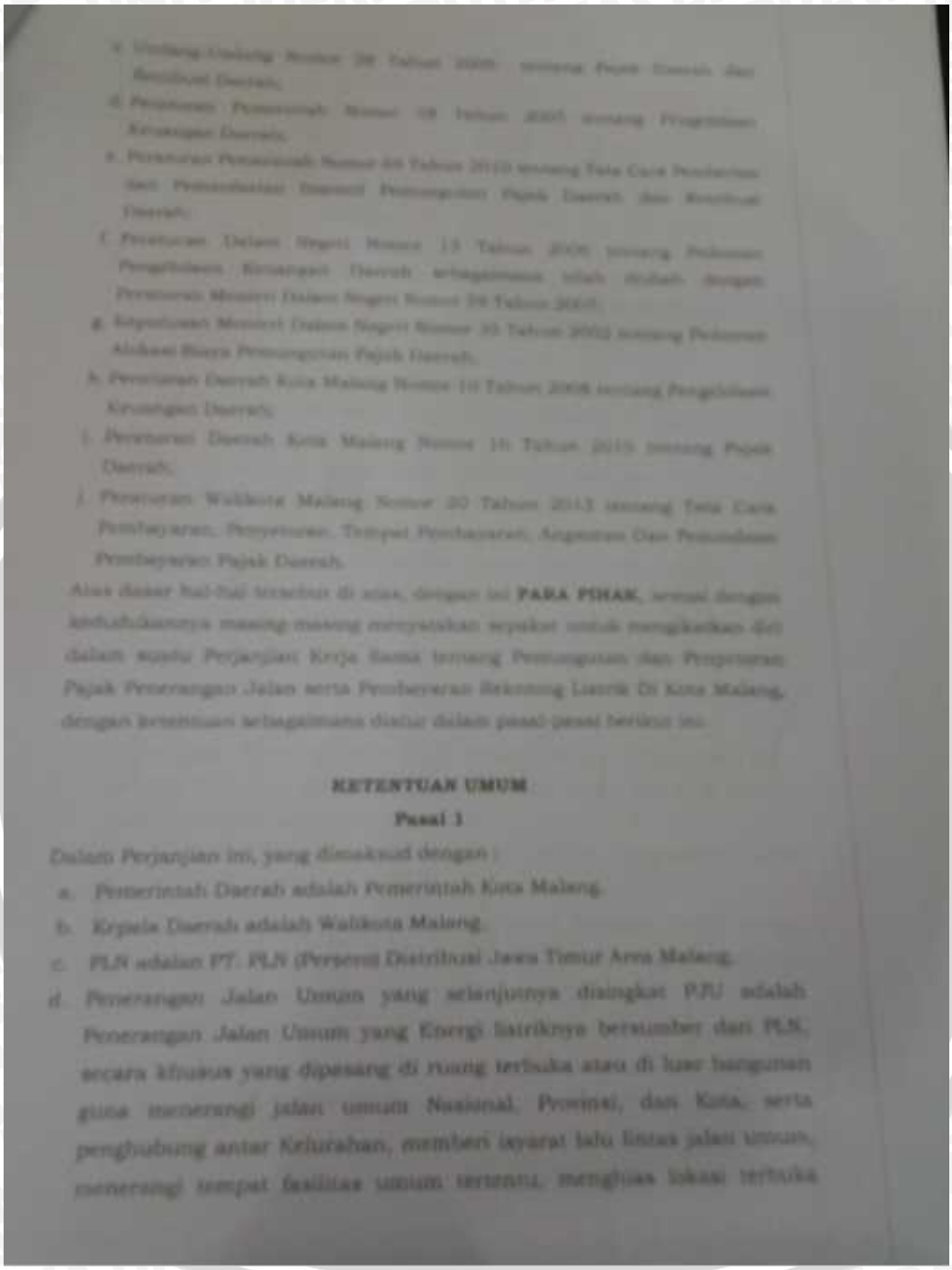
Nomor Pemerintah Kota Malang : 050/70/35.73.123/2014
Nomor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang : 0003.pj/014/AREA-MLG/2014

Pada hari ini, JUMAT tanggal ENAM bulan JUNI tahun dua ribu empat belas, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **H. MOCH. ANTON** : Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-6478 Tahun 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Walikota Malang, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. MOH.FATHUL HAKIM** : Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, yang dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0261.K/426/DIR tanggal 6 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat nomor 100 Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;



c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah;

j. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pendaftaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK**, setuju dengan kedudukannya masing-masing menyetujui sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik Di Kota Malang, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

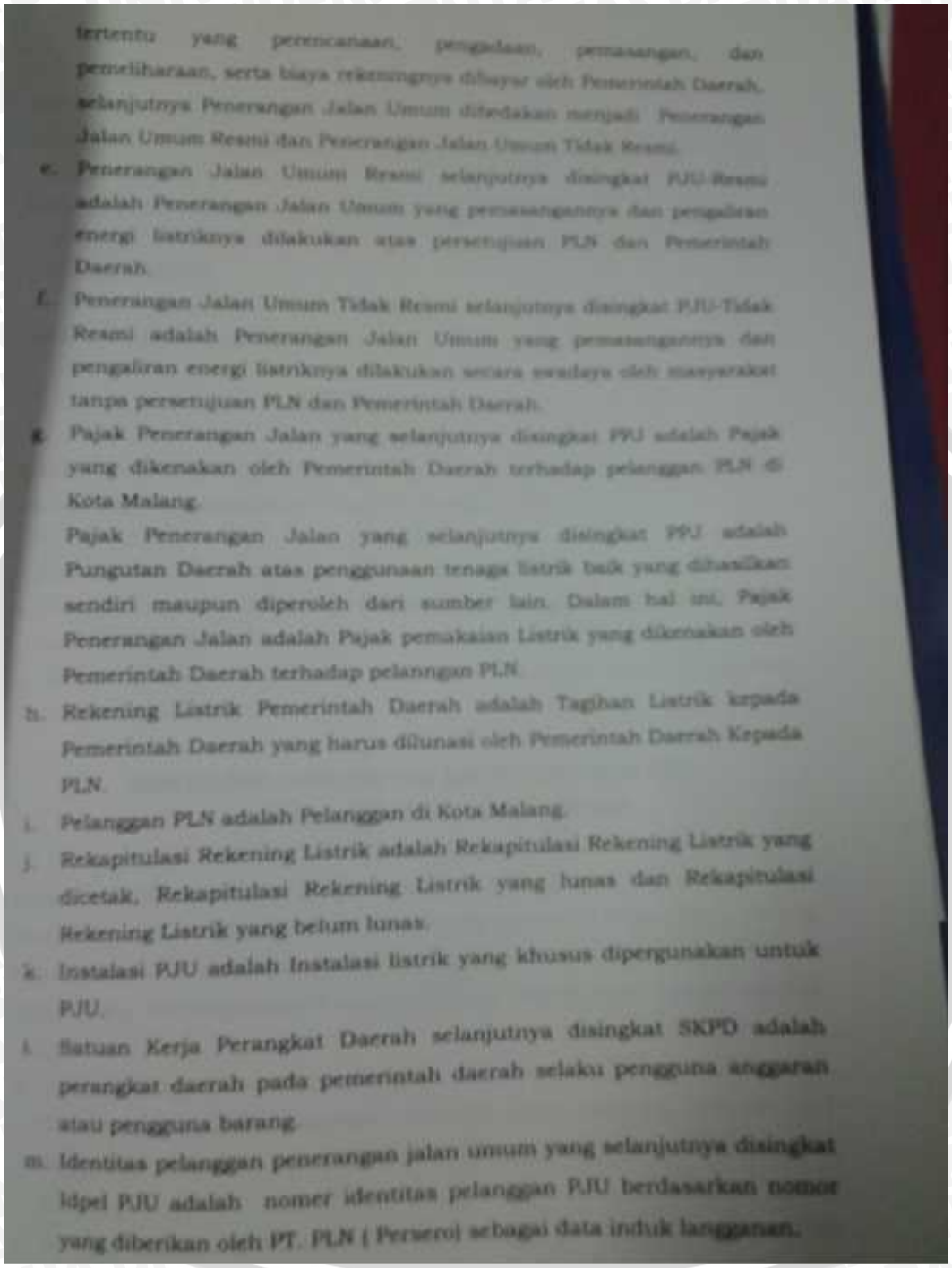
Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

a. *Pemerintah Daerah* adalah Pemerintah Kota Malang.

b. *Kepala Daerah* adalah Walikota Malang.

c. *PLN* adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

d. *Penerangan Jalan Umum* yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang Energi listriknya bersumber dari PLN, secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi, dan Kota, serta penghubung antar Kelurahan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi tertuka



tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya Penerangan Jalan Umum ditetakan menjadi Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan Jalan Umum Tidak Resmi.

e. Penerangan Jalan Umum Resmi selanjutnya disingkat PJU-Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangannya dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan PLN dan Pemerintah Daerah.

f. Penerangan Jalan Umum Tidak Resmi selanjutnya disingkat PJU-Tidak Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangannya dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa persetujuan PLN dan Pemerintah Daerah.

g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggan PLN di Kota Malang.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini, Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak pemakaian Listrik yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanngan PLN.

h. Rekening Listrik Pemerintah Daerah adalah Tagihan Listrik kepada Pemerintah Daerah yang harus dilunasi oleh Pemerintah Daerah Kepada PLN.

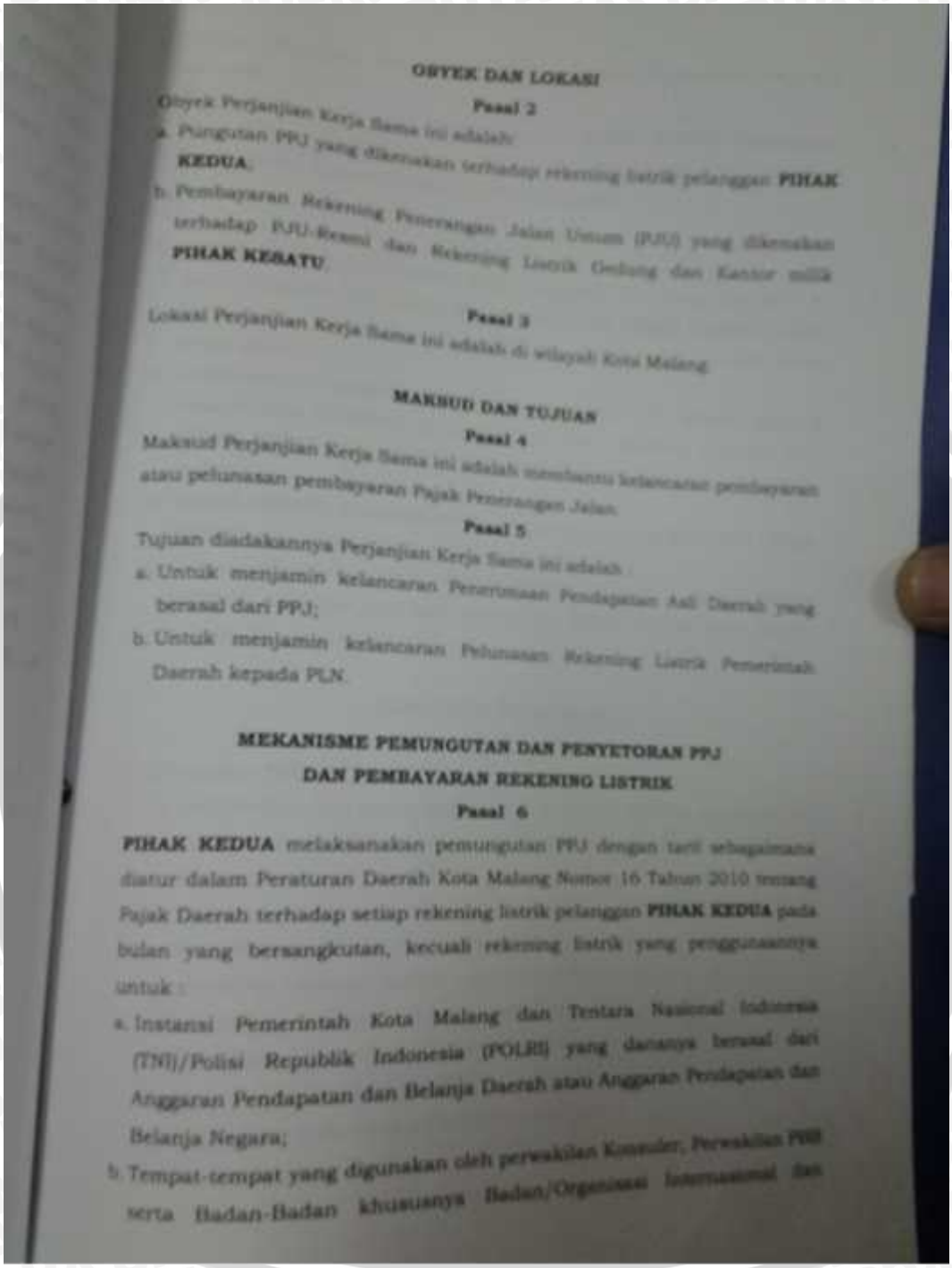
i. Pelanggan PLN adalah Pelanggan di Kota Malang.

j. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik yang dicetak, Rekapitulasi Rekening Listrik yang lunas dan Rekapitulasi Rekening Listrik yang belum lunas.

k. Instalasi PJU adalah Instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.

l. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

m. Identitas pelanggan penerangan jalan umum yang selanjutnya disingkat idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan PJU berdasarkan nomor yang diberikan oleh PT. PLN (Perseroj sebagai data induk langganan.



OBYEK DAN LOKASI

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. Pungutan PPJ yang dikenakan terhadap rekening listrik pelanggan **PIHAK KEDUA**;

b. Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikenakan terhadap PJU-Resmi dan Rekening Listrik Gedung dan Kantor milik **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini adalah di wilayah Kota Malang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membantu kelancaran pembayaran atau pelunasan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 5

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. Untuk menjamin kelancaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari PPJ;

b. Untuk menjamin kelancaran Pelunasan Rekening Listrik Pemerintah Daerah kepada PLN.

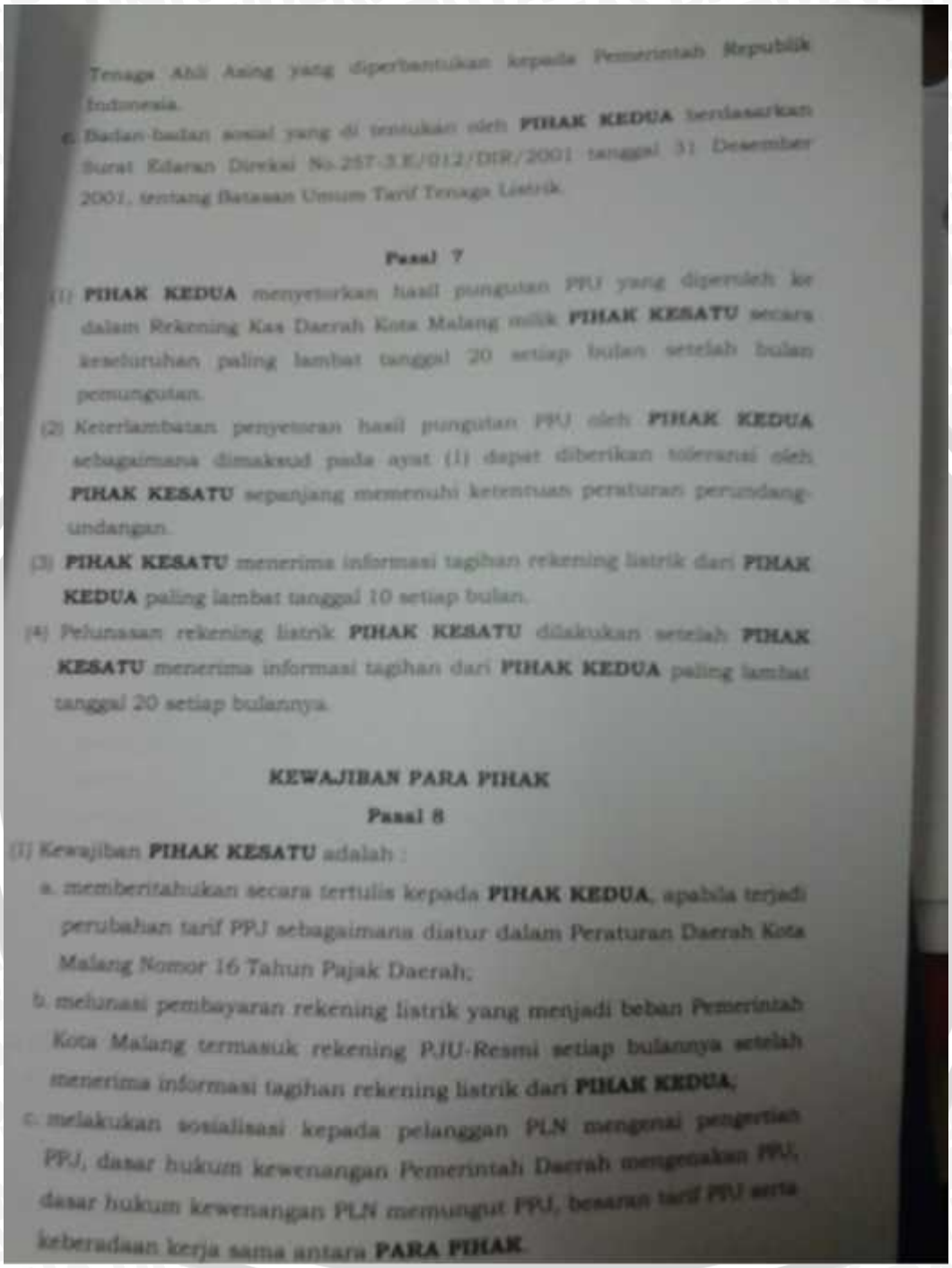
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPJ DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Pasal 6

PIHAK KEDUA melaksanakan pemungutan PPJ dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terhadap setiap rekening listrik pelanggan **PIHAK KEDUA** pada bulan yang bersangkutan, kecuali rekening listrik yang penggunaannya untuk :

a. Instansi Pemerintah Kota Malang dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Tempat-tempat yang digunakan oleh perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-Badan khususnya Badan/Organisasi Internasional dan



Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

e. Badan-badan sosial yang di tentukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Edaran Direksi No.257-3.E/012/DIR/2001 tanggal 31 Desember 2001, tentang Batasan Umum Tarif Tenaga Listrik.

Pasal 7

(1) **PIHAK KEDUA** menyetorkan hasil pungutan PPJ yang diperoleh ke dalam Rekening Kas Daerah Kota Malang milik **PIHAK KESATU** secara keseluruhan paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan.

(2) Keterlambatan penyetoran hasil pungutan PPJ oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan toleransi oleh **PIHAK KESATU** sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** menerima informasi tagihan rekening listrik dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

(4) Pelunasan rekening listrik **PIHAK KESATU** dilakukan setelah **PIHAK KESATU** menerima informasi tagihan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

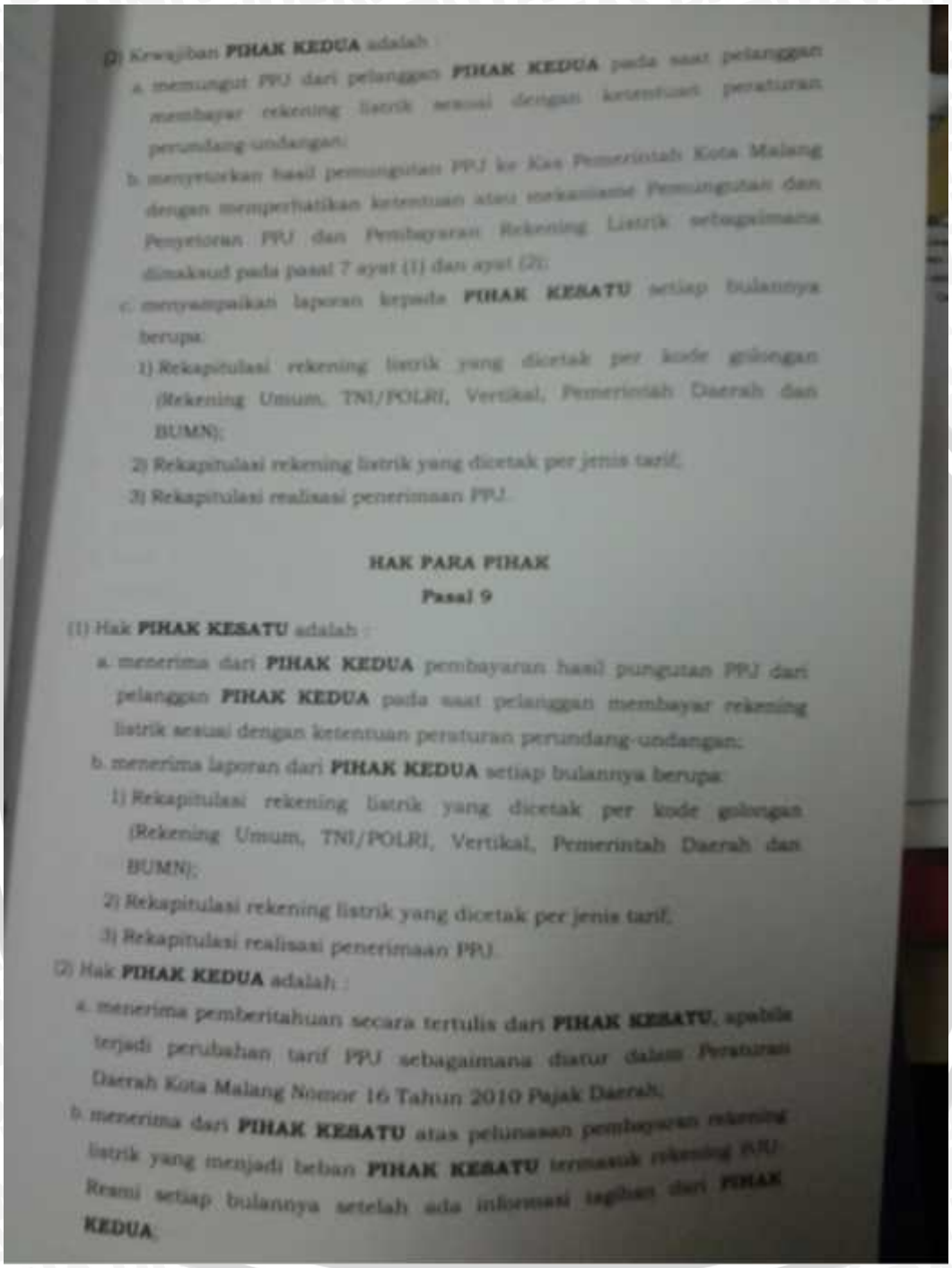
Pasal 8

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

a. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi perubahan tarif PPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun Pajak Daerah;

b. melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Kota Malang termasuk rekening PJU-Resmi setiap bulannya setelah menerima informasi tagihan rekening listrik dari **PIHAK KEDUA**;

c. melakukan sosialisasi kepada pelanggan PLN mengenai pengertian PPJ, dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah mengenakan PPJ, dasar hukum kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tarif PPJ serta keberadaan kerja sama antara **PARA PIHAK**.



(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

a. memungut PPJ dari pelanggan **PIHAK KEDUA** pada saat pelanggan membayar rekening listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyetorkan hasil pemungutan PPJ ke Kas Pemerintah Kota Malang dengan memperhatikan ketentuan atau mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

c. menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya berupa:

1) Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (Rekening Umum, TNI/POLRI, Vertikal, Pemerintah Daerah dan BUMN);

2) Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif;

3) Rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ.

HAK PARA PIHAK

Pasal 9

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

a. menerima dari **PIHAK KEDUA** pembayaran hasil pungutan PPJ dari pelanggan **PIHAK KEDUA** pada saat pelanggan membayar rekening listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** setiap bulannya berupa:

1) Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (Rekening Umum, TNI/POLRI, Vertikal, Pemerintah Daerah dan BUMN);

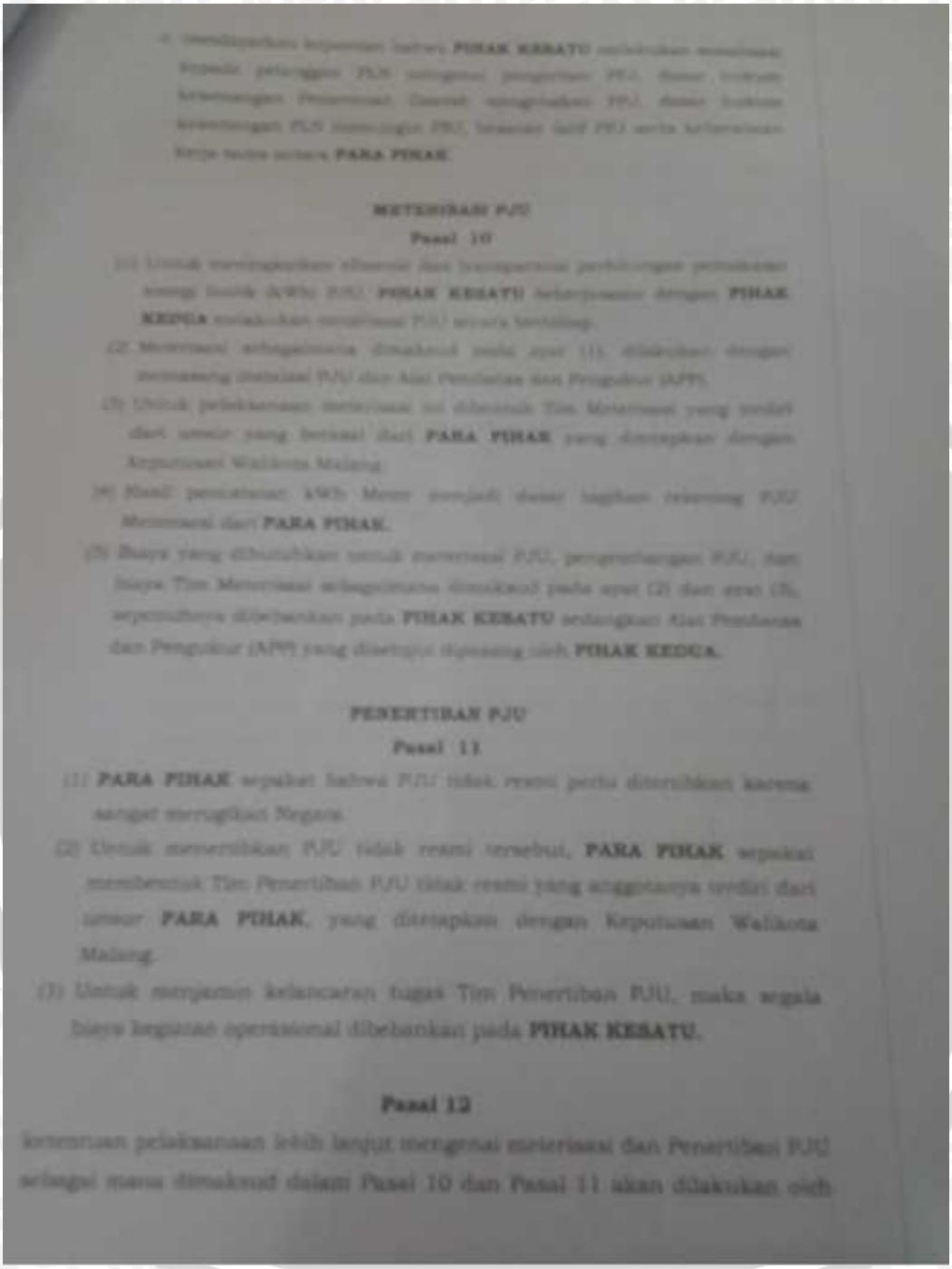
2) Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif;

3) Rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

a. menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, apabila terjadi perubahan tarif PPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pajak Daerah;

b. menerima dari **PIHAK KESATU** atas pelunasan pembayaran rekening listrik yang menjadi beban **PIHAK KESATU** termasuk rekening RU Resmi setiap bulannya setelah ada informasi tagihan dari **PIHAK KEDUA**.



menandatangani kejasaman bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan pemeliharaan terhadap peralatan PJU milik/aset pengelolaan PPJ, dalam hubungan kewenangan Pemerintah Daerah menggunakan PPJ, dalam hubungan kewenangan PLN menunggu PPJ, biasanya tarif PPJ serta kelancaran kerja sama antara **PARA PIHAK**.

KETERSEDIAAN PJU

Pasal 10

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pembayaran pemakaian energi listrik (kWh) PJU **PIHAK KESATU** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan penertiban PJU secara bertahap.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang (Instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).

(3) Untuk pelaksanaan penertiban ini dibentuk Tim Penertiban yang terdiri dari unsur yang berasal dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang.

(4) Hasil pencatatan kWh Meter menjadi dasar tagihan rekening PJU Penertiban dari **PARA PIHAK**.

(5) Biaya yang dibutuhkan untuk penertiban PJU, pengoperasian PJU, dan biaya Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sepenuhnya dibebankan pada **PIHAK KESATU** sedangkan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang disetujui dipasang oleh **PIHAK KEDUA**.

PENERTIBAN PJU

Pasal 11

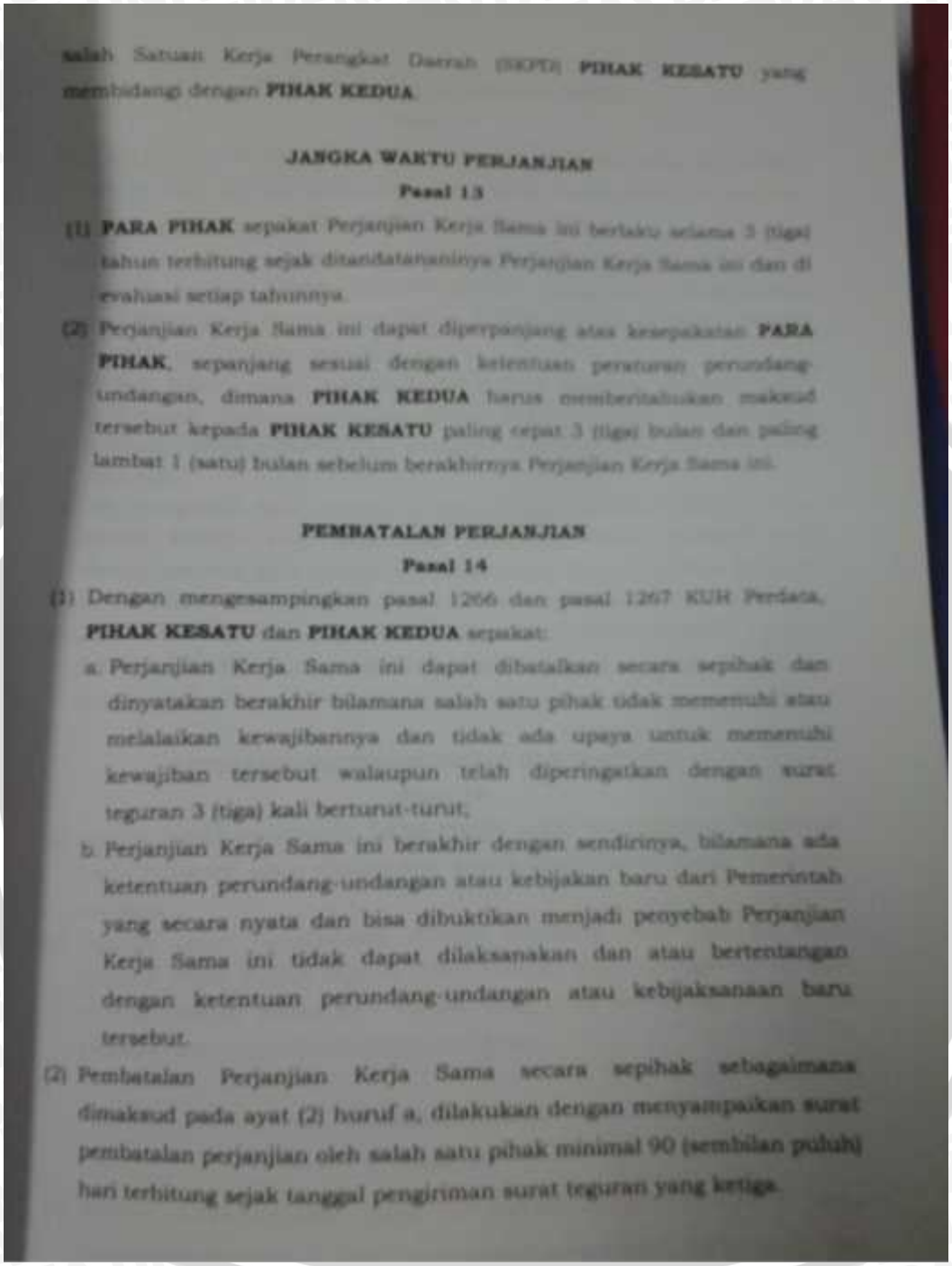
(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa PJU tidak resmi perlu ditertibkan karena sangat merugikan Negara.

(2) Untuk menertibkan PJU tidak resmi tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membentuk Tim Penertiban PJU tidak resmi yang anggotanya terdiri dari unsur **PARA PIHAK**, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang.

(3) Untuk menjamin kelancaran tugas Tim Penertiban PJU, maka segala biaya kegiatan operasional dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 12

ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penertiban dan Penertiban PJU sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 akan dilakukan oleh



salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **PIHAK KESATU** yang membidangi dengan **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 13

(1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan di evaluasi setiap tahunnya.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan maksud tersebut kepada **PIHAK KESATU** paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

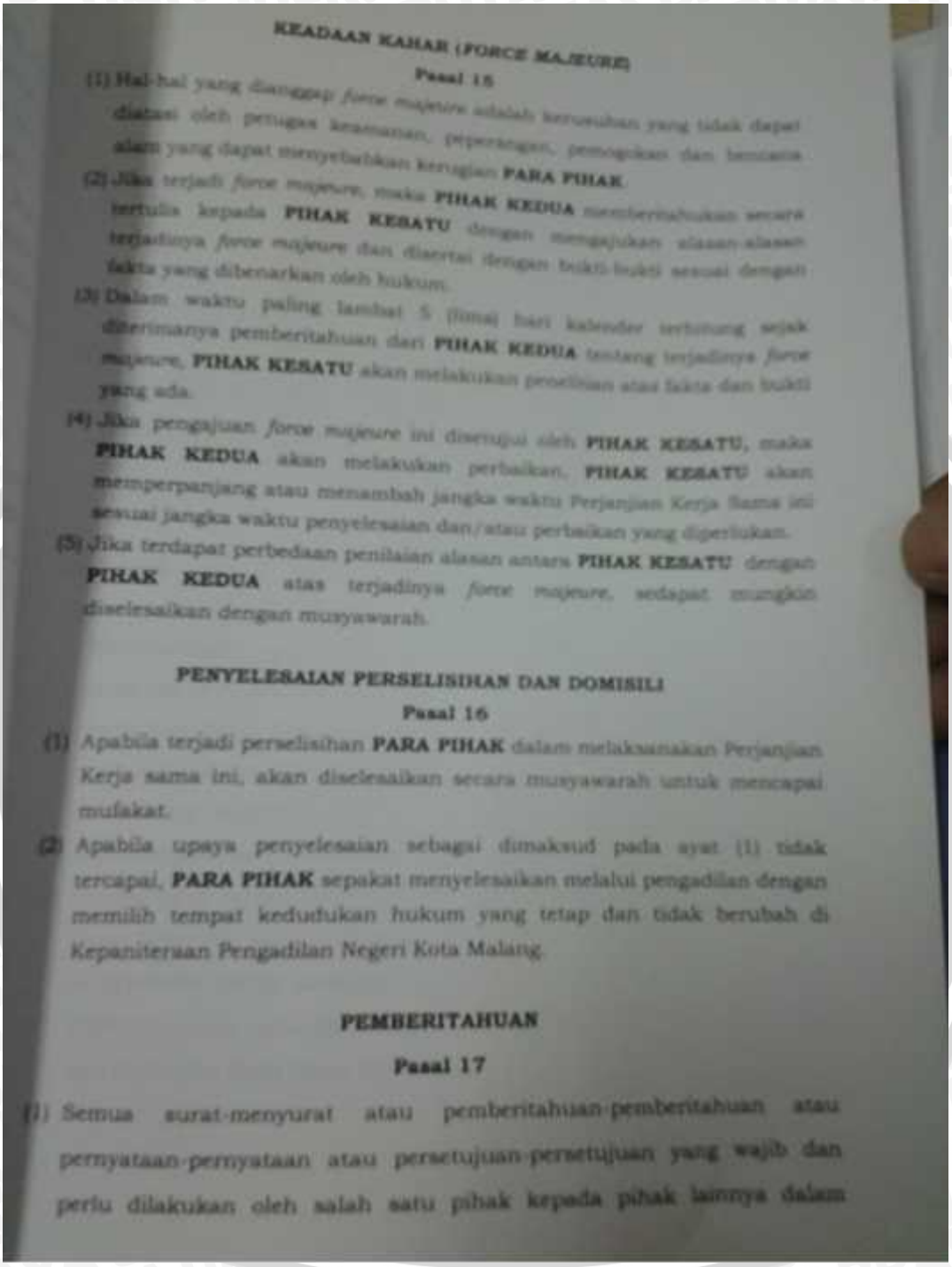
Pasal 14

(1) Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

a. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak dan dinyatakan berakhir bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut;

b. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya, bilamana ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata dan bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan dan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan baru tersebut.

(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.



KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15

(1) Hal-hal yang dianggap *force majeure* adalah kerusuhan yang tidak dapat diatasi oleh petugas keamanan, peperangan, pemogokan dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian **PARA PIHAK**.

(2) Jika terjadi *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dengan mengajukan alasan-alasan terjadinya *force majeure* dan disertai dengan bukti-bukti sesuai dengan fakta yang dibenarkan oleh hukum.

(3) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** tentang terjadinya *force majeure*, **PIHAK KESATU** akan melakukan penelitian atas fakta dan bukti yang ada.

(4) Jika pengajuan *force majeure* ini disetujui oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan perbaikan. **PIHAK KESATU** akan memperpanjang atau menambah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sesuai jangka waktu penyelesaian dan/atau perbaikan yang diperlukan.

(5) Jika terdapat perbedaan penilaian alasan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** atas terjadinya *force majeure*, sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

PEMBERITAHUAN

Pasal 17

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam

pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **WALIKOTA MALANG**
Jalan Tugu No. 1 Malang
Telepon (0341) 366870

PIHAK KEDUA : **MANAJER PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA MALANG**
Jl. Basuki Rahmat No. 100 Malang

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu yang wajib diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain secara tertulis.

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi Perjanjian Kerja Sama ini pada saat ditandatangani, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

(3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian tambahan atau *Addendum* yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan untuk kepentingan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 1 (satu).

PIHAK KEDUA
MANAGER PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA MALANG,

Ir. MOH. FATKHUL HAKIM

PIHAK KESATU
WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

SALINAN
Nomor : 9/B 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tarif Pajak Penerangan Jalan berdasarkan ketentuan pasal 60 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsiderans di atas, perlu mengatur kembali dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pajak Penerangan Jalan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubklik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak dan Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pumungutan Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Daerah .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Malang .
5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah .
8. Obyek Pajak, adalah setiap penggunaan tenaga listrik .

9. Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah .
10. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu .
11. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .
12. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim .
13. Pajak yang terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah .
14. Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah .
15. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik .
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah .
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak .
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar .
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
21. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda .
22. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik ;

(2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berasal dari PLN maupun bukan PLN .

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik ;
c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah .

Pasal 4

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN .

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik ;

(2) Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik ;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau bahkan taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah .

(3) Harga satuan listrik sebagaiaman dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN ;

(4) Khusus untuk kegiatan industri , pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30 % (tiga Puluh persen) .

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, dengan penggunaan untuk :

1) Rumah Tangga sebesar 7 % (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

2) Bisnis sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

3) Sosial Komersiil sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

4) Sosial Non Komersiil sebesar 0 % (Nol Persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
5) Pemerintah sebesar 0 % (Nol Persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
6) Industri sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, dengan penggunaan bukan untuk industri ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan penggunaan untuk industri ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini .

BAB V

PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik .

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanggani oleh wajib pajak atau kuasanya ;

(3) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD ;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisiaan SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan data obyek pajak secara benar dan akurat, Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada wajib pajak ;

(2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD ;

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari kekurangan pajak yang harus dibayar sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD .

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ;

c. SKPDN .

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini diterbikan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrsi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;

(3) Pembayan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD ;

(4) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan PLN merupakan SSPD ;

(5) Untuk pelanggan listrik PLN tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik

Pasal 14

(1) Pembayar pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

(5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;

(2) Untuk pelanggan listrik PLN, rekening pembayaran listrik merupakan bukti pembayaran pajak .

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan .

Pasal 19

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi Hutang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara .

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak .

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan panagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan .

Pasal 23

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan ;

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang ;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang dilakukan .

(3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
   a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
   b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
   c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya .

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengahapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana surat dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan .

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
   a. SKPD ;
   b. SKPDKB ;
   c. SKPDKBT ;
   d. SKPDLB ;
   e. SKPDN .

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak ;

(6) Untuk pelanggan listrik PLN, rekening pembayaran listrik yang diterbitkan PLN merupakan SSPD .

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
   a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
   b. Masa Pajak ;
   c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak ;
   d. Alasan yang jelas .

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak .

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
   a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
   b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang teruntang ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dituntut setelah melampau jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak .

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan segala peraturan pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Nopember 2002.

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. SUYITNO

Diundangkan di : Malang
Pada Tanggal : 15 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 04 / B.

Salinan Sesuai Aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH.
Pembina
NIP. 510 065 263.

Lampiran 8: Struk atau bukti pembayaran listrik Pra-bayar



STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR

STROOM/TOKEN : 2211 7705 0310 0681 3840

Lampiran 9: Struk atau bukti pembayaran listrik Pasca-bayar



STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

MKM REF : OMAS211611394800000000010611446/95

*PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500

TOTAL BAYAR : Rp 27.351

Terima Kasih

TERBILANG : DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH

Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Riset dari BANGKESBANGPOL Kota Malang

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491188 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/08.06.P/35.73.405/2015

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Malang No. 7907/UN10.3/AK/2015 Tanggal 29 Mei 2015, Perihal : Pengantar Kegiatan Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

a. Nama : ROBBIYAH MEINITA NASTITI.
b. NIM : 115030500111029.
c. Judul Penelitian : Pola Kemitraan dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas akhir yang berlokasi di :

- Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 01 Juli 2015.**

Malang, 01 Juni 2015

BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Ir. BAMBANG SUHARIJADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Malang;
- Mahasiswa Ybs.

(Ni Wayan Yuni PC)

Lampiran 11: Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

SURAT KETERANGAN
Nomor : 072/ 24 /35.73.405/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE. MM
NIP : 19740724 200112 2 003
Jabatan : Kasubag Umum
Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

NAMA : ROBBIYAH MEINITA NASTITI
NIM : 115030500111029
Program Study : ADMINISTRASI PUBLIK
Universitas : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan Mei s/d Juli 2015

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang, 10 JAN 2017

a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
Sekretaris
U.b.Kasubag Umum

NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP 19740724 200112 2 003

Lampiran 12 : Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 1 : Wawancara peneliti dengan Bapak Tri Okky Rudianto sebagai Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.



Foto 2 : Wawancara peneliti dengan Bapak Wicaksono sebagai Supervisor Pelayanan Pelanggan Kantor PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang



Foto 3 : Wawancara peneliti dengan Bapak Eko Prabudi sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Robbiyah Meinita Nastiti
NIM	: 115030500111029
Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 05 Mei 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Jurusan/Minat	: Administrasi Publik/Administrasi Pemerintahan
Alamat	: Jalan Danau Ranau 1 G2B Nomor 16 Sawojajar-Malang
No. Hp	: 082245398988
Email	: robbiyahmeinita@gmail.com
Pendidikan :	
SD	: 1999-2005 SD Negeri Sawojajar 6 (sekarang SD Negeri Sawojajar 5) Malang
SMP	: 2005-2008 SMP Negeri 20 Malang
SMA	: 2008-2011 SMA Negeri 4 Malang
Universitas	: Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur